

# KOMUNISME DI INDONESIA

JILID I

**PERKEMBANGAN GERAKAN  
DAN PENGKHIANATAN  
KOMUNISME DI INDONESIA  
( 1913 - 1948 )**



**PUSJARAH TNI**  
BEKERJASAMA DENGAN  
YAYASAN KAJIAN CITRA BANGSA (YKCB)  
Jakarta 2009

# **KOMUNISME DI INDONESIA**

JILID I

Perkembangan Gerakan  
Dan Pengkhianatan Komunisme  
di Indonesia  
(1913-1948)

JAKARTA 2009

## **TIM PENULIS BUKU**

**Editor** : Saleh As'ad Djamhari

**Penulis** :

- Saleh As'ad Djamhari
- Suparmo
- Variani
- Yusmar Basri
- Ariwiadi
- G. Ambar Wulan
- Agus Sosro
- I Gde Putu Gunawan
- Syarif Rahmadi
- P. Hasibuan
- Arief Sulistyono
- Artinur Setiawati
- Sutrisminingsih
- Sri Suyanti
- A. Yusuf
- M. Adiono
- A. Rusli
- Konsuwensih
- Syafril Lubis
- YP. Tarigan
- Purwanto

**Disusun Oleh** : Pusjarah TNI

**Diterbitkan Oleh** : Pusjarah TNI, bekerjasama dengan :  
Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)

**Desain Visual & Tata Letak**

**(Materi Siap Cetak)** : Sidisi, Jakarta

**No ISBN** : 978-602-95565-2-0



**PANGLIMA TNI**

**SAMBUTAN TERTULIS PANGLIMA TNI  
PADA BUKU  
"KOMUNISME DI INDONESIA"  
PUSAT SEJARAH DAN TRADISI (PUSJARAH) TNI**

Dengan memersembahkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, selaku Panglima TNI dan pribadi saya menyambut gembira, terbitnya buku "*Komunisme di Indonesia*" yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, sebagai hasil revisi atas buku "*Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*", yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Pada hemat saya buku ini merupakan hasil refleksi atau perenungan kembali atas "*sepenggal*" perjalanan sejarah TNI. Sudah barang tentu, sebagai bagian dari mata rantai peristiwa walaupun hanya "*sepenggal*" tetap saja menjadi bagian dari rangkaian perjalanan sejarah secara utuh menyeluruh. Namun demikian, di atas segala-galanya, hikmah terpenting dari setiap "*episoda*" sejarah, adalah sampai sejauh mana setiap pelaku sejarah dalam konteks ini TNI dapat memetik "*hikmah dan pelajaran*" dari setiap peristiwa sejarah itu sendiri. Sampai di sini, apa yang disebut sebagai "*obyektivitas*" dan/atau "kebenaran" sejarah, menjadi sangat relatif dan dapat diperdebatkan, karena sifatnya yang dinamis namun setting peristiwanya di batasi oleh dinding ruang dan waktu kapan peristiwa itu terjadi.

Pertanyaannya sekarang, apa "*hikmah dan pelajaran*" yang dapat dipetik oleh TNI, atas *sepenggal* sejarah nasional dan/atau

sejarah TNI yang berkenaan dengan Komunisme di Indonesia? Atas pertanyaan kritis tersebut, mari kita renungkan kembali beberapa pelajaran berharga berikut ini, agar setiap peristiwa sejarah tidak semakin memperlemah melainkan justru semakin mendorong dan memperkuat motivasi pengabdian serta kohesi persatuan dan kesatuan yang semakin kuat dan kokoh.

**Pertama**, Di depan pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pada tanggal 5 Oktober 1949, Panglima Besar Sudirman ketika hendak meninggalkan Yogyakarta menuju Magelang karena sakit yang semakin serius, beliau memberi amanat : *'pelihara TNI, pelihara Angkatan Perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga'*. (Pusat Sejarah TNI, 2004:50). Kedua, Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman, pada tanggal 12 Nopember 1945, di depan konverensi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), memberi amanat: *'tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga'* (Pusat Sejarah TNI, 2004:32).

**Ketiga**, Amanat dalam rangka pengumuman Markas Besar tentara di Yogyakarta, tanggal 4 Juli 1946, Jenderal Besar Sudirman mengatakan : *'supaya memegang teguh disiplin tentara, dan jangan sekali-kali tentara kita mendengarkan dan atau menjalankan perintah dari siapapun juga, kecuali perintah dari pimpinan tentara sendiri'*. (Pusat Sejarah TNI, 2004). **Keempat**, Dengan amat lugas dalam buku War and Management, Sun Tzu mengatakan : *'para Jenderal (militer) adalah kaum pengabdian bangsa. Bila pengabdiannya utuh, negara kukuh. Bila pengabdiannya cacat, negara runtuh'*. (Boedidharmo, 1993:106).

Oleh sebab itu menurut pandangan saya, hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari tragedi komunisme di Indonesia, adalah : **Pertama**, jangan pernah lagi terjebak dalam perangkap *'politik Praktis'* yang sangat merugikan pembinaan profesionalisme keprajuritan. **Kedua**, jangan pernah lagi mem pertaruhkan *"loyalitas"* militer selain hanya kepada bangsa dan

negara atau loyalitas “*tegak lurus*” demi “*soliditas*” militer dan “*integritas*” nasional.

Dalam kerangka itu semua, tentunya TNI tidak ingin mengulangi sejarah masa lalu yang cukup memprihatinkan berkenaan dengan *Komunisme di Indonesia* yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semoga buku sejarah ini bermanfaat terutama bagi kader pimpinan dan generasi penerus TNI, maupun setiap warga negara Republik Indonesia khususnya bagi generasi muda pewaris masa depan bangsa dalam melanjutkan perjuangan demi tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sekian dan terima kasih.



Jakarta, September 2009

Anggana Tentara Nasional Indonesia

*Djoko Santoso*  
Djoko Santoso  
Jenderal TNI



## **KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT SEJARAH TNI**

Apabila kita simak proses perubahan dalam era informasi dewasa ini, nampak adanya perubahan struktur peta politik dunia secara total. Memasuki abad 21, isu ideologi telah terdesak isu global yakni demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Begitu kuatnya perhatian masyarakat dunia terhadap isu global dewasa ini menyebabkan masalah ideologi tergeser dan menjadi tidak populer lagi.

Bagi negara-negara maju dengan masyarakatnya sudah dewasa barangkali ideologi politik bukan lagi menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Bahkan sejak berakhirnya perang dingin di kawasan Asia Tenggara pada sebagian masyarakat telah terbentuk opini bahwa bahaya laten komunisme tidak perlu dirisaukan lagi.

Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, ideologi masih menjadi persoalan bangsa. Ideologi bahkan kadang diperalat sebagai kendaraan untuk meraih kepentingan dan tujuan politik tertentu. Oleh karena itu adanya opini bahwa kita tidak lagi perlu mencemaskan bahaya laten komunis bagi masyarakat Indonesia, khususnya TNI tentu patut dipertanyakan karena bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun TNI bersama Rakyat dituntut untuk selalu memelihara dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ideologi komunisme yang mengancam ideologi Pancasila serta kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Sikap waspada itu perlu dimiliki oleh setiap individu, perlu dibina serta ditingkatkan demi terwujudnya ketahanan nasional yang mantap. Dengan terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, kita harapkan mampu meredam berbagai bentuk ancaman terhadap Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan selalu berorientasi kepada kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional kita akan lebih peka menghadapi timbulnya setiap gejolak serta mencegah kemungkinan terulangnya peristiwa kelam yang pernah menjadi mala petaka bangsa kita.

Salah satu tragedi akibat dari kekurangwaspadaan kita terhadap ideologi dan gerakan komunis adalah peristiwa pemberontakan kedua kalinya yang dilancarkan oleh PKI pada tahun 1965 atau dikenal dengan G. 30 S/PKI. Dengan merenungkan dan mengambil hikmah serta pelajaran dari rangkaian peristiwa pengkhianatan PKI sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 dan Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang kemudian terulang kembali pada tahun 1965, mudah-mudahan bisa semakin menyadarkan masyarakat Indonesia, khususnya segenap anggota TNI bahwa sampai kini ideologi komunisme terus berkembang, dengan gaya barunya (Neo Komunisme).

Khusus bagi generasi muda yang tidak mengalami kedua peristiwa yang tragis tersebut, perlu memahami sejarah tingkah laku politik PKI dan pengkhianatan PKI dari masa pergerakan nasional hingga tahun 1965 agar lebih peka sehingga mampu mendeteksi setiap gejala awal munculnya bahaya laten komunisme.

Dengan memahami berbagai sepak terjang tingkah laku politik PKI, yang diungkapkan dalam buku ini, diharapkan kita dapat lebih memahami perjalanan sejarah bahwa TNI pernah dimainkan oleh politik, sehingga dalam catatan sejarah TNI pernah terjadi berbagai peristiwa tragis karena adanya intervensi partai Komunis Indonesia. Mudah-mudahan tingkat kepekaan masyarakat Indonesia khususnya anggota TNI terhadap bahaya laten komunis tidak akan pernah lekang dimakan jaman.

Kehadiran kembali buku Komunisme di Indonesia yang merupakan revisi dan cetak ulang terdiri dari lima jilid, buku sejarah ini mengungkapkan adanya upaya-upaya komunis dalam melakukan infiltrasi agar berpihak kepadanya. Adapun judul buku yang direvisi dan cetak ulang tersebut adalah sebagai berikut :

- Jilid I : Komunisme di Indonesia, Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)
- Jilid II : Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI (1948)
- Jilid III : Komunisme di Indonesia, Konsolidasi dan infiltrasi PKI (1950- 1959)
- Jilid IV : Komunisme di Indonesia, Pemberontakan G. 30 S/PKI dan Penumpasannya (1960- 1965).
- Jilid V : Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya (1965- 1981).

Kami menyadari bahwa tidak ada satupun karya dari tangan manusia yang lahir dalam keadaan sempurna, dan sudah barang tentu, buku “Komunisme di Indonesia” yang telah direvisi dan dicetak ulang ini masih banyak kekurangannya. Untuk menjadi kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya apabila masih ditemui kekurangan kekurangan. Mudah-mudahan buku ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua

Jakarta, September 2009

Kepala Pusat Sejarah TNI



Pamudjo

Brigadir Jenderal TNI

## DARI PENERBIT

Berbicara mengenai sejarah politik Indonesia, tentu kita tidak bias melupakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai mengusung ideologi komunis ini, sepak-terjangnya telah “menghujamkan luka” yang sangat dalam melalui aksi pemberontakannya, Yakni, Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965/PKI-dengan tujuan mendirikan Republik Indonesia yang berazaskan Komunisme dan mengganti Dasar Negara Pancasila.

Dokumentasi tertulis dan kesaksian-kesaksian atas gerakan PKI di Indonesia pada saat ini banyak tersedia di banyak pusat pusat dokumentasi, buku-buku terbitan tokoh-tokoh yang terlibat dan mengetahui peristiwa tersebut, merupakan bagian penting bukti perjalanan sejarah politik Indonesia. Sebab itu, ketika Tim Penulis Pusat Sejarah TNI berkeinginan menerbitkan buku *Komunis Di Indonesia* melalui **Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)**, kami menyambut gembira rencana tersebut. Mengingat buku berjudul *Komunisme Di Indonesia* yang terdiri dari lima jilid, mampu menghadirkan sejarah Komunisme dengan bukti-bukti otentik sebagai salah satu syarat penulisan sejarah yang obyektif.

Buku ini menjadi sangat penting bagi pemahaman sejarah secara utuh pada masa kini dan masa mendatang. Karena, generasi muda yang memiliki jarak waktu dengan aksi-aksi PKI dan perkembangan Komunisme di Indonesia, akan bisa memahami secara komprehensif, bahwa ideologi komunis, Marxisme/ Leninisme memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, yang prulalis namun juga religius. Seperti diketahui, pada masa sekarang banyak tokoh yang terlibat dalam PKI, pemerhati sejarah dan generasi muda, bergerak untuk menghidupkan kembali Komunisme di Indonesia.

Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso** yang telah meluangkan waktu menulis Kata Sambutan, **Tim Penulis Pusat Sejarah TNI** dan **Bapak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)** yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku Komunisme Di Indonesia ini. Semoga dengan terbitnya buku Komunisme Di Indonesia, bisa bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

Jakarta, September 2009

**Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)**

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN PANGLIMA TNI

KATA PENGANTAR KAPUSJARAH TNI

DARI PENERBIT

BAB I

PENDAHULUAN..... 1

BAB II

MASUKNYA KOMUNISME KE INDONESIA DAN

KEGIATANNYA..... 5

1. Munculnya Ideologi Komunis dan  
Awal Perkembangannya.....5
2. Perkembangan Organisasi Komunis Internasional  
hingga munculnya komintern tahun 1919..... 8
3. Aliran-aliran Komunisme..... 13
4. Lahirnya Partai Komunis Indonesia/PKI dan Awal  
Perkembangannya..... 19
5. PKI sebagai Instrumen Komunis Internasional..... 28
6. Pemberontakan PKI 1926/1927..... 32
7. Gerakan PKI Ilegal..... 37

BAB III

USAHA-USAHA PEREBUTAN KEKUASAAN

LOKAL..... 43

1. Peristiwa Serang: Aksi Teror Gerombolan Ce`Mamat  
9 Desember 1945..... 43
2. Peristiwa Tangerang: Aksi Kekerasan Pasukan Ubel - ubel  
18 Oktober 1945 - 14 Januari 1946..... 49

3. Peristiwa Tiga Daerah (Oktober-Desember 1945).....	55
4. Peristiwa Bojonegoro (September 1945-Juli 1947).....	68
5. Peristiwa Cirebon (November 1945-Februari 1946).....	73

## BAB IV

### KONSOLIDASI PKI MELALUI

GERAKAN LEGAL DAN GERAKAN ILEGAL.....	81
1. Upaya Menguasai Pemuda.....	81
2. Merebut Kekuatan Buruh.....	85
3. Konsolidasi Partai.....	91
4. Menyusun Kekuatan Bersenjata.....	103

## BAB V

### JATUHNYA KABINET AMIR SYARIFUDDIN DAN MUNCULNYA KELOMPOK OPOSISI FRONT

DEMOKRASIRAKYAT.....	113
1. Oposisi Front Demokrasi Rakyat di Komite Nasional Indonesia Pusat.....	113
2. Gerakan Front Demokrasi Rakyat dan Peristiwa Pemogokan di Delanggu 28 Juni 1948.....	120
3. Kedatangan Tokoh PKI Musso Agustus 1948 dan Konsolidasi PKI.....	123

## BAB VI

### PERSIAPAN PEMBERONTAKAN PKI

DI MADIUN 1948 .....	129
1. “Pisau Hatta” Memotong Pengaruh Komunisme.....	129
2. Komunisme Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru.....	139
3. PKI Menyiapkan Kekuatan Militer.....	141

BAB VII	
PENUTUP.....	151
DAFTAR SUMBER.....	157
INDEKS.....	162

## **BAB I PENDAHULUAN**

Komunisme adalah ideologi dan gerakan yang bersifat internasional. Ideologi ini lahir dari dasar historismaterialisme yang secara diametral bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara kita.

Banyak orang telah membahas dan menulis tentang komunisme, namun belum banyak yang memperhatikan tingkah laku dan gerakannya, khususnya di Indonesia. Sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, setiap penganut komunisme adalah pembawa misi yang permanen, yaitu membentuk negara komunis dan masyarakat komunis. Misi ini dijabarkan dalam berbagai bentuk aksi, baik yang bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing masing tempat, daerah, atau negara yang disebutkan sebagai tahap perjuangan. Karena organisasi komunis bersifat internasional, maka gerakannya pun bersifat internasional, serta dikendalikan secara internasional pula. Sesudah gagalnya Pemberontakan 1926/1927, organisasi komunis di Indonesia hancur dan bercerai-berai. Para tokoh dan kadernya tersebar .menyelamatkan diri dari tangkapan Pemerintah Hindia Belanda.

Dengan hancurnya organisasi komunis ini, banyak orang berasumsi bahwa komunis telah lemah, tidak berbahaya dan akhirnya mati. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain. Kader-kader yang bercerai-berai itu melakukan "pekerjaan ilegal". Tiap-tiap individu mengaku sebagai pembawa misi untuk meneruskan gerakannya, dengan dalil menghalalkan segala cara.

Kebangkitan fasisme pada tahun 1935, menyebabkan terjadinya perubahan politik di Eropa. Menghadapi perubahan ini, pimpinan tertinggi komunis menghentikan permusuhannya dengan kapitalisme dan menyatakan perang terhadap fasisme. Perubahan sikap itu dilakukan pula oleh orang-orang komunis di

Indonesia. Tanpa malu-malu mereka menerima bantuan dari pihak kapitalis yang ditandai dengan kerjasama Mr. Amir Sjarifuddin Van Der Plas.

Oleh karena setiap kader komunis adalah “pembawa misi” komunisme, maka mereka tidak pernah mengakui hasil perjuangan kelompok lain. Keberhasilan pemimpin nasionalis memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, tidak pernah diakui oleh orang-orang komunis, bahkan mereka berusaha merongrongnya. Mereka menyatakan bahwa “revolusi Agustus adalah revolusinya borjuis nasional”. Akan tetapi, karena kaum komunis tidak dapat membantah kenyataan tersebut, maka mereka melakukan aksi-aksi politik yang dilaksanakan dari jalan bawah dan dari jalan atas.

Sisa-sisa pemberontak golongan sayap kiri tahun 1926 (PKI, organisasi lain yang berorientasi pada ajaran Marxisme dan Linisme) adalah pelopor aksi dari jalan bawah. Aksi ini dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis gerakan bawah tanahnya pada masa pendudukan Jepang. Di sini mereka mengobarkan semangat pertentangan kelas. Para pejabat pemerintah serta merta “dicap” sebagai penindas, kaki tangan fasis, seperti 5 kasus perebutan kekuasaan daerah yaitu Peristiwa Serang, Peristiwa Tangerang, Peristiwa Tiga Daerah, Peristiwa Cirebon dan Peristiwa Bojonegoro. Orang-orang komunis sebagai pembawa misi, berusaha merongrong “revolusinya kaum borjuis” dengan melakukan “revolusi -revolusi” lokal. Rakyat di beberapa daerah dihasut bahkan diintimidasi agar ikut melaksanakan “revolusi komunis” yang pada hakekatnya merongrong kewibawaan dan kedaulatan negara RI. Perebutan perebutan kekuasaan lokal dimaksudkan sebagai daerah yang dibebaskan untuk mengepung wilayah RI.<sup>1</sup>

Mr. Amir Sjarifuddin adalah pelopor aksi dari jalan atas. Dengan membina kerjasama dengan golongan sosialis, ia berhasil mengubah KNIP-eksekutif menjadi KNIP-Legislatif pada bulan Oktober 1945.

---

1. Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta, 1989, hal.10

Dengan KNIP-legislatif kelompok komunis melakukan silent coup terhadap Sukarno-Hatta. Sekalipun enggan, Sukarno-Hatta terpaksa menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok Sjahrir Amir. Lawan politik berikutnya adalah kelompok Tan Malaka. Pada 1946 kelompok ini berhasil disingkirkan dari arena politik, akibat peristiwa kudeta tanggal 3 Juli 1946. Hanya menghadapi Angkatan Perang, Mr. Amir Sjarifuddin merasa kewalahan. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman yang semula dianggap sebagai anak bawang ternyata seorang politikus tangguh yang bersikap merendah. Angkatan Perang sulit dipengaruhi dan ditaklukkan, sekalipun Mr. Amir Sjarifuddin telah menciptakan pelbagai laskar tandingan. Orang-orang komunis sadar bahwa Angkatan Perang harus dibina secara sabar dan hati-hati.

Lawan selanjutnya adalah kawan seiringnya, yakni kelompok sosialis. Kelompok ini ditinggalkan begitu saja, tanpa peduli dengan jasa Sjahrir. Sampai tahun 1948 Mr. Amir Sjarifuddin berhasil mengkonsolidasi PKI dari jalan atas sampai ke tahap pembentukan Front Demokrasi Rakyat. FDR kemudian mengadakan oposisi secara parlementer terhadap pemerintah RI untuk menjatuhkan Kabinet Hatta (Kabinet Presidential) untuk diganti dengan Kabinet Parlementer. Formaturnya dari sayap kiri-Front Demokrasi Rakyat/FDR. Dalam rangka menumbangkan pemerintah Hatta, maka FDR mengobarkan suatu konfrontasi dengan pemerintah, khususnya di daerah Delanggu, yang merupakan daerah pabrik goni dan ladang kapas milik pemerintah, sehingga muncul peristiwa pemogokan di Delanggu pada tanggal 19-23 Juni 1948. sejak saat itu masalah pemogokan menjadi masalah politik. Namun senjata mogok FDR tidak dapat menumbangkan Kabinet Hatta. Bahkan Kabinet Hatta yang dikenal sebagai Kabinet "Pisau Cukur" berhasil "Memotong Pengaruh Komunisme", dalam arti memotong garis politik kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR). Dalam rangka menghadapi pengaruh Kabinet Hatta maka FDR/PKI membuat program baru yang dikenal Konsep Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru.

Di dalam konsep itu, strategi perjuangan yang digariskan direncanakan di dalam dua tahap, yakni Tahap I yang menggunakan sarana-sarana parlementer dan apabila sarana parlementer tidak berhasil maka FDR akan meningkat tahap kedua, ialah tahap non parlementer, ini dinyatakan dalam suatu ungkapan : "Karni akan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah dan melanjutkan perjuangan karni di bawah karni sendiri, baik sebagai pemberontak maupun sebagai pemerintah tersendiri".<sup>2</sup>

Untuk mempersiapkan perjuangan militer berjangka panjang Madiun akan dijadikan basis gerilya yang paling kuat, sedangkan sebagai suatu usaha penyekatan strategi, untuk mengalihkan perhatian pemerintah maka Surakarta (Solo) akan dijadikan "Wild West"/kancah perang terbuka dengan menempatkan pasukan kiri yang lebih kuat.

Tahap aksi selanjutnya diserahkan kepada Musso "Sang Guru" yang baru pulang dari luar negeri. Dalam aksi-aksi dari jalan atas, orang-orang komunis seolah-olah mencapai kesepakatan untuk tidak menampakkan wajah aslinya. Mereka selalu nampak dengan wajah sosialis, wajah nasionalis bahkan Islam.

Aksi dari jalan atas dan dari jalan bawah bermuara dalam Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948.

Dengan mengamati sejarah aksi-aksi PKI secara cermat, pastilah diperoleh pelajaran atau masukan tentang aksi-aksi tatkala PKI bergerak secara laten sebagai gerakan bawah tanah, sampai kepada aksi memperkuat diri dengan perebutan kekuasaan. Dengan demikian kita dapat meningkatkan kewaspadaan nasional kita dari bahaya Neo Komunisme yang pada era globalisasi mulai memperlihatkan kecenderungan itu.

---

2. George Me. Tuman Kahin, "Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Bah IX Pemberontakan Komunis (Alih Bahasa Bakti Soemanto), Sebelas Maret University Press 1995, hal. 342- 343 (tambahan)

## **BAB II**

# **MASUKNYA KOMUNISME KE INDONESIA DAN KEGIATANNYA**

### **1. Munculnya Ideologi Komunis dan Awal Perkembangannya**

Istilah Komunisme, berasal dari bahasa Latin “Comunis” artinya “milik bersama”. Istilah ini berakar dari pemikiran Karl Mark<sup>1</sup> dan Lenin.

Karl Marx pertama kali mengungkapkan pemikirannya mengenai ideologi<sup>2</sup> Komunis dalam sebuah pamflet yang ditulis bersama dengan Predrick Engels pada tahun 1848. Pamflet tersebut berjudul *The Communist Manifesto*. Pemikiran mereka yang diungkapkan dalam pamflet tersebut berasal dari hasil pengamatannya terhadap situasi di Eropa Barat pada saat itu. Pada saat itu di Eropa Barat sedang dalam situasi transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah pertumbuhan industrialisasi, dan di Eropa Barat juga sedang menjadi pusat ekonomi dunia, serta Inggris berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi, politik dan demokrasi politik liberal.

Dalam perkembangannya Komunisme terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran Sosial Demokrat, yang disebut juga sosialisme, dan aliran komunisme ajaran Marx dan Lenin. Yang pertama bertujuan untuk membentuk pemerintahan Demokratis Parleментар dengan pemilihan. Sedangkan yang kedua “Komunisme Marx”, yang menjadi dasar perjuangan Marx, Lenin, Stalin dan Mao Tse Tung ialah Komunisme “Diktator Proletar” yang menolak sistem pemilihan

---

1. Karl Marx dilahirkan di Trier (Treves), Jerman, pada tahun 1818, dari keluarga golongan kelas menengah turunan Yahudi yang telah memeluk agama Protestan. Ia meninggal tahun 1883 di London, Inggris dalam usia 75 tahun.

2. Ideologi: Sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang diekspresikan dan memberikan strategi berupa prosedur 1. Rancangan, instruksi serta program untuk mencapainya 2. *Weltan Schauung* yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik, 3. Paham, teori dan tujuan yang terpadu merupakan satu program sosial politik, lihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 366.

Demokratis Parlementer. “Apa yang mereka maksudkan diktator proletar ialah diktator yang mereka jalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan tani, guna mengikis habis unsur-unsur Kapitalisme, dan ini diperlukan untuk menuju Sosialisme, Komunisme lebih dikenal di Rusia dengan nama “Bolsjewisme”.

Sebenarnya teori komunisme bukan baru muncul pada abad ke-19, tetapi sudah muncul pada abad ke-16, ketika bentuk kapitalisme mulai tumbuh. Pada tahun 1516 Thomas More menulis sebuah *essay* yang berjudul *Utopia*. *Essay* Thomas More tersebut kemudian diikuti oleh Tommaso Campanella pada tahun 1623 yang menulis *Civitas Solis* (*City of the Sun*), Francis Bacon pada tahun 1627 menulis *New Atlantis*, dan James Harrington pada tahun 1658 yang menulis *The Ocean*. Pemikiran-pemikiran komunisme tetap hadir pada masa-masa setelah itu sampai munculnya tulisan Marx dan Engels.

Pemikiran Marx dan Engels tersebut dikenal dengan Marxisme. Istilah ini dipakai karena Karl Marx memberikan sumbangan pemikiran yang lebih penting dibandingkan dengan Engels. Prinsip dasar dari Marxisme adalah pertama, teori materialisme historis. Menurut Marxisme hanya persoalan-persoalan dan hubungan-hubungan materi yang riil beserta perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan-hubungan tersebut yang mampu menyebabkan berbagai perubahan dalam pemikiran dan ide-ide; kedua, teori materialisme dialektis. Teori mengenai perubahan sosial yang berdasarkan pada proses dialektis yang menekankan pada materi ketiga, sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu kepada teori nilai lebih tenaga kerja (nilai surplus).<sup>3</sup> Berdasarkan teori ini keuntungan kapitalis diambil dari jumlah yang diproduksi di atas upah yang dibayarkan pada buruh; keempat, menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar perjuangan kelas. Menurut Karl Marx perjuangan kelas akan melahirkan revolusi. Revolusi ini akan membawa kemenangan kelas pekerja (proletar)

---

3. Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran, *Dampak Pemberontakan PKI Madiun 1948 Terhadap Organisasi PNI (1948-1955)*, Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, 1994, hal. 6-10

atas kaum kapitalis (borjuis). Setelah revolusi akan terjadi suatu periode transisi yang singkat yang dinamakan diktator proletar. Tahap ini ditandai oleh konsolidasi kekuasaan proletar melalui hilangnya kaum borjuis secara perlahan-lahan, dan masuknya mereka menjadi bagian dari kelas proletar. Pada tahap ini akan dipimpin oleh suatu kepemimpinan diktator proletar. Kemudian apabila masyarakat komunis tanpa kelas telah terbentuk, maka negara dan kepemimpinan diktator akan hilang dengan sendirinya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Lenin,<sup>4</sup> seorang pengikut Marxisme dari Rusia, menginterpretasikan Marxisme tersebut. Interpretasi Lenin terhadap Marxisme diantaranya yang terpenting adalah pertama, proses sejarah dapat dipercepat. Maksudnya adalah terbentuknya masyarakat komunis yang tanpa kelas dapat dipercepat. Hal ini berbeda dengan pandangan Marx, yang menurutnya terbentuknya masyarakat komunis bisa diibaratkan dengan jatuhnya buah yang matang dari pohon. Kalau buah sudah matang barulah bisa jatuh. Artinya revolusi akan meletus di suatu negara yang kapitalismenya telah maju/krisis atau revolusi pasti akan datang dengan sendirinya. Pokok ajaran Marx tentang revolusi adalah revolusi tidak harus dimulai dengan revolusi komunis melainkan dengan kemenangan komunis.

Tetapi Lenin berkeyakinan bahwa, *pertama* buah itu dapat dan harus direbut. *Kedua*, alat yang dapat mempercepat sejarah adalah Partai Komunis yang mewakili proletar, meskipun diantara anggotanya terdapat orang-orang yang bukan proletar. Partai Komunis disebutnya sebagai *Vanguard* atau pelopor kelas proletar. Oleh karena itu Partai Komunis harus terdiri dari segolongan kecil orang yang revolusioner dan sangat berdisiplin. Dalam hal ini Lenin mengatakan bahwa kualitas adalah jauh lebih penting daripada kuantitas. *Ketiga*, dalam suatu negara agraris kelas proletar harus bersekutu dengan kelas petani. Interpretasi Lenin terhadap Marxisme itu dikenal dengan Leninisme. Perpaduan antara Marxisme dan

---

4. Nama asli Lenin ialah Vladimir Ilych Ulyanov. Ia dilahirkan di Simbirsk, Rusia, pada tahun 1790 dari keluarga kelas menengah. Ia meninggal tahun 1824 di Moskow

Leninisme inilah yang dikenal sebagai Komunisme sekarang ini. Komunisme seperti yang dikenal sekarang ini bisa diartikan dalam beberapa konteks. Dalam konteks ekonomi, komunisme diandaikan sebagai suatu masyarakat yang diorganisasikan berdasarkan prinsip prinsip hak milik umum atas semua alat-alat produksi, penghapusan total, atau paling tidak pembatasan hak-hak milik yang bersifat perorangan atau pribadi, dan persamaan dalam hal distribusi barang dan jasa untuk keperluan hidup. Komunisme dalam hal ini secara teoritis bisa diwujudkan dalam pemerintahan demokratis maupun diktatorial. Dalam konteks politik, komunisme dalam banyak hal diidentikkan dengan model pemerintahan satu partai yang memerintah dengan cara-cara diktator.<sup>5</sup>

## **2. Perkembangan Organisasi Komunis Internasional hingga munculnya komintern tahun 1919**

Pihak komunis sesuai dengan cita-citanya untuk mengkomunikasikan umat manusia telah berusaha membentuk organisasi internasional yang bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan komunis yang diperkirakan akan tumbuh di setiap negara di dunia ini. Dalam rangka mengkomunikasikan seluruh umat manusia inilah maka didirikanlah *Internationale*<sup>6</sup> yang dalam perkembangannya dikenal sebagai *komintern* seperti yang kita kenal sekarang ini, yang akan kita bahas berikut ini.

### **A. Internationale I di London pada tahun 1864.**

Untuk membeda-bedakan dengan gerakan-gerakan sosialisme lainnya, Karl Marx mengatakan bahwa ajarannya merupakan sosialisme ilmiah. Karena semakin banyaknya gerakan-gerakan

---

5. *Ibid*, hal. 10-15

6. Internationale I adalah pertemuan pertama bagi organisasi-organisasi kaum Marxis yang saat itu mulai bersemita di berbagai negara. Pada waktu itu gans perjuangannya untuk membebaskan kaum proletar dari kaum borjuis dan kaum feodal serta meningkatkan martabat dan kedudukan yang dipandang telah diabaikan sewenang-wenang oleh golongan kapitalis, lihat Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Komunisme dan kegiatannya di Indonesia*, Jakarta, tahun 1985, hal. 4-5

sosialisme Eropa, maka diadakan Kongres Internasional I tahun 1864 (nama sebenarnya Workingsman Association). Sumber ilham dari pada dibentuknya Internationale I ialah hasil pemikiran Marx dan Engels yang diwujudkan dalam bentuk Manifesto Komunis yang antara lain berbunyi:

“Kaum komunis tak perlu menyembunyikan pendapat dan maksudnya, dengan terus terang mereka mengumumkan bahwa tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan merobohkan seluruh susunan masyarakat ini dengan kekerasan. Hendaknya golongan yang berkuasa gemetar di hadapan revolusi komunis. Kaum buruh (yang miskin) tak akan kehilangan apa-apa kecuali belenggu mereka *Proletarier aller lander, verenigt euch! Buruh sedunia bersatulah!*”<sup>7</sup>

Namun setelah Internationale I tahun 1864 ternyata masih terdapat aliran-aliran sosialisme antara lain yang terbesar adalah :Mark, Praudhan (Francis), Baquin, Bukanen (Italia) dan Trade Union (Inggris).

Perbedaan aliran-aliran tersebut pada umumnya berkisar mengenai cara bertindak dalam mencapai tujuan :

- 1) Ada yang dengan cara Diktator Proletariat
- 2) Ada yang dengan cara Non Diktator Proletariat menguasai pemerintahan secara damai (perjuangan parlementer).

Adanya perbedaan-perbedaan dalam mencapai tujuan diantara-aliran-aliran sosialisme tersebut, maka pada kongres tahun 1876 di Philadelpia Internationale I dibubarkan.<sup>8</sup>

## **B. Internationale II tahun 1887.<sup>9</sup>**

Organisasi komunis Internasional II di Paris tahun 1887 dengan nama Sosial Demokrat. Pada waktu itu pada umumnya mereka mengikuti ajaran Marx. Internationale II ini bersifat tidak terpusat.

---

7. O.,Hashem, *Marxisme dan Agama*, Japi, Surabaya, 1963 hal. 9

8. Said Sissahadi, *Tindakan Hukum Terhadap Pemberontakan PKI tahun 1948 dan G. 30 S/PKI tahun 1965*, Thesis, Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 1965 hal. 32

9. Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism a History*, Frederik &Pruger, New York 1953, hal. 7

Dengan kata lain ada kerja sama Internasional, tetapi tidak ada suatu pimpinan pusat yang mendekte. Dengan diselenggarakan Kongres Internasional II timbul aliran Berntein. Menurut aliran Berntein untuk memperbaiki nasib buruh atau berubah keadaan tidak perlu dengan pertentangan kelas 100%, karena nyatanya keadaan buruh akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 berlainan. Ajaran Berntein lebih mendekati realitas dan tidak dokmatis terhadap ajaran Marx. Pada tahun 1912 diadakan kongres di Bazel untuk mencegah Perang Dunia I. Kalau perang tidak dapat dihindarkan lagi, maka supaya diadakan perlawanan dengan cara merombak susunan masyarakat di negeri masing-masing. Pendek kata jika terjadi perang, maka kaum Sosialis Demokrat harus mengadakan pemberontakan, mengadakan revolusi di negara masing-masing agar kemenangan dapat dicapai oleh kaum komunis. Pada waktu Perang Dunia I meletus kaum buruh yang dipimpin oleh kaum Sosialis Demokrat ternyata tidak mengadakan pemberontakan melainkan membela negaranya masing-masing, karena pertimbangan kepentingan nasionalnya. Pemberontakan hanya terjadi di Rusia dan beberapa tempat di Jerman. Yang menonjol di sini ialah bahwa dalam keadaan perang dengan negara lain “kepentingan hidup bangsa sendirilah yang diutamakan”.<sup>10</sup>

### **C. Internationale III/Komintern 1919**

Kegiatan komunis semakin menguat sejak awal abad 19, terutama di Eropa. Keadaan masyarakat Eropa menurut Charles Dickens sangat menyedihkan. Kaum wanita bekerja keras menarik tambang-tambang kapal sepanjang pinggiran kapal. Perempuan dan anak-anak menarik pedati yang penuh beban di pertambangan batu bara. Banyak anak-anak di bawah umur harus bekerja dua belas sampai lima belas jam sehari. Keadaan sosial dan kehidupan perekonomian yang semacam ini bagaimanapun

---

10. Said Sissahadi, *Op.Cit*, hal. 33

juga telah memberikan peluang bagi pertumbuhan ajaran Marxisme ketika itu.

Pada tahun 1917 Revolusi Oktober meletus di Rusia, dalam revolusi itu kaum Bolswijk<sup>11</sup> telah berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar dianggap sebagai kemenangan besar kaum Marxis Leninis di seluruh dunia. Dengan berhasilnya perebutan kekuasaan di Rusia itu kaum komunis bertambah yakin akan seluruh teori Marx mengenai kemasyarakatan. Kemudian tidak mengherankan kalau gerakan komunis di seluruh dunia telah memilih Moskow sebagai pusat kegiatannya. Karena itu didirikanlah Internationale III atau sering disebut Komintern pada tahun 1919 yang berkedudukan di Moskow.

Timbulnya Kongres Internationale III karena adanya perpecahan dalam kalangan Sosial Demokrat yang tidak mentaati Kongres Bazel untuk mencegah Perang Dunia I. Menurut Internationale III masyarakat sosial tak mungkin terwujud dengan jalan parlementer melainkan dengan jalan perebutan kekuasaan dengan sistem Diktator Proletariat.

Menjelang meletusnya Perang Dunia II Rusia merupakan pimpinan tertinggi kegiatan komunis internasional yang langsung menentukan setiap usaha perjuangan kaum Marxis di berbagai negara. Meskipun gerakan Marxis itu telah diorganisir dalam bentuk Internationale III atau Komintern, namun di banyak negara gerakan komunis masih bersifat gerakan di bawah tanah. Komintern ketika itu lebih banyak memberikan petunjuknya dalam usaha penyerbuan komunisme secara ilegal. Taktik dan strategi komunis yang sedemikian itu pada dasarnya merupakan salah satu cara karena pihak komunis belum mendapat simpati yang meyakinkan dari rakyat suatu negara.

---

11. Bolswijk adalah kekuatan masyarakat dalam partai Buruh Sosial Demokrat Rusia yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Rusia pada awal tahun 1918, setelah dibentuk Uni Soviet pada tahun 1922, namanya diganti menjadi Partai Komunis Uni Soviet, lihat Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran tahun 1994, Op.Cit, hal. 10

Karena itu cukup difahami kalau Komintern secara kamuflase tidak segan-segan telah memberikannya kepada setiap gerakan revolusi yang meletus di berbagai negara, walaupun sebenarnya gerakan revolusi itu tidak ada sangkut pautnya dengan garis perjuangan komunis. Antara tahun 1918 dan 1927 timbullah gerakan revolusi di Firlandia, Austria, Jerman, Hongaria, Korea, Turki, Bulgaria, Marokko dan Syria. Perjuangan tersebut telah didukung sepenuhnya oleh Komintern dalam rangka mencari simpati rakyat yang baru mengadakan revolusi.

Di lain pihak organisasi Komintern langsung telah memberikan bantuannya terhadap gerakan kebangsaan yang tumbuh di berbagai negara yang masih berstatus negeri jajahan. Sebelum meletusnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa tertentu banyak memiliki jajahannya di Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Selain itu di wilayah belahan benua itu sendiri ada pula negara-negara tertentu yang secara khusus menguasai negara tetangganya. Suburnya dunia koloni pada waktu itu sedikit banyak telah memberikan angin baik bagi pertumbuhan dan perkembangan komunisme.

Jadi tidak mengherankan kalau kegiatan Komintern menjelang Perang Dunia II terutama diarahkan ke negara-negara yang masih terjajah. Dengan berbagai macam cara telah memasukkan pengaruhnya ke daerah-daerah jajahan dan negara-negara yang mulai menganut demokrasi liberal. Keuntungan bagi komunis di kedua daerah tersebut ialah di negara-negara terjajah ideologi ini dapat dijadikan alat pembakar semangat rakyat-rakyat yang sedang berusaha merebut kemerdekaannya. Sedang di negara-negara yang sudah menganut liberalisme, faham ini dapat saja hidup meskipun tidak begitu banyak pengikutnya.

Agen-agen Komintern dengan membawa ajaran Marxisme Leninisme dengan segala tata cara perjuangannya telah memasuki wilayah Asia Tenggara antara lain Burma, Indo China, Malaya, Indonesia, dan Filipina. Sementara itu gembong-gembong komunis

internasional telah pula memasuki wilayah Tiongkok, India, negara-negara Arab dan Afrika. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara legal ataupun ilegal.<sup>12</sup>

### **3. Aliran-aliran Komunisme**

Sesudah Kongres Komintern I pada tahun 1864, Komunisme/Marxisme terbagi menjadi empat golongan atau versi yang merupakan perkembangan sekte-sekte dalam komunisme yakni :

#### **a. Komunisme Versi Moskow**

Komunisme versi Moskow menitikberatkan pada kepentingan komintern sesuai hasil Kongres Internasional III tahun 1919. Kepentingan internasional harus di atas kepentingan nasional.

Moskow tetap ingin mempertahankan kepemimpinannya dalam dunia Komunisme/Marxisme, karena menganggap dirinya adalah sebagai sumber dan pendidik Komunisme/Marxisme. Oleh karenanya menganggap RRC, Jugoslavia dan Cuba melakukan penyelewengan dan membahayakan atas kepemimpinannya dalam dunia Komunisme/Marxisme. Negara-negara Eropa Timur yang menyatakan dirinya tunduk pada Imperium Moskow antara lain Polandia, Hongaria, Cekoslovakia dan Bulgaria.

#### **b. Komunisme Versi Jugoslavia**

Komunisme/Marxisme versi Jugoslavia, di bawah pimpinan Tito tidak mengikuti garis politik Soviet dan ke luar dari Komintern. Jugoslavia dalam sistem sosialnya mengikuti negara Soviet, tetapi secara politik menyatakan dirinya netral. Oleh karenanya ajaran Tito menamakan suatu bentuk Komunisme- Marxisme- Leninisme yang menempatkan kepentingan nasional (terutama ekonomi dan politik) di atas kepentingan internasional, yaitu gerakan komunis yang dipimpin dan tunduk pada Soviet. Ke dalam, Jugoslavia diatur

---

12. Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (th. 1985), Op.Cit, hal. 4-9

atas dasar Komunisme/Marxisme- Leninisme, sedangkan keluar ditempuh jalan Non Blok, ajaran-ajarannya disebut Komunisme/Marxisme- Leninisme-Titoisme.

### **c. Komunisme Versi Cuba**

Komunisme/Marxisme versi Cuba, di bawah pimpinan Fidel Castro atas dasar pengalaman-pengalamannya yang pahit atas tindakan/janji-janji Soviet dan RRC, maka tidak mengikuti garis politik Soviet dan keluar dari Komintern. Komunisme Cuba dalam sistem sosialnya diatur berdasarkan pola-pola Komunisme/ Marxisme- Leninisme di Amerika Latin. Cuba berusaha untuk memegang kepemimpinan dalam dunia komunisme di Amerika Latin (Regional). Ajaran-ajarannya dinamakan Komunisme Leninisme- Fidel Castrisme.

### **d. Marxisme/Komunisme Versi RRC**

Pola perkembangan gerakan Komunis di RRC berdasarkan atas-ajaran/strategi/taktik Mao Ze Dong yang dikembangkan berdasarkan kondisi khas RRC. Sejak berdirinya RRC pada tahun 1949 Cina diperintah atas dasar konsep Komunisme/Marxisme Leninisme. Demokrasi rakyat pada hakikatnya adalah Diktatorisme Proletariat. Demokrasi rakyat pada hakikatnya adalah diktator rakyat yang didasarkan pada kekuatan empat unsur yaitu: Tani, Buruh, Borjuis Cilik dan Borjuis Nasional di bawah pimpinan Partai Komunis. Ciri khas dari pada strategi dan taktis gerakan Komunis Cina adalah bersumber pada gerakan kaum buruh seperti Rusia. Gerakan Komunis RRC tidak saja dilakukan di dalam negerinya, tetapi juga dilancarkan ekspansi di luar negeri dari Asia sampai Afrika. Campur tangan RRC di dalam segala konflik di negara negara terutama Asia didasarkan atas pola Komunisme/Marxisme Leninisme-Stalinisme yang tidak mengenal jalan damai dengan berbagai macam Sekte dalam tubuh komunis. RRC berusaha untuk menggantikan kedudukan kepemimpinan Soviet dalam dunia Komunisme, terutama di Asia karena Soviet dianggap mengkhianati

ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme-Stalinisme dan disebut kaum Revisionist.

Negara-negara yang sejalan dengan ajaran Mao Ze Dong yaitu-harus melaksanakan ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme secara tegas dan tidak mengenal damai dengan Sekte-sekte Komunis adalah negara negara antara lain Rumania dan Albania. Harus dicatat, musuh revolusi Tiongkok banyak sekali dan kuat. Pada Mei 1927, Stalin mengatakan bahwa musuh revolusi Tiongkok terlalu banyak antara lain Cang Suo Lin, Ciang Kai Sek, borjuasi besar, kaum ningrat desa, tuan tanah, dan lain-lain. Sementara di luar ada kaum imperialis.

Dalam analisis Mao, selain ada kaum imperialis yang kuat juga ada kekuatan feodal yang besar, bahkan ada borjuasi besar yang bersekutu dengan kaum imperialis dan kekuatan feodal yang memusuhi rakyat. Dari situasi yang demikian, maka ia mengajukan serentetan masalah :

“Menghadapi musuh macam ini, sudah pasti cara dan bentuk revolusi yang utama tidak mungkin lewat jalan damai, melainkan bersenjata. Itu disebabkan karena musuh kita tidak memberi kemungkinan kepada rakyat untuk berkompromi secara damai, dan rakyat tidak punya hak dan kemerdekaan apapun dalam politik. Menurut Stalin, revolusi bersenjata melawan kontrarevolusi bersenjata merupakan salah satu dari revolusi Tiongkok, dan sekaligus keunggulannya. Rumusannya begitu. Oleh sebab itu, pandangan yang meremehkan perjuangan bersenjata, meremehkan perang revolusioner, meremehkan perang gerilya, dan meremehkan pekerjaan militer, itu semua tidak benar”.<sup>13</sup>

Menghadapi musuh macam ini, akan muncul masalah tentang-daerah basis revolusioner. Di satu pihak kaum imperialis yang kuat dengan sekutunya yang reaksioner di Tiongkok, menguasai kota-kota penting dalam waktu yang lama. Sementara di pihak lain barisan revolusioner tidak ingin berkompromi dengan kaum imperialis beserta kroni-kroninya, malah sebaliknya hendak mempertahankan perjuangannya.

---

13. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Sahli Bidang Sospol, “Meng a Kita Menentang Komunisme, Tinjauan dengan Orientasi Pancasila,” Manuskrip, Jakarta, tahun 1997, hal. 195-196.

## e. Komunisme Versi Totaliter Demokrasi Model Marxisme

Ajaran Karl Marx tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan oleh rekan-rekannya yang sefaham, antara lain Friedrich Engels (1820- 1890), dan selanjutnya oleh Lenin, Stalin, Khrushchev dan lain lain yang kemudian dikenal dengan nama *Marxisme-Leninisme* dan ada juga yang menyebut dengan nama Sosialisme Kiri, atau Demokrasi Komunis, sehingga negara-negara yang menganut sistem politik tersebut dinamakan negara-negara Komunis.

Adanya kata demokrasi dalam menyebut tipe sistem politik tersebut, merupakan kontradiksi in terminis, hal ini berarti suatu nama yang berlawanan dengan makna sesungguhnya. Meskipun kebanyakan orang mengecap bahwa paham Marxisme atau Komunisme itu adalah sistem politik yang bersifat otoriter atau diktator, namun ada di antara negara-negara pendukungnya yang tegas-tegas mencantumkan kata demokrasi pada nama negaranya, misalnya Negara Jerman Timur dengan nama "*Deutsche Demokratische Republik*" yang berarti Republik Demokrasi Jerman, demikian pula negara tersebut pada waktu rezim Pol Pot berkuasa di Kamboja, Negara tersebut dinamakan Kampuchea Demokrasi. Padahal waktu itu, opini dunia menyatakan bahwa keadaan yang sebenarnya di negara Kamboja waktu rezim Pol Pot tersebut adalah jauh berlawanan dengan keadaan masyarakat yang demokratis.

Di dalam masyarakat negara yang menganut paham Demokrasi Totaliter atau Demokrasi Sentralistik, ada beberapa hal yang merupakan faktor dalam penyelenggaraan sistem politik yang bersifat totaliter diktator tersebut. Adapun beberapa hal yang dimaksudkan itu adalah seperti di bawah ini :

### 1) Menganut Asas Kedaulatan Negara

Agar dapat dilaksanakan kehidupan politik yang bersifat totaliter, otoriter dan diktator, maka diperlukan adanya doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sistem politik tersebut adalah pada negara.

## 2) Marxisme dijadikan Ideologi Negara

Ajaran Karl Marx menjadi dasar negara bagi negara-negara komunis, meskipun terjadi juga penafsiran-penafsiran yang berbeda sehingga ada kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan golongan pendukungnya dinamakan "revisionis", sedangkan alirannya disebut revisionisme.

## 3) Atheis

Telah diketahui secara luas bahwa terdapat berbagai ajaran Marxisme yang secara terang-terangan tidak mengakui adanya Tuhan, menolak adanya Tuhan, anti Tuhan bahkan ingin membersihkan agama.

Feurbach, Engels dan Lenin menyatakan :

Hakikat Tuhan tidak lain adalah hakikat manusia. Atau lebih tepat hakikat manusia yang dipisahkan dari batas-batas manusia individual, menjadi nyata, jasmaniah. Diobyektifkan, artinya dipandang dan dipuja sebagai makhluk lain yang berbeda darinya. Oleh karena itu semua ciri hakikat Tuhan adalah ciri hakikat manusia itu sendiri.<sup>14</sup>

Ajaran Komunisme termasuk La Diniyah (Atheisme), sehingga Atheisme membahayakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia dalam ber-Tuhan dan beragama diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 (salah satu sila Pancasila). Dengan alasan Atheis ini saja negara Republik Indonesia cukup dasar hukumnya tidak membolehkan atau tegasnya melarang faham Komunisme dengan berbagai variasinya berkembang di negara Indonesia. Oleh karena itu, PKI merupakan organisasi politik yang atheisme yang perlu dilarang di tanah air kita.

Karena agama menurut ideologi Komunis dianggap sebagai candu terhadap masyarakat yang dapat menghambat perkembangan masyarakat, maka eksistensi agama tidak diakui dan dijamin secara konstitusional, sehingga bagi warga masyarakatnya tidak mempunyai

---

14. *Ibid*, hal. 198-200

kebebasan untuk memilih serta memeluk sesuatu agama yang diyakini. Demikian pula bagi para pemeluk agama juga tidak mempunyai hak kebebasan untuk melakukan dakwah (menyebarkan) ajaran agama tertentu. Dalam keadaan ekstrimnya para pemeluk agama dan para penyiar agama dianggap merupakan musuh oleh penguasa negara yang menganut sistem politik komunisme yang bersifat Atheistis itu. Oleh karena itu negara yang menganut paham Demokrasi Totaliter cirinya adalah:

- 1) Tidak adanya kebebasan berserikat dan berkumpul.
- 2) Kurang adanya kebebasan mengeluarkan pendapat.
- 3) Media massa dikuasai oleh negara.
- 4) Kepentingan individu dinomorduakan.
- 5) Hak dan hukum yang bersifat pribadi kurang mendapatkan pengakuan.
- 6) Campur tangan negara di semua aspek kehidupan masyarakat.
- 7) Melaksanakan prinsip keseragaman pola berpikir dan bertindak.
- 8) Penggunaan kekerasan dianggap cara yang sah.

Baik untuk mencapai masyarakat yang komunistik maupun untuk menyebarkan ajaran komunisme, diperbolehkan juga dengan menggunakan cara kekerasan, meskipun inkonstitusional namun menurut pandangan golongan komunis adalah sah. Misalnya dengan jalan mengadakan coup d'etat.

Ajaran Komunisme mencakup tiga bidang :Ideologi, Partai dan Gerakan Revolusioner sedunia. Ideologi : yang atheis, doktriner, internasional dan agresif sebagai organisasi perjuangan, dengan segala aktivitas-aktivitasnya baik legal maupun ilegal untuk mempertahankan dan meluaskan kekuasaan. Jadi dilihat dari segi motivasi, ajaran tersebut merupakan konsep dasar untuk mengubah ketatanegaraan, pemerintahan dan masyarakat menurut model Marx.

Gerakan Internasional bermotivasi bahwa perjuangan Komunisme harus terpusat dalam rangka saling, mendukung

perjuangan Komunisme di negara lain. Sedangkan partai, harus digembleng untuk menumbuhkan motivasi, semangat konspiratif, keanggotaan selektif, berdisiplin, berbentuk semi militer, perjuangan legal dan ilegal, dilengkapi taktik yang revolusioner dan strategi politik. Partai juga berfungsi sebagai suatu organisasi untuk merebut, mempertahankan dan meluaskan kekuasaan. Sikap yang demikian itu yang ditransformasikan kepada semua negara-negara Komunis di seluruh dunia termasuk ke Indonesia.

#### **4 Lahirnya Partai Komunis Indonesia/PKI dan awal perkembangannya**

Ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913, diperkenalkan oleh Hendricus Josephus Franciscus Maria Sneevliet. Ia adalah bekas Ketua Sekretariat Buruh Nasional dan bekas pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di negeri Belanda. Mula-mula ia bekerja di Surabaya sebagai staf redaksi warta perdagangan Soerabajasche Handelsblad milik sindikat perusahaan-perusahaan gula Jawa Timur. Tidak lama kemudian ia pindah ke Semarang bekerja sebagai sekretaris pada sebuah maskapai dagang.<sup>15</sup>

Kota Semarang pada saat itu menjadi pusat organisasi buruh kereta api Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP/ Serikat Personil Kereta Api dan Trem), yang telah berdiri sejak tahun 1908. Pada tahun 1914 VSTP memerlukan propagandis-propagandis untuk menyebarkan paham yang dianut oleh organisasi buruh itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sneevliet. Ia diangkat sebagai propagandis bayaran.<sup>16</sup> Lewat jalan ini Sneevliet berkenalan dengan massa buruh, dan menyebarkan ideologi pertentangan kelas.

---

15. J. TH. Petrus Blumberger, *De Communistische Beweging in Nederlandsch Indie*, Haarlem 1935, hal. 2.

16. Mona Lohanda, "Vereeniging van Spoor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie", *Skripsi Sarjana Sejarah*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1975, hal. 43

Pada bulan Juli 1914 itu Sneevliet bersama dengan P. Bergsma, J.A. Brandstedder, H.W. Dekker (Sekretaris VSTP), mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal, Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) atau Serikat Sosial Demokrat India. ISDV menerbitkan surat kabar Het Vrije Woord (Suara Kebebasan). Terbitan pertama surat kabar ini tercatat tanggal 10 Oktober 1915. Melalui surat kabar ini Sneevliet dan kawan-kawannya melakukan propaganda untuk menyebarkan marxisme.

Oleh karena anggota ISDV terbatas dari kalangan orang-orang Belanda, maka organisasi ini belum dapat menjamah dan mempengaruhi organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo, dan Sarekat Islam (SI). Usaha ISDV untuk mendekati rakyat juga gagal, karena ISDV tidak didukung oleh rakyat. Dengan menggunakan organisasi buruh di Semarang, ISDV mendekati Sarekat Islam yang dipimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto. SI adalah organisasi politik yang berdasarkan nasional-Islam, yang berwatak anti kolonialisme dan kapitalisme asing. Watak dan aktivitas Sarekat Islam ini rupanya diamati secara cermat oleh Sneevliet, dan kawan-kawannya. Mereka bermaksud mengeksploitasi sentimen anti kolonialisme dan kapitalisme asing dari para pengikut SI.

Sesudah terjadinya revolusi di Rusia pada tahun 1917, watak gerakan ISDV semakin radikal dan tegas-tegas menjadi komunis. Pemimpin-pemimpin ISDV mendekati dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin Sarekat Islam Semarang yang juga menjadi anggota VSTP dengan ide-ide revolusioner model Rusia. Di samping itu pimpinan ISDV mengadakan propaganda di lingkungan Angkatan Perang. Sneevliet mempengaruhi serdadu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Brandstedder mendekati serdadu Angkatan Laut, pegawai negeri didekati oleh Baars dan van Burink. Sneevliet melakukan berbagai aktivitas, ceramah-ceramah, kursus-kursus politik. Atas hasutannya berhasil dibentuk Raad van Matrozen en Mariniers (Dewan Kelas dan Marinir), suatu organisasi di lingkungan anggota militer yang berhaluan radikal-revolusioner.

Aktivitas Sneevliet ini dibantu sepenuhnya oleh Brandstedder yang menjadi kepala dari *Soerabajasche Marine Gebouw* (Balai Angkatan Laut Surabaya) dan redaktur koran *Soldaten en Matrozenkrant* (koran Serdadu dan Kelasi). Rata-rata isi koran ini adalah ide-ide komunisme yang revolusioner dan ide-ide perjuangan kelas.

Berbagai pamflet juga diterbitkan dengan tujuan untuk melemahkan kepercayaan bawahan kepada atasannya dalam tubuh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pemerintah Hindia Belanda bertindak tegas. Pada bulan Desember 1918 Sneevliet diusir dari Hindia Belanda karena aktivitasnya dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Menyusul kemudian Brandstedder pada bulan September 1919.<sup>17</sup>

Sekalipun Sneevliet dan Brandstedder telah meninggalkan Hindia Belanda (Indonesia) namun mereka berhasil menanamkan pengaruhnya di lingkungan Angkatan Laut Surabaya, setidaknya telah terbentuk organisasi yang berhaluan komunis. Di lingkungan Sarekat Islam, ISDV berhasil mempengaruhi pimpinan SI Semarang, Semaun dan Darsono yang juga adalah anggota VSTP. Setelah berhasil memperoleh pancangan kaki, pada tanggal 23 Mei 1920, di gedung Sarekat Islam Semarang, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis di Indie (PKI). Semaun dipilih sebagai ketuanya dan Darsono sebagai wakil. Beberapa tokoh ISDV yang orang Belanda diangkat sebagai pendamping, antara lain Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara dan A. Baars sebagai anggota. Organ (media massa) Partai Komunis Indonesia ditetapkan Socara Ra'jat. Sekalipun Semaun dan Darsono telah menjadi pemimpin PKI, namun mereka tetap menjadi Ketua Sarekat Islam Semarang, yang juga memimpin organ (media massa) SI, Sinar Hindia. Aktivitas SI Semarang dan PKI berjalan berdampingan. SI Semarang mendirikan sekolah-sekolah SI, namun kepada murid-muridnya diajarkan lagu Internasionale, lagu komunis.

---

17. J. TH, Petrus Blumgerger, op cit, hal. 2, AK. Pringgodigdo, SH, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, 1986, hal. 24

Propaganda tentang komunisme diintensifkan dengan cara menumpang pada pertemuan-pertemuan SI. Aktivitas SI yang ditumpangi oleh PKI ini pada mulanya masih diperbolehkan oleh Central Sarekat Islam (CSI) karena menurut Anggaran Dasar CSI, seseorang anggota SI diperbolehkan menjadi anggota organisasi lain. Dengan kata lain, SI tidak melarang adanya keanggotaan rangkap. Adanya sistem keanggotaan rangkap ini dimanfaatkan sebaik baiknya oleh PKI, untuk memecah belah SI dari dalam. Memecah belah organisasi dari dalam organisasi itu sendiri dalam dunia Komunis disebut taktik aksi di dalam atau blok di dalam (block within). Blok di dalam dilaksanakan dengan cara menginfiltasikan kader atau anggota komunis untuk menjadi salah satu anggota organisasi yang menjadi sasarannya. Selanjutnya mereka berusaha mempengaruhi atau memecah belah organisasi itu. Taktik “blok di dalam” (block within) pertama kali dipraktikkan oleh PKI terhadap Sarekat Islam, yang pada saat itu merupakan organisasi pergerakan nasional yang besar dan kuat.

Sementara itu persaingan antara SI dan PKI yang dibentuk pada-1920 semakin bertambah sengit, khususnya berebut pengaruh di kalangan organisasi buruh. Pada bulan Desember 1919 atas inisiatif tokoh-tokoh Sarekat Islam dibentuk federasi organisasi buruh yang bernama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) yang diketuai oleh Semaun pemimpin SI Semarang dan ketua VSTP, Suryopranoto sebagai wakil ketua dan Agus Salim sebagai sekretaris. PPKB merupakan suatu federasi dari 22 organisasi buruh dengan 27.000 anggota. Aktivitas organisasi ini terutama memperjuangkan kepentingan kaum buruh dengan melakukan pelbagai pemogokan karena peraturan perburuhan kolonial yang buruk. Dalam Kongres II (Juni 1921) Sarekat-Sarekat Sekerja PPKB di Yogyakarta terjadi perpecahan. Semaun dan Bergsma bersama 14 Sarekat Sekerja memisahkan diri dan membentuk Revolutionnair-Socialistische Vakcentrale, yang dipelopori oleh VSTP pada bulan Juni 1921. Dalam persaingan ini Suryopranoto dan Agus Salim berhasil menyelamatkan sebagian organisasi buruh dari pengaruh komunis.

Sejak perpecahan itu corak gerakan buruh komunis semakin radikal. Pada bulan April - Mei 1923, VSTP melakukan pemogokan besar. Akibatnya pengawasan Pemerintahan Hindia Belanda terhadap gerakan kaum buruh diperketat. Pemimpin pemogokan ditangkapi, sehingga pemogokan tidak berhasil mencapai tuntutannya, yaitu perbaikan gaji dan jam kerja. Untuk menghindari pengawasan yang ketat dari pemerintah, organisasi-organisasi buruh komunis menerapkan sistem organisasi inti dan sel (*kern encel*), yang terdiri atas 5-10 orang. Organisasi ini bersifat tertutup dan bergerak laksana bola salju, makin lama makin membesar.

Sementara itu, para pengikut SI yang dengan terang-terangan telah menjadi PKI, mulai melancarkan kritik keras terhadap SI. Semaun Ketua PKI, yang juga Ketua SI cabang Semarang, dalam pidatonya di dalam kongres PKI bulan Desember 1920 menuduh SI membela kepentingan kapital pribumi, karena SI didirikan oleh para saudagar dan kaum industri, bukan oleh rakyat.<sup>18</sup>

Berbagai kritik tajam dilontarkan terhadap SI dimaksudkan untuk mengurangi simpati rakyat terhadap SI. Bahkan Ketua CSI Oemar Said Tjokroaminoto ditidulduh telah menggunakan dana SI untuk kepentingan pribadi. Setelah tuduhan itu tidak terbukti, mereka pura-pura minta maaf. Jawaban SI terhadap berbagai kritik tersebut disampaikan dalam kongres SI bulan Oktober 1921 di Surabaya. Dalam kongres itu diputuskan bahwa SI harus melaksanakan disiplin partai, SI memberlakukan larangan keanggotaan rangkap. Seseorang harus memilih, tetap menjadi anggota SI atau memilih organisasi lain, sebagai langkah pembersihan, anggota-anggota PKI dikeluarkan dari SI.

Keputusan kongres ini sudah barang tentu merupakan pukulan keras terhadap PKI. Semaun melakukan kampanye menentang keputusan itu dan mencoba bertahan sebagai anggota SI. Demikian pula H. Misbach menuduh, bahwa disiplin partai hanyalah memecah belah persatuan yang dilakukan oleh Tjokroaminoto.

---

18. AK. Prirtgogidgo, SH, Ibid, hal. 26 dan 35

Akibat diberlakukannya tindakan disiplin partai, jumlah anggota SI merosot secara drastis. Adalah sebuah pengalaman pahit bagi SI sebagai sebuah organisasi pergerakan yang besar namun bersikap “baik hati” memperkenankan anggotanya merangkap sebagai anggota organisasi lain, kemudian beraksi di dalam tubuhnya. Pada bulan Maret 1923 PKI mengadakan kongres kilat di Bandung dan Sukabumi. Dalam kongres ini Darsono menganjurkan untuk membentuk SI tandingan di setiap cabang SI, dengan maksud untuk menarik anggota SI yang bersimpati pada Komunis. SI tandingan diberi nama SI Merah, kemudian diubah menjadi Sarekat Rakyat, dengan status sebagai organisasi di bawah naungan PKI. Sistem organisasi PKI ditentukan dalam kongres tanggal 7-10 Juni 1924. Kongres ini merupakan propaganda besar-besaran komunisme. Di atas kursi pimpinan digantungkan potret-potret tokoh komunis, seperti Karl Marx, Lenin, Stalin, Sneeveliet, dan simbol palu arit. Pada pembukaan kongres, Aliarcham, Ketua Pengurus Besar, menyatakan bahwa aliran kebangsaan dari kaum terpelajar tidak akan dapat tumbuh karena aliran itu tidak berdiri atas dasar ekonomi. Demikian pula pergerakan kebangsaan yang berdasarkan keagamaan tidak akan dapat hidup karena pergerakan itu hanya menjunjung kepentingan kaum modal bangsa Indonesia. Selanjutnya Darsono menyatakan bahwa revolusi yang diinginkan akan timbul bagaikan buah yang masak. Kongres SI Merah tanggal 7-10 Juni 1924 ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

- a. Peraturan Partai, yang berisi antara lain program perjuangan politik, membentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan atas soviet-soviet (soviet desa, soviet pabrik, soviet distrik). Program perjuangan harus dijalankan dengan disiplin yang kuat dari anggota.
- b. Diumumkan perubahan nama partai yang semula Perserikatan Komunis di Indie menjadi Partai Komunis Indonesia.
- c. Memindahkan Markas Besar PKI dari Semarang ke Batavia (Jakarta).

- d. Memilih pimpinan baru : Alimin, Musso, Aliarcham, Sardjono,  
Winanta.  
Sekretaris : Budisutjitro  
Komisaris : Marsum  
Organisasi Wanita : Munasiyah.
- e. Membentuk cabang-cabang di Padang, Semarang, Makassar dan Surabaya.

Sementara itu aktivitas agitasi dan propaganda PKI semakin meningkat. Beberapa tokoh santri yang telah menjadi PKI dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda partai,<sup>19</sup> seperti Haji Misbach dari Solo, Haji Datuk Batuah dari Sumatera Barat dan Haji Adnan dari Tegal. Haji Misbach menerbitkan majalah Islam Bergerak, sedangkan Haji Datuk Batuah menerbitkan surat kabar *Djago! Djago* (artinya Bangun! Bangun!) dan *Pemandangan Islam*. Isi surat kabar-surat kabar komunis yang berbaju Islam ini pada umumnya mengungkapkan analogi antara Islam dan komunis dengan bahasa yang sederhana. Kutipan tulisan H. Moh. Siradj yang dimuat dalam Islam Bergerak tanggal 10 Februari 1923, disajikan di sini :

“Perkumpulan politik yang membela maksud kaum pekerja miskin itu sepenuhnya menyebutkan dirinya Partai Komunis. Agama kita Islam begitu juga harus membela kaum miskin dan memimpin keselamatan dunia akhirat. Dan sebab itu jika Partai Islam itu juga menjadi Partai Komunis itulah sudah selayaknya benar”.

Agitasi dan propaganda tidak semata-mata dilakukan dalam bentuk ceramah dan rapat-rapat terbuka, tetapi juga dalam diskusi diskusi yang diadakan secara teratur. Haji Batuah membentuk klub diskusi *International Debating Club*. Ia bahkan mendatangi pondok pondok pesantren untuk mempropagandakan kesejajaran ajaran Islam dengan komunisme.<sup>20</sup>

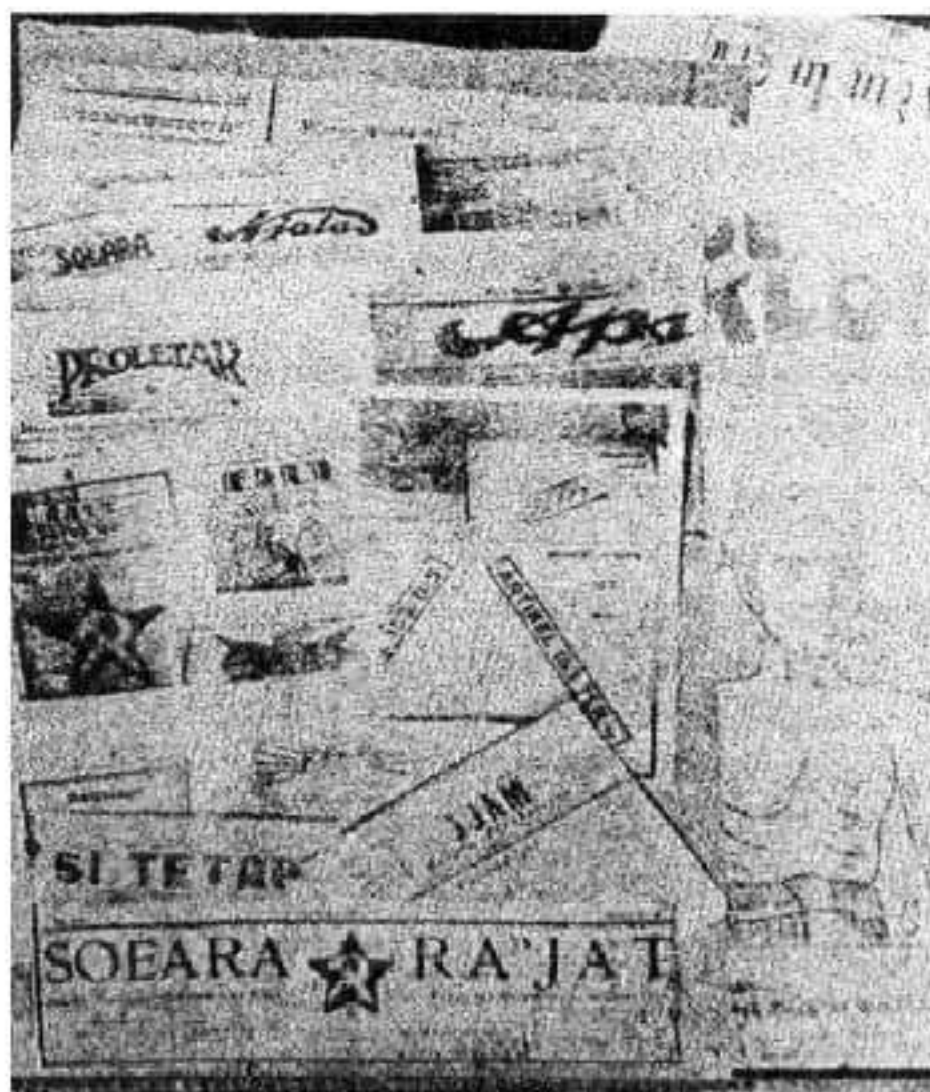
Selang tiga bulan sesudah Kongres Komintern IV, pada tanggal 27-28 September 1924 pimpinan PKI mengadakan pertemuan.

---

19. Anhar Gonggong, "Pemanfaatan Islam oleh Komunis", *Persepsi*, No. 1, 1979, hal. 64

20. *Ibid*, hal. 72

Mereka membahas berbagai kesulitan yang menimpa PKI. Di desa-desa lahir kelompok radikal. Mereka adalah anggota Sarekat Rakyat. Bahkan mereka melakukan aksi teror yang merugikan. Banyak kader PKI yang ditangkap akibat aksi teror yang tidak terarah. PKI juga mengakui kesulitan keuangan, akibat pengeluaran yang besar untuk membiayai propaganda, sedang pemasukan uang iuran sangat merosot. Pengawasan yang ketat oleh pemerintah menyulitkan aktivitas PKI. Situasi demikian mewarnai organisasi PKI pada 1924. Pada kesempatan ini Aliarcham tampil dengan kritik-kritiknya. Ia menginginkan aksi proletar murni sehingga dapat membantu mempersiapkan revolusi. Darsono minta waktu 3 bulan untuk membahas masalah tersebut.



*Beberapa surat kabar yang diterbitkan PKI*

Pada tanggal 11-17 Desember 1923 PKI mengadakan kongres di Kotagede (Yogyakarta). Kongres dipimpin oleh Alimin. Pimpinan PKI mengajukan suatu rencana untuk membubarkan Sarekat Rakyat, demi aksi proletar murni. Kepada kongres Aliarcham menyampaikan kritik sebagai berikut :

- a. Sarekat Rakyat (SR) sangat kecil nilai revolusionernya. Mereka masih berwatak borjuis kecil yang masih dihindangi oleh kepentingan ekonomis. Mereka sering mengambil jalan pintas dengan cara melakukan teror. PKI yang menerima akibatnya, yakni kader-kader PKI ditangkapi oleh pemerintah Hindia Belanda.
- b. Aktivitas SR bukanlah pekerjaan ilegal PKI.
- c. PKI harus sadar bahwa cara pengorganisasian massa, menyimpang dari doktrin komunisme. Semua partai komunis mengandalkan kekuatannya pada proletariat bukan pada petani.
- d. PKI harus mengubah cara kerja yang tidak benar dan memalukan itu yang pernah dilakukan sepanjang tahun 1923.
- e. Partai harus bekerja dengan unsur pilihan, yang tidak mengenal takut resiko. Membina disiplin secara rahasia dan membentuk watak pemberontak.
- f. Partai harus bekerja pada gerakan buruh. Mengkonsentrasikan mogok tidak untuk kepentingan ekonomi, tetapi untuk mempersiapkan revolusi yang dipimpin oleh proletariat.
- g. Massa petani bukan kekuatan revolusi. Alimin berkeberatan atas kritik tersebut dan menuduh Aliarcham tidak becus mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar Marxisme dan menggunakannya dalam kondisi Indonesia. Lawan-lawan Aliarcham minta kepada Semaun untuk melaporkan hasil-hasil Kongres Komintern IV. Kemudian Semaun

menganjurkan agar PKI kembali ke garis Komintern dimana partai komunis dibentuk dan diorganisasikan berdasarkan basis tempat kerja, tidak atas basis teritorial. Karena prinsip tempat kerja ini hanya bisa berjalan pada daerah industri, maka PKI harus bisa mengorganisasikan dengan cara lain.

Akhir dari perbedaan pendapat-pendapat dalam kongres ini adalah kompromi. Yang penting untuk dicatat dalam keputusan kongres ini adalah :

- a. Sarekat Rakyat (SR) tidak dibubarkan, tetapi harus dibina, tanpa menambah jumlah anggota dan diberikan kursus.
- b. Perlu adanya kelompok inteligensia revolusioner.
- c. Mempersiapkan pemberontakan, dengan mengkonsentrasikan pada pekerjaan untuk merangsang gairah revolusioner rakyat dan gairah untuk memperoleh kekuasaan.
- d. Membentuk grup 10 orang di bawah pengawasan anggota PKI yang berpengalaman.

Dalam waktu 4 tahun (Mei 1920-Desember 1924) PKI berhasil memperluas pengaruhnya melalui cara legal dan ilegal, seperti taktik aksi di dalam (block within) dan propaganda yang intensif. Propaganda-propaganda PKI yang bertema pertentangan kelas mendapat lahan yang subur pada masyarakat kolonial yang bercirikan diskriminasi (sosial, ekonomi, politik, warna kulit). Oleh karena itu, sekalipun Pemerintah Hindia Belanda telah melakukan upaya pengawasan secara ketat, namun tidak berhasil membendung aktivitas PKI.<sup>21</sup>

## **5. PKI sebagai Instrumen Komunis Internasional**

Komintern (komunis internasional) adalah organisasi tertinggi bagi partai komunis di beberapa negara, dibentuk pada awal tahun

---

21. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia* (G.30 S/PKI), Jakarta, 1995, hal. 9-18.

1919. Kongres pertama diselenggarakan pada bulan Maret 1919. Pada kongres ini tidak disinggung masalah-masalah kolonial, namun dihasilkan satu program perjuangan berskala internasional. Prinsip dasar dari Komintern adalah : perang rakyat, diktator proletariat, pemerintahan soviet dan aksi internasional. Program dilaksanakan dengan kekuatan dan agitasi secara legal dan ilegal di negara kolonial maupun setengah kolonial. Bagi Komintern dunia komunis menghadapi 2 front yaitu di negara Barat dengan perjuangan kelas yang bulat, sedang di negara-negara Timur dengan dasar pergerakan pembebasan nasional.<sup>22</sup> Dalam kongres ini Komintern menetapkan aturan dasar organisasi. Setiap partai komunis harus mencantumkan nama negara disusul dengan tulisan "Seksi Komunis Internasional" Contoh: Partai Komunis Indonesia, Seksi Komunis Internasional.

Organ tertinggi Komintern adalah kongres tahunan, yang wajib dihadiri oleh semua partai seksi dan organisasi afiliasi. Di bawah kongres adalah Komite Eksekutif yang biasa disebut Eksekutif Komite Komunis Internasional (EKKI). EKKI inilah yang mengendalikan Komintern dalam periode antar kongres. Komite Eksekutif bertugas memberikan petunjuk, perintah dan mengontrol aktivitas semua partai seksi dan organisasi afiliasi. Dalam Komite Eksekutif terdapat beberapa seksi fungsional: Seksi Informal, Seksi Statistik, Seksi Agitasi dan Propaganda, Seksi Organisasi, Seksi untuk masalah-masalah Timur. Di samping partai, sarekat-sarekat buruh komunis merupakan seksi istimewa dalam Komintern, dengan jumlah wakil yang diputuskan oleh Komite Eksekutif. Organisasi organisasi pemuda adalah anggota organisasi federasi pemuda internasional dan organisasi wanita berada di bawah pengawasan Komite Eksekutif.

Mengenai aksi-aksi ilegal, partai komunis diperkenankan melakukan aksi-aksi sekalipun melawan undang-undang. Komite Eksekutif wajib memberikan bantuan untuk persiapan pekerjaan ilegal dan mengontrol hasil atau pelaksanaannya.

---

22. J. th. Petrus Blumberger, *op cit*, hal. 10

Kongres II Komintern diadakan di Moskow pada tanggal 17 Juli-7 Agustus 1920. Kongres pertama telah membahas masalah organisasi dan menerima dasar-dasar Komintern. Kongres II ini lebih menekankan pentingnya makna propaganda. Perhatian besar ditujukan pada upaya merevolusionerkan rakyat di negara-negara Timur. Teori Marxisme harus dipelajari dengan sistematis Lenin. Partai Komunis harus mampu mengaitkan pekerjaan legal dengan pekerjaan ilegal. Pekerjaan organisasi adalah membentuk sel-sel komunis dengan berbagai bentuk dan cara. Orang komunis wajib mendukung gerakan revolusioner di negara-negara jajahan, tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan yang terencana.

Pada Kongres II ini terjadi kemajuan, karena masalah-masalah kolonial dibahas secara khusus dalam sebuah komisi yang diberi nama Komisi Masalah-masalah Nasional dan Kolonial. Komisi dipimpin oleh Lenin dan Sneevliet sebagai sekretaris. Dalam komisi ini Sneevliet mengucapkan pidato tentang pengalamannya di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda lahir pergerakan nasional bernama Sarekat Islam, sebuah organisasi massa yang berjuang melawan kapitalisme asing. Ia mengusulkan agar para kader komunis di negara jajahan mengadakan kerjasama dengan pergerakan nasional, karena gerakan nasionalis ini, sekalipun bersifat demokratis borjuis namun didukung oleh massa yang luas yang terdiri dari petani. Ia menganjurkan agar kaum komunis bergabung dengan petani. Oleh karena itu petani perlu diorganisasi secara revolusioner dalam soviet-soviet.<sup>23</sup> Kerjasama dengan kaum pergerakan nasional hanya bersifat sementara, dan orang-orang komunis bebas melakukan kegiatannya. Usul Sneevliet ini didukung oleh Lenin dan menjadi tesis Lenin. Tesis ini mendapat tantangan dari tokoh Partai Komunis India M.N. Roy. Menurut Roy golongan pergerakan nasional bisa menggunakan petani untuk melawan komunis. Kerjasama harus dibatasi dengan petani yang tidak bertanah saja. Akhirnya Komintern menyetujui usul Sneevliet. Kerjasama komunis dengan pergerakan nasional yang dianggap borjuis dijadikan

---

23. Soviet-soviet adalah merupakan Dewan-dewan.

thesis Lenin. Karena jasanya ini Sneevliet diangkat sebagai Kepala Biro Komintern di Cina, selama 1 tahun. Di Cina ia menerapkan tesisnya dengan melakukan taktik “aksi di dalam” (block whitin) terhadap Koumintang.

Kongres III Komintern dibuka pada tanggal 22 Juni - 12 Juli 1921 dihadiri oleh 98 utusan partai komunis. Partai Komunis Indonesia mengirim Darsono sebagai wakilnya. Dalam kongres ini antara lain dibahas suatu tesis tentang struktur, metode dan aksi partai-partai komunis. Tesis ini menyatakan bahwa semua partai komunis legal perlu mempersiapkan dan mengadakan gerakan rahasia sebagai senjata untuk perjuangan. Bagi setiap partai komunis ilegal terbuka kemungkinan bekerja secara legal untuk sesuatu tujuan, seperti berpartisipasi dalam dunia politik, organisasi atau melaksanakan massa revolusioner yang besar. Pekerjaan legal dan pekerjaan ilegal dilaksanakan dengan petunjuk dan bimbingan dari partai sentral.

Kongres IV Komintern berlangsung dari 5 November sampai 5 Desember 1922. Dalam kongres ini Tan Malaka menyatakan dukungan terhadap *Pan Islamisme*, karena gerakan itu pada hakekatnya adalah perjuangan melawan kapitalisme dan untuk kemerdekaan nasional. Tesis ini diterima oleh kongres.

Kongres V Komintern, Agustus 1924, mengeluarkan pernyataan: “bahwa tugas kongres adalah merumuskan secara konkrit aplikasi kebijaksanaan nasional Komintern di beberapa negara, khususnya di negara-negara Timur dan jajahan, di mana perjuangan kemerdekaan telah berkembang menjadi gerakan revolusioner. Pemecahan yang tepat dari masalah nasional akan membantu partai dalam mempengaruhi massa ke pihak kita”. Di samping itu kongres juga menekankan perlunya mengembangkan organisasi buruh dan membolsewikkan partai-partai komunis. Khusus mengenai masalah hubungan PKI-Sarekat Rakyat (SR) ditentang oleh Manuilsky yang merasa berkeberatan adanya

hubungan ini. Menurut pendapatnya, SR dengan watak dan semangat borjuis kecilnya bisa merupakan wabah bagi partai.<sup>24</sup>

## 6. Pemberontakan PKI 1926/1927

Sejak 1924, yaitu pada kongres PKI di Kotagede Yogyakarta, berlangsung alih kepemimpinan partai dari pasangan Alimin-Musso kepada Aliarcham dan Sardjono. Hal ini terjadi, karena pimpinan yang lebih senior tidak bersedia memimpin PKI. Berbagai aksi pemogokan yang dilancarkan atas komando partai mengalami kegagalan, sehingga pada tahun 1924 Pemerintah Hindia Belanda memperketat pengawasan dan mempersempit ruang gerak para tokoh partai serta aktivitasnya. Pada tahun 1925 Darsono diusir ke luar Indonesia, Aliarcham dibuang ke Digul, sedang Musso, Alimin dan Tan Malaka terpaksa menyingkir ke luar negeri. Sardjono bersama-sama dengan para pemimpin PKI yang masih bebas, seperti Budisutjitra, Sugono, Suprodjo, Marco dan lainnya pada tanggal 25 Desember 1925 mengadakan rapat di Prambanan untuk membahas situasi terakhir yang semakin mengancam keberadaan PKI. Rapat memutuskan mengadakan pemberontakan untuk menegakkan Negara Soviet Indonesia. Pemberontakan akan dimulai pada tanggal 18 Juni 1926.

Sekalipun Pemerintah Hindia Belanda tidak mencium rencana tersebut, pada bulan Januari 1926 pemerintah mencoba menangkap Musso, Budisutjitra dan Sugono. Namun sebelum ditangkap tokoh tokoh PKI itu berhasil melarikan diri ke Singapura. Di Singapura telah berkumpul beberapa tokoh PKI lain, yaitu Alimin, Subakat, Sanusi, dan Winanta. Alimin bersama tokoh-tokoh lain yang baru datang dari Indonesia, membicarakan keputusan Prambanan. Hasil pembicaraan itu tidak pernah dijelaskan. Mereka memutuskan mengutus Alimin menemui Tan Malaka di Manila. Pada bulan Pebruari 1926 Tan Malaka sudah menyampaikan pendapatnya secara konkrit menentang keputusan Prambanan yang akan dilaksanakan

---

24. Ruth T. Me. Vey, *The Rise of Indonesian Communism*, New York, 1965, hal. 67

pada 18 Juni 1926. Menurut Tan Malaka keputusan Prambanan adalah suatu keputusan yang sudah terlanjur, dan bertentangan dengan aturan Komintern.<sup>25</sup> Karena itu harus diganti dengan massa aksi yang terus menerus, pemogokan dan demonstrasi yang tak putus-putus. Tahap selanjutnya adalah merebut kekuasaan. Dalam merencanakan suatu pemberontakan, Tan Malaka memiliki konsep yang matang. Dalam brosurnya “Menudju Republik Indonesia” (*Naar Republik Indonesia*) yang ditulis pada 1924 ia memberikan berbagai petunjuk mengenai taktik dan strategi revolusi yang antara lain:

“Jika kita pelajari tempat mana yang sangat menguntungkan bagi kita untuk digempur, maka pilihan kita akan jatuh pada lembah Bengawan Solo. Memang di sini mempunyai harapan besar dapat merampas kekuasaan ekonomi dan politik dan bertahan daripada di Batavia dan di Priangan. Di lembah Bengawan Solo bertimbulan-timbulan buruh industri dan petani melarat yang akan mewujudkan tenaga-tenaga, bukan saja untuk perampasan akan tetapi juga syarat-syarat teknis dan ekonomi mempertahankan perampasan itu. Di Batavia atau Priangan kemenangan politik atau militer akan sukar didapat dan dipertahankan (daripada di lembah Bengawan Solo) karena sangat sedikit faktor-faktor teknis dan ekonomis yang tersedia di sana. Kemenangan politik dan militer yang modern hanya dipertahankan jika kita memiliki syarat-syarat kekuasaan ekonomi. Bahkan kita nanti harus mengerahkan induk pasukan kita ke lembah Bengawan Solo, agar offensif revolusioner dapat menentukan strategi seluruhnya”.<sup>26</sup>

Selanjutnya Tan Malaka mengingatkan bahwa seluruh rakyat belum berada di bawah PKI, situasi revolusioner perlu dikembangkan, dan anggota PKI belum cukup berdisiplin. Begitu pula tuntutan yang konkrit belum dirumuskan.

Penolakan Tan Malaka dibicarakan kembali oleh Alirnin bersama pimpinan PKI yang berada di Singapura. Akhirnya diputuskan untuk menolak thesis Tan Malaka. Alirnin dan Musso diutus ke Moskow pada bulan Maret 1926. Pada bulan Maret 1926 Tan Malaka menerima pemberitahuan dari Alirnin, bahwa thesisnya

---

25. Komintern Asia Tenggara, ditugasi oleh Komintern untuk mengawasi partai komunis di Indonesia.

26. Filipina, Birma (Myanmar), Malaka, Indo China, agar tidak menyimpang dari aturan dasar Komintern Tan Malaka, *Menuju Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1924, hal. 49

ditolak oleh partai. Sekali lagi Tan Malaka meminta pimpinan partai untuk mendiskusikan keputusan Prambanan tersebut. Diskusi antara Tan Malaka, Subakat dan Suprodjo menghasilkan kesepakatan membatalkan keputusan itu. Hasil kesepakatan diskusi disampaikan oleh Suprodjo kepada Sardjono tetapi ditolak. Sardjono tetap pada pendiriannya, revolusi tetap akan dilaksanakan.

Ketika keputusan Prambanan sedang didiskusikan oleh Tan Malaka di Singapura, Alimin dan Musso telah tiba di Moskow. Mereka menyampaikan rencana revolusi di Indonesia. Rencana itu didukung oleh Trostsky, tetapi ditolak oleh Stalin. Oleh karena itu Alimin dan Musso ditahan selama 3 bulan untuk direindoktrinasi tentang teori perjuangan revolusioner. Stalin memutuskan melarang rencana pemberontakan diteruskan. Alimin dan Musso ditugasi membawa keputusan ini ke Indonesia. Musso menolak keputusan Stalin dan akan tetap melaksanakan pemberontakan. Sebelum Alimin dan Musso tiba di Indonesia pergolakan sudah meletus. Perintah untuk memulai pemberontakan disampaikan seminggu sebelumnya oleh pimpinan PKI. Perintah-perintah disampaikan lewat juru propaganda yang berjalan keliling.<sup>27</sup>

Sementara itu di Jawa pemberontakan dimulai secara serentak di berbagai tempat sejak tanggal 12 November 1926. Di Jakarta, Jatinegara, dan Tangerang pemberontakan berlangsung dari tanggal 12-14 November, sedang di Karesidenan Banten berlangsung dari tanggal 12 November sampai 5 Desember 1926, seperti di Labuhan, Menes, Caringin, dan Pandeglang. Di kabupaten Bandung berlangsung dari 12-18 November 1926 yakni di Rancaekek, Cimahi, Padalarang, dan Nagrek. Di Priangan Timur pemberontakan terjadi di Ciamis, Tasikmalaya. Di Karesidenan Surakarta, khususnya di Kabupaten Boyolali pemberontakan terjadi pada tanggal 17 November sampai 23 November. Di daerah Kediri berlangsung dari 12 November- 15 Desember. Pemberontakan meluas ke Banyumas, Pekalongan dan Kedu. Di Sumatera Barat.

---

27. AK. Pringgodigdo SHL, *op. cit.*, hal. 32 - 33

pemberontakan dimulai pada awal Januari 1927 di Sawahlunto, Silungkang, Solok, Kota Lawas, Pariaman, Painan, dan Lubuk Sikaping, dan berlangsung sampai akhir Februari 1927.

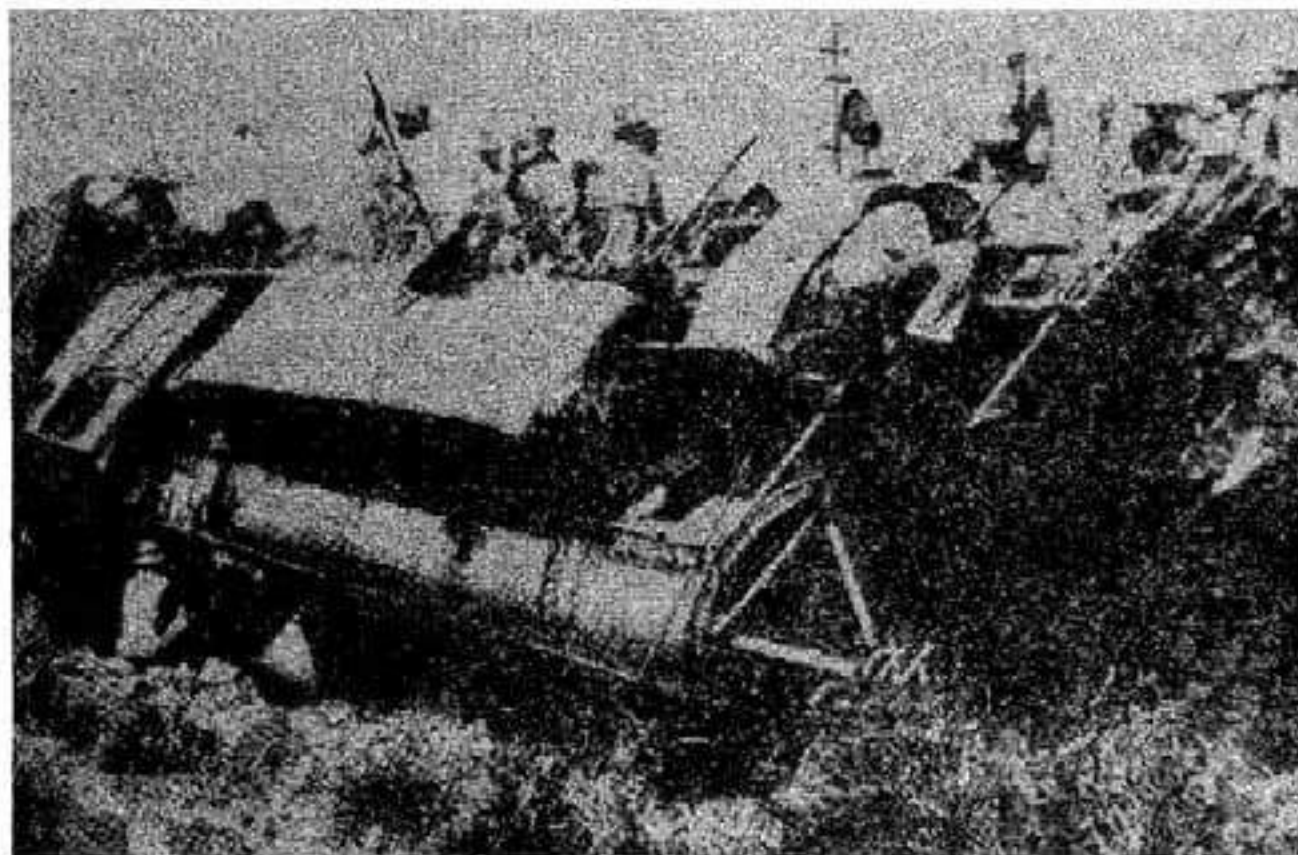


*Senjata-senjata yang digunakan PKI yang dirampas pemerintah kolonial Belanda*

Ketika berita tentang pemberontakan di Jawa diterima oleh Komintern, di luar dugaan Komintern memberikan dukungannya dan menganjurkan kepada kaum komunis sedunia untuk membantu PKI. Dukungan tersebut dikemukakan pada pernyataan, "Komintern menyambut baik, perjuangan revolusioner rakyat Indonesia dan memberikan dukungan penuh". Namun pelaksanaan pemberontakan PKI ini kurang terkoordinasi, sehingga mengalami kegagalan. Akibatnya pengawasan Pemerintah Hindia Belanda terhadap aktivitas politik pergerakan nasional sangat diperketat serta berpengaruh terhadap nasib para pemimpin PKI yang berada di luar negeri.

Pada bulan Desember 1926 Semaun dalam kondisi panik dan frustrasi datang kepada Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda. Keduanya sepakat untuk mengatasi ketimpangan yang

terjadi pada pergerakan dan kemudian menyusun suatu konvensi bersama yang memuat pernyataan : PI harus mengambil alih dan bertanggung jawab penuh atas gerakan rakyat Indonesia, PKI harus mengakui pimpinan SI, dan percetakan yang di bawah pengawasan PKI harus diserahkan kepada PI.<sup>28</sup>



*Salah satu korban pemberontakan PKI tahun 1927 di Sumatera Barat.*

Sikap menyerah Semaun kepada Hatta, oleh Komintern, dalam hal ini Komite Eksekutif (EKKI), dinilai sebagai kesalahan besar. Tindakannya dipandang sebagai likuidasi PKI. Konvensi ini dibatalkan setahun kemudian (Desember 1927). Nasib Semaun kemudian ditentukan oleh Mahkamah yang dibentuk oleh EKKI. Ia dijatuhi hukuman dibuang ke Asia Tengah. Demikian pula dengan nasib kawan-kawannya. Musso direeducasi : diharuskan masuk sekolah partai di Moskow, sedangkan Alimin dijadikan petugas Komintern yang harus mengembara dari negara ke negara

---

28. Badan Koordinasi bantuan pemantapan Stabilitas Nasional, Sekretariat Bidang VI, "Bahaya Ekstrim Kiri", manuskrip, tanpa tahun, hal41-43.

dan kemudian ditempatkan di Cina. Darsono diharuskan “bertobat” mengakui segala kesalahannya kepada pemimpin tertingginya, Stalin. Selanjutnya ia dibuang dan hidup terlunta-lunta di Jerman dan negeri Belanda.

Kegagalan pemberontakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh PKI pada 1926/1927 ini mempunyai dampak yang merugikan bagi perjuangan pergerakan nasional. Pengawasan terhadap semua aktivitas partai-partai politik lebih diperketat. Ruang gerak para pemimpin nasionalis dipersempit, baik melalui undang-undang maupun melalui pengawasan. Nasib perjuangan pergerakan kemerdekaan nasional mengalami masa yang paling suram. Di sini kita melihat bahwa PKI hanya berjuang untuk mencapai tujuan politiknya yaitu merebut kekuasaan untuk mendirikan pemerintahan komunis. Agitasi dan slogan-slogan revolusi yang menyesatkan dan menipu, menelan korban ribuan putra-putra Indonesia yang masih buta politik.<sup>29</sup>

## **7. Gerakan PKI illegal**

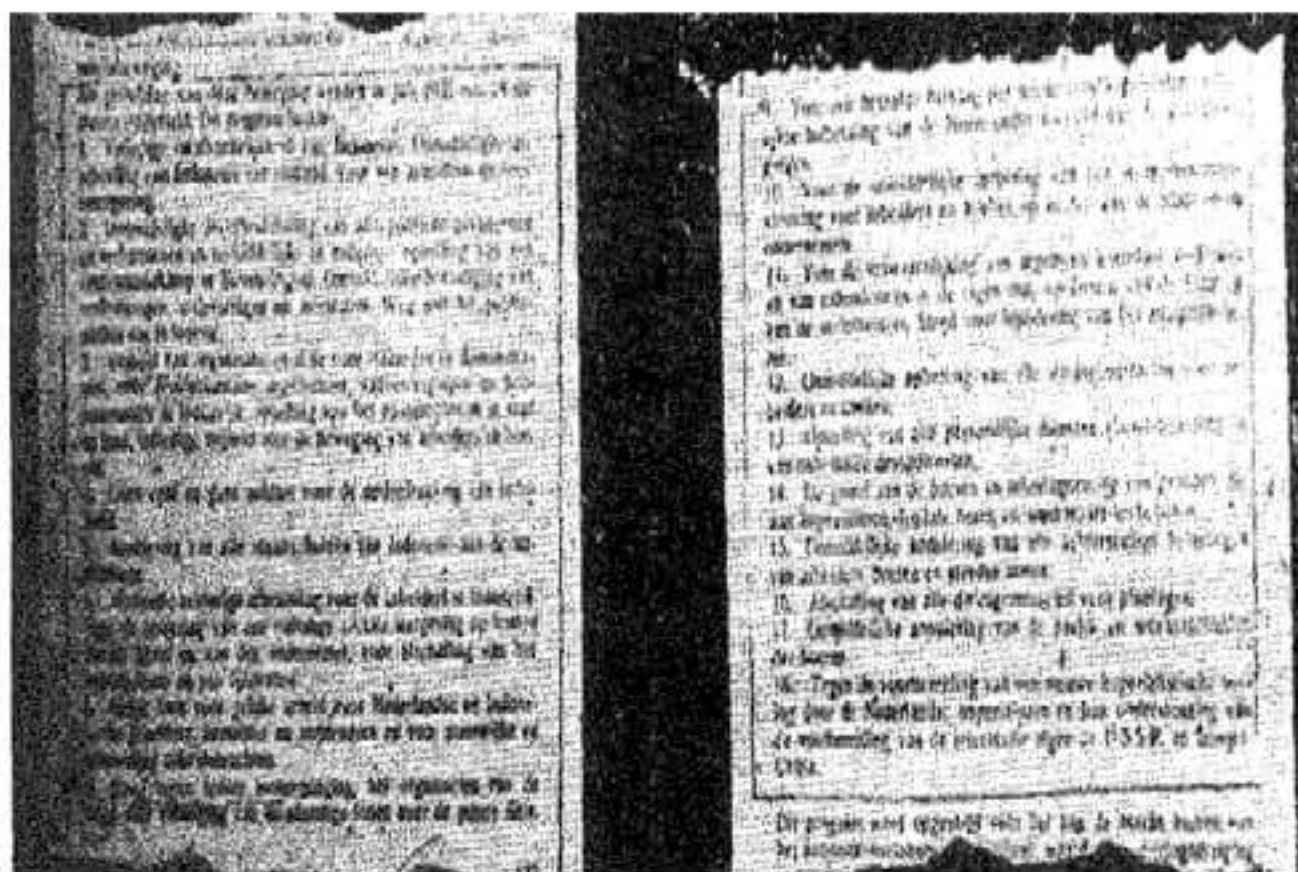
Sesudah pemberontakan gagal, pimpinan dan kader-kader PKI yang tinggal bercerai berai menyelamatkan diri dari kejaran Polisi Pengawasan Politik. Dua tahun kemudian, pada 1928 terdapat tanda-tanda PKI mulai bangkit kembali, sekalipun dengan jaringan yang amat terbatas. Mereka membentuk Sarekat Kaum Buruh Indonesia (SKBI). Aktivitas mereka dicurigai dan sebagian pimpinan SKBI ditangkap. Pada tahun 1932 mereka mencoba bangkit dengan memperkuat organisasi sel, yang disebut komite persatuan.<sup>30</sup> Komite ini terus-menerus melancarkan tuntutan revolusioner. Pada bulan Juli 1932, komite ini mengeluarkan 18 pasal program tuntutan antara lain: pertama, pembentukan pemerintahan buruh dan tani, kedua, segera bebaskan semua narapidana politik, dan tahanan. Hapuskan.

---

29. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Pemberontakan GJO SIPKI dan Penumpasannya, Bandung, Disjarah AD, hal. 35-39

30. Justus M. van der Kroef, The Communist Party of Indonesia, University of British Columbia, Vancouver, 1965, hal. 22 ..

kamp konsentrasi Digul dan kembalikan pemimpin yang dibuang, ketiga, bebas mengadakan aksi-aksi politik, mogok dan demonstrasi bagi organisasi revolusioner, serta kebebasan penuh bagi gerakan buruh dan tani.



*Program 18 pasal PKI dalam bahasa Belanda*

Perkembangan gerakan bawah tanah komunis tidak dapat dilepaskan dari perkembangan komunis internasional. Di Eropa pada tahun 30-an muncul kekuatan dunia baru yang dipelopori oleh Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia. Kedua gerakan ini bertumpu pada satu ideologi yakni fasisme.<sup>31</sup> Bangkitnya fasisme baik di Jerman maupun di Italia menyadarkan Stalin bahwa fasisme lebih berbahaya daripada kapitalisme, terutama menjadi ancaman langsung terhadap negara Uni-Soviet. Untuk itu perlu digalang kerjasama dengan golongan kapitalis yang bersikap anti fasis. Akhirnya diputuskan untuk sementara menghentikan permusuhan dengan kapitalis, selanjutnya menggalang kerjasama untuk melawan

31. Fasisme adalah ideologi yang menekankan dasar dan paham otoriter, tindakan politik totaliter serta menolak baik komunisme maupun kapitalisme

fasis. Perubahan sikap ini tercermin setelah terpilihnya Dimitrov sebagai pimpinan baru Komintern pada tahun 1935. Sikap Komintern ini dikenal sebagai garis Dimitrov.

Untuk menjelaskan garis baru ini kepada partai komunis seluruh dunia, Komintern mengirimkan sejumlah tokoh-tokoh lokal yang berada di Moskow kembali ke negara masing-masing. Musso dikirim ke Indonesia. Pada tahun itu juga Musso telah berada di sekitar Surabaya. Ia mengumpulkan sisa-sisa kader komunis yang melakukan gerakan bawah tanah, antara lain Ngadmo (Armunanto), Pemudji, Azis, Sukayat, Djoko Sudjono, Achmad Sumadi, Sukindar, Sutrisno, dan Suhadi. Musso kemudian membentuk Central Komite (CC) PKI baru pada 1935 (selanjutnya disebut dalam buku ini sebagai PKI-35). Mr. Amir Sjarifuddin dan Tan Ling Djie berhasil dibina oleh kelompok ini.

Pada tahun 1938, jaringan PKI-35 terbongkar. Achmad Sumadi, Sugono, dan Harjono, tertangkap dan dibuang ke Boven Digul. Kelompok PKI-35 akhirnya terpecah belah. Pamudji, Sukayat, Abdul Azis dan Abdulrahim meneruskan kerjanya sampai 1943.

Sejak kedatangan Musso, sikap PKI mulai berubah, tidak lagi menyuarakan tuntutan-tuntutan radikal revolusioner. Ketika Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) terbentuk pada 1937, kader-kader PKI memasuki organisasi ini. Sekalipun Gerindo menganut azas koperasi dengan Pemerintah Hindia Belanda, namun sikap tegasnya memusuhi fasisme telah menarik perhatian kader PKI. Akhirnya lewat organisasi ini lahirlah perhatian kader PKI, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin, anggota pengurus Gerindo dan Wikana, pimpinan Pemuda Gerindo. Aktivitis lain yang juga digodok dalam Gerindo adalah D.N. Aidit, Anwar Kadir, Nungtjik AR., Ir. Sakirman, Sidik Kertapati, Sudisman, Sudjoyono, Tjugito, dan Mr. Joesoeph.<sup>32</sup> Melalui berbagai kursus, kader-kader PKI digembleng dalam Gerindo, bahkan Gerindo diakui sebagai proyek PKI. Generasi baru ini kemudian dipimpin Mr. Amir Sjarifuddin yang selanjutnya

---

32. Soe Hoe Gie, *Simpang Kiri dari Sebuah Jalan*, Skripsi Sarjana FSUI, Jakarta, 1969, hal. 22.

disebut kelompok Amir Sjarifuddin. Tetapi pada 1940 Mr. Amir Sjarifuddin ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda karena kegiatannya dalam PKI ilegal. Ia disuruh memilih dibuang ke Digul atau bekerja sama dengan pihak Belanda. Untuk menyelamatkan partainya Mr. Amir Sjarifuddin memutuskan memilih bekerja sama dengan pihak Belanda. Kemudian ia diangkat sebagai pegawai Departemen Urusan Ekonomi, di bawah pimpinan Van Mook.<sup>33</sup> Pada kesempatan ini Mr. Amir Sjarifuddin dihubungi oleh van der Plass, diberi uang sebesar F.25.000 (gulden) agar menyusun jaringan bawah tanah anti fasis.

Sebelum itu telah diadakan pertemuan rahasia antara pemimpin pergerakan seperti dengan dr. Tjipto Mangunkusumo, dengan kader kader PKI, yang membahas perjuangan selanjutnya apabila Belanda kalah dari Jepang. Pertemuan pertama diadakan di Rawamanguri, membahas petunjuk-petunjuk dr. Tjipto, yang menyatakan bahwa hanya rakyat Indonesia yang mampu melawan fasisme Jepang. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin dan dihadiri oleh Pamudji (PKI-35), Subekti, Atmadji (sekretaris Gerindo), Suyoko, Armunanto (PKI-35), Widarta (Pemuda Rakyat Indonesia), H. Mustafa (Singaparna), Liem Koen Hian (Surabaya) dan Oei Gee Hwat. Dari pertemuan ini dibentuk Gerakan Anti Fasis (Geraf).

Pertemuan kedua diadakan di Sukabumi di rumah dr. Tjipto Mangunkusumo, yang dihadiri oleh dr. Tjipto selaku tuan rumah, Djokosuyono, yang kemudian menyusup menjadi cudanco tentara Peta di Madiun, dr. Ismail (Ismangil)<sup>34</sup> yang kemudian menjadi cisci cudanco (komandan kompi kesehatan) pada tentara Peta Blitar, dan oleh Mr. Amir Sjarifuddin sendiri. Dalam pertemuan ini dibentuk susunan pimpinan Gerakan Anti Fasis (Geraf) yang terdiri dari : Pimpinan, Mr. Amir Sjarifuddin Pamudji dan Sukayat. Sekretariat, Armunanto (Ngadmo) dan Widarta. Penasehat, dr. Tjipto Mangunkusumo.

---

33. A. Brackman, *Op.Cit*, hal14. 35

34. dr. Ismangil, dihukum mati oleh Pengadilan Militer Jepang dituduh menjadi dalang pemberontakan Tentara Peta di Blitar yang dipimpin oleh *shodanco* Supriadi pada bulan Februari 1945.

Sesudah Jepang menduduki Indonesia, Mr. Amir Sjarifuddin mulai membuat jaring-jaring perlawanan. Namun Jepang yang mengambil alih aparat kepolisian, berhasil memperoleh informasi tentang gerakan bawah tanah komunis. Berdasarkan dokumen tersebut Jepang berhasil membongkar kegiatan kelompok Mr. Amir Sjarifuddin. Pada bulan Februari 1943 ia bersama 300 orang ditangkap. Mr. Amir Sjarifuddin, Pamudji, Sukayat, Abdurachim, dan Abdul Azis divonis mati. Atas permintaan Sukarno-Hatta kepada Panglima Tentara-16, Letnan Jenderal Nagano, hukuman terhadap Mr. Amir Sjarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup. Rekannya yang lain tetap dijatuhi hukuman mati. Setelah Mr. Amir Sjarifuddin tertangkap hampir semua jaringannya terbongkar, kecuali jaringan Widarta. Widarta kemudian bersembunyi di daerah Pematang,<sup>35</sup> mengambil alih kepemimpinan PKI bersama K.Mijaya. Jaringan kelompok Mr. Amir Sjarifuddin yang masih selamat adalah jaringan yang dipimpin oleh Mr. Hindromartono, seorang tokoh buruh dari Bojonegoro. Banyak penulis yang mengatakan bahwa kelompok Mr. Amir Sjarifuddin telah hancur. Ternyata sisa-sisa kelompok ini mengadakan linkup dengan kader-kader PKI -35 di Surabaya. Hasilnya adalah terbentuknya kelompok pemuda yang kemudian menjadi tokoh Pemuda Republik Indonesia (PRI), seperti Sumarsono, Krissubanu, dan Roeslan Widjayastra.

Di Jawa Barat terbentuk kelompok gerakan bawah tanah yang menamakan dirinya Gerakan Djojoboyo yang dipimpin oleh Mr. Moh Joesoeph pemimpin Gerindo Bandung. Jaringan gerakannya terdapat di sekitar Cirebon dan Bandung. Ia tertangkap menjelang akhir masa pendudukan Jepang, ditahan di rumah tahanan Kempetai di Tanah Abang.

Di samping kelompok-kelompok yang berada di dalam negeri, terdapat juga kelompok yang disebut Kelompok Digul. Kelompok ini terdiri atas tokoh-tokoh PKI yang dibuang akibat

---

35. Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah*, P.T. Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 1989, hal. 336

pergolakan 1926/1927 dan Kelompok PKI-35 yang tertangkap pada 1937, sesudah Musso meninggalkan Indonesia. Generasi pertama antara lain Sardjono dan Aliarcham, sedang generasi kedua antara lain Achmad Sumadi dan Djokosudjono. Ketika Jepang menyerbu Irian, mereka diangkut oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Australia. Sebagian dari mereka kemudian bekerja pada Sekutu. Di Brisbane, Ngadiman, Sabariman, dan Djojosedjono membentuk Central Komite baru, Sardjono di Melbourne mendirikan PKI Sarekat Indonesia Baru (Sibar). Karena kegiatannya dianggap membahayakan oleh Sekutu, Sardjono dikirim ke Morotai dan ditempatkan di bagian Penerangan Sekutu.

Masih ada kelompok lain yaitu kelompok Negeri Belanda. Tokoh-tokohnya adalah para mahasiswa seperti Abdulmadjid Djojodiningrat, Setiadjid, Maruto Darusman, dan Suripno. Tokoh lain yang merupakan otak dan generasi mahasiswa ini ialah Djayengpratomo, Gondoprato, dan Jusuf Muda Dalam. Ketika negeri Belanda diduduki Jerman, mereka melakukan gerakan bawah tanah, seperti spionase dan sabotase. Dalam melakukan gerakan ilegal di negeri Belanda ini telah jatuh beberapa korban, seperti Sidartawan, Sundari, Irawan Sundono, dan Parsono.<sup>36</sup>

---

36. Soe Hok Gie, *op. cit.*, hal. 26

### **BAB III**

## **USAHA-USAHA PEREBUTAN KEKUASAA LOKAL**

Sejak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan, maka sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang agresif dan militant khususnya dalam usaha menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di tanah air. Fokus perhatian masyarakat Indonesia ketika itu semata-mata ditujukan pada perjuangan menegakkan kemerdekaan dengan semboyan “merdeka atau mati”. Tetapi dalam arena perjuangan itu ada pula sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang berusaha dengan sadar atau tidak sadar menguntungkan tumbuh suburnya faham ideologi Marxisme dan Leninisme yang telah hidup jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia/PKI yang sejak tahun 1926/1927 telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda dan menjadi partai yang bersifat ilegal dengan diam-diam kembali melakukan aksi di berbagai daerah.<sup>1</sup>

Berikut ini akan dibahas berbagai organisasi yang berhaluan Marxis/Leninisme termasuk PKI yang memanfaatkan situasi awal kemerdekaan untuk kembali menampakkan dirinya dalam berbagai usaha perebutan kekuasaan lokal.

#### **1. Peristiwa Serang : Aksi Teror Gerombolan Ce' Mamat 9 Desember 1945**

Peristiwa Serang adalah salah satu usaha dari sisa-sisa Pemberontak Komunis tahun 1926 di Banten dalam merebut kekuasaan lokal untuk mendirikan pemerintahan di daerah yang dibebaskan (*liberated zones*). Perebutan kekuasaan lokal merupakan strategi komunis guna memperoleh kekuatan dalam rangka mengepung RI yang bertujuan mendirikan pemerintah komunis.

---

1. I. A.Z. Abidin, SH, *Bahaya Komunisme*, Bulan Bintang, Jakarta th. 1968, hal. 82-83

Oleh karena itu masa transisi antara akhir pemerintahan Jepang hingga memasuki awal kemerdekaan merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan strategi tersebut.

Kesenjangan sosial, seperti perbedaan kehidupan yang menyolok antara rakyat dan pamong praja, dijadikan tema oleh orang-orang komunis untuk menentang pemerintah. Selain itu kehidupan rakyat yang amat berat serta konflik intern di antara pamong praja dipertajam melalui agitasi serta propaganda yang dilakukan secara intensif dan terselubung. Kondisi masyarakat yang demikian, memungkinkan orang-orang komunis memperoleh dukungan untuk melakukan pergolakan.

Di samping itu keterlambatan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diterima di daerah-daerah menyebabkan perintah pengambilalihan kekuasaan dan pemerintahan yang lama tidak segera memperoleh tanggapan. Begitu pula yang terjadi di daerah Banten. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pembentukan badan-badan resmi negara yang diperintahkan oleh pemerintah pusat RI, menjadi tertunda.

Barulah pada tanggal 10 September 1945, Presiden Sukarno mengangkat secara resmi K.H. Achmad Khatib sebagai Residen Banten. Ia adalah seorang tokoh lokal yang pernah terlibat dalam pemberontakan komunis tahun 1926 di daerah Banten. Selanjutnya ia mengalami masa pembuangan di Boven Digul selama 15 tahun dan bebas kembali setelah berakhirnya masa pemerintahan militer Jepang. Namun demikian K.H. Achmad Khatib memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat setempat. Sebagai putera Kyai Haji Wased, seorang ulama berpengaruh, serta kegiatannya di pesantren telah menjadikan K.H. Achmad Khatib diterima oleh masyarakat Banten yang terkenal fanatik dalam hal agama.

Setelah pengangkatan resmi tersebut, Residen Kyai Haji Achmad Khatib mengangkat orang-orang yang akan membantu tugasnya. Sebagai wakil residen diangkat Zulkarnaen Surya Kertalegawa dan diperintahkan pula kepada Raden Hilman Djajadiningrat (Bupati

Serang), Djumhara (Bupati Pandeglang), Raden Hardiwinangun (Bupati Lebak) untuk tetap meneruskan tugasnya. Jabatan-jabatan dalam badan KNI di setiap kabupaten, diserahkan kepada Ce Mamat (teman K.H. Achmad Khatib) untuk Kabupaten Serang, Mohamad Ali, untuk Kabupaten Pandeglang dan Raden Djaja Roekmantara untuk Kabupaten Lebak. Di samping itu dibentuk pula BKR Karesidenan Banten, di bawah pimpinan KH. Syam'un. Anggotanya terdiri atas bekas anggota Peta dan pemuda-pemuda lainnya.

Ternyata tidak semua badan tersebut menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Salah satu ialah KNI di Kabupaten Serang di bawah pimpinan Ce Mamat.<sup>2</sup> Tokoh ini telah memanfaatkan KNI sebagai alat untuk menyebarkan ideologi komunisme di kalangan rakyat. Ce Mamat yang pada tahun 1926 pernah menjabat Ketua PKI Cabang Anyer ini mengemban suatu misi yaitu membentuk suatu Dewan Rakyat di daerah Banten. Misi tersebut berasal dari Chaerul Saleh, tokoh pemuda Asrama Menteng 31 di Jakarta yang disampaikan oleh Abdul Muluk dua hari setelah kemerdekaan Indonesia. Ketika itu Ce Mamat berada di penjara Tanah Abang 3, Jakarta karena ditangkap Jepang sehubungan dengan keterlibatannya dalam kegiatan gerakan Djojobojo.

Kondisi yang dianggap tepat oleh Ce Mamat untuk merealisasikan misinya ialah, ketika massa rakyat menuntut pemecatan terhadap pamong praja yang masih banyak ditempatkan dalam pemerintah karesidenan di bawah KH. Achmad Khatib. Kebencian rakyat terhadap para pamong praja dikarenakan mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonialisme/imperialisme serta kebanyakan mereka berasal dari luar daerah Banten, seperti dari Priangan, dan lain lain. Suasana psikologis rakyat semacam ini dimanfaatkan oleh Ce

---

2. Ce Mamat, Tokoh PKI 1926 dari Banten berhasil meloloskan diri dari tangkapan PID dan lari ke Malaya. Ia aktif dalam PARI. Pada masa pendudukan Jepang ia menjadi anggota bawah tanah Djojobojo. Tahun 1944 Ce Mamat tertangkap dan ditawan di ruma talianan Kempetai Tanah Abang. Setelah proklamasi ia dibebaskan oleh Abdul Muluk dan kelompok Asrama Menteng 31 Jakarta dan kembali ke Serang dengan mengemban misi untuk mengambil alih kekuasaan.

Mamat dengan melakukan pengambilalihan kekuasaan pada tanggal 17 Oktober 1945 dari tangan KH. Achmad Khatib. Tampaknya antara KH. Achmad Khatib dan Ce Mamat terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk pemerintahan daerah. KH. Achmad Khatib menghendaki penggantian pimpinan di atas seperti dirinya, sedangkan Ce Mamat menghendaki perombakan secara total.

Pada tanggal 28 Oktober 1945 Ce Mamat membacakan maklumatnya yang menyatakan bahwa seluruh karesidenan Banten diambil alih oleh Dewan Rakyat. Residen tidak dapat mengelakkan aksi daulat Ce Mamat untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. KH. Achmad Khatib tetap menjadi residen, akan tetapi program pemerintah dijalankan sesuai dengan konsep Ce Mamat. Setelah pengambilalihan kekuasaan di tingkat karesidenan berhasil, maka aksi daulat pun semakin meluas ke daerah-daerah Banten lainnya.<sup>3</sup>

Pada malam hari tanggal 28 Oktober 1945 Bupati Serang, R. Hilman Djajadiningrat ditahan oleh para pemuda pengikut Ce Mamat. Berita ini baru diketahui keesokan harinya. Residen dan pimpinan BKR segera bertindak untuk membebaskan serta mencegah aksi-aksi dewan berikutnya.

Dalam kondisi politik yang kacau, Ce Mamat memaksakan kehendaknya kepada residen, agar segera menyusun aparatur pemerintah yang baru. Belum sampai tersusun ia sendiri menunjuk "wakil" rakyat guna menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Untuk memperoleh simpati rakyat, maka seluruh aparatur pemerintahan diambil dari golongan ulama. Jabatan residen tetap dipangku oleh KH. Achmad Khatib. K.H. Syam'un diangkat sebagai Bupati Pandeglang di samping jabatannya sebagai Komandan TKR Banten, dan Haji Hasan sebagai Bupati Lebak. Di samping itu dibentuk pula Majelis Ulama yang berfungsi sebagai suatu badan penasehat serta mengawasi tugas residen. Majelis ini beranggotakan 40 kyai yang berpengaruh di Karesidenan Banten.

---

3. Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Bandung, Tahun 1985, hal. 72-73

Meskipun telah ada perubahan dalam pejabat pemerintah daerah, tidak berarti bahwa masalah telah terselesaikan. Laskar Ce Mamat yang bernama Gulkut (Gulung Bulkut; Bulkut = pamong praja) masih terus melakukan pengacauan dan teror. Para anggota laskar ini kebanyakan terdiri atas para jawara. Perampokan harta benda milik penduduk, dan pembunuhan, terutama terhadap golongan pamong praja, merupakan sasarannya. Kepala Polisi Serang, Oscar Kusumaningrat, ditangkap kemudian dibawa ke penjara Serang. Selain untuk membiayai kelangsungan hidup perjuangan Ce Mamat yang bermarkas di Ciomas, maka tindakan perampokan dan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai balas dendam terhadap pamong praja yang dianggap memiliki kedudukan istimewa pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang. Dengan demikian sasaran teror ini memiliki motivasi politik yang mewarnai gerakan aksi daulat tersebut.

Teror dan keganasan Laskar Gulkut telah demikian meresahkan rakyat. TKR Resimen I Banten yang dipimpin oleh K.H. Syam'un, merencanakan suatu operasi penumpasan. Dengan dibantu oleh Ali Amangku dan Tb. Kaking, serbuan TKR berhasil memukul mundur pasukan Dewan Rakyat dan merebut markasnya yang terletak di kantor Kawedanan Ciomas. Perlawanan Laskar Gulkut berhasil dipatahkan dan sebagian besar anak buahnya ditahan, namun Ce Mamat berhasil meloloskan diri ke daerah Lebak.

Ce Mamat berusaha menyusun kembali sisa-sisa kekuatan Laskar Gulkut, dengan pusatnya di kota Rangkasbitung. Dalam waktu satu bulan, tepatnya bulan November 1945 Dewan Rakyat berhasil menguasai seluruh kota Rangkasbitung. KNI Daerah kabupaten itu dibubarkan. Aksi-aksi Ce Mamat mendapat dukungan dari Kepala Desa Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, dan diangkat menjadi wedana di distrik tersebut. Di sini laskar Dewan Rakyat berhasil melucuti anggota kepolisian setempat, dan menggantikannya dengan para jawara, sehingga polisi di

Lebak dikenal dengan julukan “Polisi Jawara”.<sup>4</sup> Pada bulan November itu juga Dewan Rakyat Ce Mamat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Dewan Rakyat Tangerang yang dipimpin oleh K.H. Achmad Chairun. Mereka mengadakan rapat raksasa di lapangan Undojo, Tangerang .

Sementara itu aksi-aksi Dewan Rakyat terus berlangsung. Bupati Lebak, R. Hardiwinangun diculik dari rumahnya. Kejadian ini berlangsung ketika Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta rombongan meninjau situasi daerah Karesidenan Banten pada tanggal 9 Desember 1945. Bupati R. Hardiwinangun yang mengalami nasib malang ini diikat kemudian dibawa ke jembatan Sungai Cisiih. Ia ditembak mati di sini dan mayatnya dilemparkan ke sungai. Dua hari kemudian mayatnya ditemukan oleh penduduk di sekitar tempat tersebut.

Terjadi pula peristiwa penyerbuan tangsi polisi di kota Serang yang dilakukan oleh pasukan liar pimpinan Ce Mamat dari daerah Ciomas, Kabupaten Bogor. Pasukan ini bergabung dengan kekuatan Dewan Rakyat dari Rangkasbitung. Penyerbuan ini merupakan puncak peristiwa di Karesidenan Banten, namun akhirnya dapat diatasi oleh TKR. Dalam suatu operasi pembersihan, Ce Mamat berhasil meloloskan diri dan kemudian menggabungkan diri dengan Laskar Rakyat pimpinan Kyai Narya di Cipaku, Bogor. Dengan bantuan Laskar Gulkut dan Laskar Ubel-ubel dari Tangerang tokoh ini pun memimpin suatu aksi daulat terhadap Residen Barnas dan Komandan Resimen TKR Husein Sastranegara. Dua hari kemudian residen dan komandan resimen berhasil dibebaskan oleh Pasukan Polisi Istimewa.

Aksi-aksi yang dilakukan Ce Mamat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan komunis dalam upaya mencapai cita-citanya. Dalam melakukan strateginya, mula-mula mereka menghasut masyarakat setempat dengan pelbagai intimidasi serta menuduh pemerintah

---

4. Sri Handayani Purwaningsih, “Pergolakan Sosial-Politik Di Serang Pada Tahun 1945: Kasus Gerakan Aksi Daulat Ce Mamat”, *Skripsi* (untuk melengkapi syarat gelar sarjana FS-UI), Jurusan Sejarah, tahun 1984, hal. 89

tidak representatif dan perlu diganti. Kemudian aksi ditingkatkan dengan tindak kekerasan, seperti menculik dan membunuh tokoh tokoh sipil dan militer yang dianggap sebagai penghalangnya. Setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah melakukan pembubaran lembaga pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintah Dewan Rakyat menurut versi komunis.<sup>5</sup>

## **2. Peristiwa Tangerang: Aksi Kekerasan Pasukan Ubel-Ubel 18 Oktober 1945 -14 Januari 1946**

Sikap ragu-ragu Bupati Tangerang Agus Padmanegara ketika menerima berita dari Jakarta tentang proklamasi kemerdekaan, mempengaruhi keputusannya dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Sebagai akibat keputusan yang tidak menentu ini, muncul kerusuhan-kerusuhan baik yang bersifat kriminalitas maupun yang bermotifkan politis. Kerusuhan-kerusuhan tersebut kemudian ikut mewarnai pergolakan Tangerang yang dilakukan oleh kaum komunis dalam rangka menciptakan Dewan Rakyat menurut versinya.

Untuk mencegah situasi yang semakin memburuk, Komite Nasional Indonesia Daerah Tangerang yang dibentuk pada tanggal 26 Agustus 1945 mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh ketuanya yaitu R.M. Koesoemo pada tanggal 6 Oktober 1945. Rapat yang dihadiri oleh anggota-anggota KNI yang terdiri atas Ketua Frond Kemerdekaan, Ketua Badan Keamanan Rakyat, Ketua Barisan Pelopor dan Ketua Lalu Lintas Sosial, menyimpulkan bahwa kekacauan yang timbul di daerah Tangerang disebabkan tidak berfungsinya pemerintah daerah. Pada kesempatan ini KNI memutuskan untuk meminta Haji Achmad Chairun,<sup>6</sup> seorang ulama, pemimpin Barisan Sangiang menjadi pimpinan daerah di Tangerang. Permintaan itu diterima oleh Haji Achmad Chairun.

---

5. *Ibid*, hal. 90. Lihat juga Pusat Sejarah TNI, *Diorama Museum Pengkhianatan PKI (Komunis)*, Markas Besar Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, Th. 1992, lial. 10.

6. Haji Achmad Chairun, seorang ulama bekas pimpinan 51 Tangerang yang kemudian menyeberang ke PKI. Ia pernah pula memimpin pemberontakan PKI 1926 di Tangerang.

KNI Daerah Tangerang merangkul Haji Achmad Chairun, dengan perhitungan agar kelompok Sangiang yang dipimpinnya tidak bergabung dengan kelompok Barisan Banteng Merah. Apabila kedua kelompok ini bergabung, akan dapat membahayakan pemerintah. Kesediaan H. Achmad Chairun memenuhi permintaan KNI, dikecam oleh Barisan Banteng Merah. Ia dituduh sudah diperalat oleh kelompok birokrat.

Rencana aksi pendaulatan terhadap aparat pemerintah di Tangerang dan daerah lain telah diatur sebelumnya oleh kelompok komunis dan pengikut Tan Malaka. Sebagai pelaksana ditunjuk Abdul Muluk, salah seorang kepercayaan Tan Malaka. Untuk membahas rencana tersebut, pada pertengahan bulan Oktober 1945 berlangsung pertemuan di Kampung Pisangan, Jatinegara yang dihadiri oleh Ce Mamat, Mr. Mohammad Joesoeph, Djoko Atmadji,<sup>7</sup> dan Nungtjik. Keempat orang itu berhasil dibebaskan oleh Abdul Muluk dan Syamsuedin Chan dari Rumah Tahanan Kempeitai, Jakarta. Pada pertemuan itu Abdul Muluk menyetujui rencananya, yaitu : Ce Mamat diminta berangkat ke Banten, Mohammad Joesoeph ke Cirebon dan Djoko Atmadji ke Surabaya. Mereka ditugasi menghimpun kekuatan rakyat di daerahnya.

Sebelum gerakan aksi daulat di Tangerang berlangsung, Wikana bersama anak Haji Misbach telah membawa pesan Abdul Muluk untuk menemui Ce Mamat, Sumo Atmodjo dan Haji Achmad Chairun di Tangerang. Menurut rencana yang telah disusun, Sumo Atmodjo dan Haji Achmad Chairun menerima perintah dari Ce Mamat.

Guna merealisasikan gerakan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 1945 bertempat di rumah Sumo Atmodjo dilaksanakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat Tangerang seperti Ketua KNI R.M. Koesoemo, Soetedjo, Ketua BKR Tangerang, Haji Achmad

---

7. Djoko Atmadji terkenal dengan Atmadji, Sekretaris Gerindo di bawah Amir Sjarifuddin. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942, ia bersembunyi di Bojonegoro dan tertangkap di sana, kemudian dijebloskan dalam tahanan Keilpeitai Jakarta. Pada bulan Oktober 1945 ia membentuk Marine Keamanan Rakyat (MKR) di Surabaya.

Chairun, Deos, Sjekh Abdullah, dan lain-lain. Mereka menilai Bupati Agus Padmanegara dianggap tidak mampu memimpin revolusi di Tangerang, sehingga harus segera diganti dan untuk itu diputuskan akan melakukan aksi daulat secara damai. Dalam aksi tersebut diadakan pembagian tugas, yaitu Haji Achmad Chairun bersama Deos dan Sjekh Abdullah mengerahkan massa rakyat masing-masing dari jurusan Karawaci dan Sepatan menuju rumah kediaman bupati, sedangkan Soetedjo melaksanakan pengambil alihan kekuasaan dari Agus Padmanegara.

Aksi pendaulatan ditetapkan tanggal 18 Oktober 1945. Pada tanggal itu Bupati Tangerang Agus Padmanegara dipaksakan menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Soetedjo, Ketua BKR Tangerang. Pada hari yang sama Soetedjo melimpahkan kembali kekuasaannya kepada Haji Achmad Chairun dan Sumo Atmodjo,<sup>8</sup> yang dilakukan di rumah Sumo Atmodjo di Jalan Bubulak, Kebon Jahe, Tangerang. Setelah aksi daulat berhasil, Sumo Atmodjo menyampaikan konsepsinya mengenai pemerintahan. Pemerintahan baru Tangerang adalah pemerintahan rakyat yang hams dipegang dan dijalankan oleh suatu Dewan. Kemudian akan dibentuk Badan Direktorium Dewan Pusat. Aparat pemerintahan lama termasuk KNI harus dibubarkan dan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta diputuskan. Badan Direktorium Dewan Pusat dipimpin oleh "empat serangkai" yaitu : Ketua, Haji Achmad Chairun sedangkan anggotanya masing-masing adalah Sumo Atmodjo, Suwono dan Abbas.

Badan Direktorium Dewan Pusat akan membawahi tiga Dewan yaitu : Dewan Tata Usaha, dipimpin oleh Sumitro, Dewan Ekonomi, dipimpin oleh Siswo, dan Dewan Pertahanan, dipimpin oleh Abbas.<sup>9</sup>

---

8. Sumo Atmodjo, adalah KepalaJawatan Irigasi (Pengairan) Tangerang. Ia termasuk aktivis Gerindo Tangerang dan sering berhubungan dengan Amir Sjarifuddin. Karena diburu oleh PID (Dinas Pengawasan Politik) ia bersembunyi di Cisoka Tangerang dan bekerja di perkebunan karet. Pada jaman Jepang ia bekerja di Jawatan Irigasi Tangerang. Ru ahnya seringkali digunakan untuk pertemuan kelompok bawah tanah Menteng 31 seperti Deos, Abdul Muluk, Suryawinata dll.

9. Abbas adalah mantan Digulis, ia baru datang dari Australia bersama rombongan NICA yang mendarat di Jakarta. Kemudian ia bergabung dengan kelompokMenteng 31. Dikirim ke Tangerang untuk menggantikan Deos, pimpinan Barisan Banteng Merah.

Tugas Dewan ini menangani masalah-masalah bidang keamanan, lalu lintas, dan kelaskaran. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang ketua, masing-masing adalah Ketua bidang keamanan (sebagai pengganti kepolisian) ; Haji Saalan; Ketua bidang lalu lintas : M. Hasan alias Atjong; dan Ketua bidang kelaskaran : Sjekh Abdullah.<sup>10</sup>

Susunan pemerintahan lama diubah yaitu Kawedanan menjadi Daerah Tingkat I, dipimpin oleh Kepala Daerah Tingkat I; kecamatan menjadi Daerah Tingkat II, dipimpin oleh Kepala Daerah Tingkat II; dan kelurahan menjadi Daerah Tingkat III, dipimpin oleh Kepala Daerah Tingkat III.

Dasar pemerintahan Dewan adalah kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan bertingkat. Kepala Daerah Tingkat III dipilih langsung oleh rakyat, dan sesudah itu Kepala Daerah Tingkat III bersama beberapa tokoh masyarakat memilih Kepala Daerah Tingkat II dan seterusnya.

Setelah kelaskaran Dewan terbentuk, pada tanggal 22 Oktober-1945 laskar ini menyerbu Curug dan Legog. Kecamatan Curug diserbu karena tidak mau tunduk kepada Pemerintah Dewan, sedangkan penyerbuan ke Legog yang merupakan tempat kedudukan markas Jepang, dimaksudkan untuk memperoleh senjata rampasan. Penyerbuan ke Curug berhasil, namun penyerbuan ke Legog gagal, karena pasukan Jepang telah meninggalkan markasnya beberapa jam sebelum diserbu. Sementara itu Sumo Atmodjo memerintahkan kepada Sjekh Abdullah untuk membentuk Laskar Pasukan Berani Mati (LPBM). Anggotanya terdiri atas pemuda pemuda yang direkrut dari kampung-kampung yang mendukung Pemerintahan Dewan Tangerang. Ketika dibentuk, anggotanya mencapai sekitar 800 sampai 1.000 orang yang kebanyakan berasal dari kalangan jawara. Mereka mengenakan seragam hitam-hitam dan ikat kepala atau ubel-ubel hitam. Ubel-ubel atau ikat kepala

---

10. Sjekh Abdullah, sahabat Haji Achmad Chairun, yang kemudian memasuki dunia jawara. Terlibat peristiwa 1926 dan dipenjarakan di Glodok. Lihat juga Pus at Sejarah ABRI, *Op cit*, hal. 12.

ini dilengkapi simbol yang berbentuk segi tiga bergambar palu arit. Laskar ini dikenal sebagai Laskar Ubel-ubel atau Laskar Hitam. Demikian pula semua pejabat teras Pemerintah Dewan Tangerang memakai lencana palu arit. Bendera berlambang palu arit telah disediakan untuk menggantikan bendera merah putih. Namun bendera palu arit tidak pernah dikibarkan sampai berakhirnya Pemerintahan Dewan Tangerang tanpa diketahui alasannya.

Sejak berdirinya Pemerintahan Dewan Tangerang, aparat pemerintah tidak berfungsi karena mereka tidak mengetahui prosedur administratif. Selain itu, suasana saling mencurigai terjadi di daerah perbatasan Tangerang, sehingga orang yang kebetulan lewat sering dituduh sebagai mata-mata NICA. Dalam kondisi seperti ini, di kalangan Laskar Hitam muncul kelompok yang terdiri atas para jawara dipimpin oleh Usman dibantu oleh Dulloh dan Lampung. Mereka memegang peranan dalam melakukan aksi kekerasan. Kelompok ini bermarkas di Gerendeng dan secara diam-diam memisahkan diri serta tidak mematuhi perintah "Panglimanya", yaitu Sjekh Abdullah. Mereka menggunakan pengaruh H. Achmad Chairun untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Kelompok Usman melakukan tindakan-tindakan teror terhadap penduduk, seperti mencuri buah-buahan, sayur-sayuran, merampas kerbau, kambing serta barang-barang milik penduduk pribumi maupun Cina dengan dalih atas perintah H. Achmad Chairun. Akibat teror mereka pada bulan November dan Desember 1945, banyak orang-orang Cina yang tinggal di Sepatan, Mauk, Kronjo dan Kresek mengungsi ke kota Tangerang atau Jakarta. Mereka takut terhadap kekejaman kelompok Usman ini.

Di samping aksi-aksi pengacauan, kelompok Usman melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh menjadi mata mata NICA atau Belanda. Yang menjadi korbannya, antara lain Nicolas Mogot, ayah Mayor Daan Mogot dan Otto Iskandardinata, tokoh pergerakan nasional. Kedua tokoh tersebut diculik secara

berantai. Nicolas Mogot dibunuh pada akhir Oktober 1945 di daerah Ketapang, Sepatan, sedang Otto Iskandardinata dibunuh pada akhir Desember 1945 di daerah Mauk.

Pada bulan November 1945 beberapa pemuda mantan tentara Peta antara lain Kemal Idris, Singgih, dan Daan Yahya membentuk Resimen TKR di Tangerang. Mereka merekrut anggota BKR dengan jumlah terbatas dengan maksud agar tidak dicurigai oleh Pemerintah Dewan.

Di sana mereka menemui kenyataan lain, yakni Tangerang telah dikuasai oleh Pemerintah Dewan yang memutuskan hubungan dengan Pemerintah RI. Untuk memperoleh gedung ia harus meminta ijin kepada Ketua Pemerintah Dewan H. Achmad Chairun. Dengan bantuan dr. J. Leimena (dokter Rumah Sakit Umum Tangerang) mereka memperoleh ijin menempati gedung bekas rumah penjara anak-anak. Dari tempat inilah dimulai merekrut para anggota BKR Tangerang untuk dilatih sebagai TKR. Latihan diadakan secara bergilir 50 - 60 orang, sampai akhirnya mencapai kekuatan satu resimen. Yang terpilih sebagai komandan resimen adalah Singgih. Yang paling dirasakan oleh resimen baru ini adalah kekurangan tenaga perwira. Oleh karena itu mereka mempunyai gagasan untuk membuka pendidikan perwira. Sementara itu pada tanggal 8 November 1945 mereka kedatangan serombongan tentara Inggris yang dipimpin oleh seorang kapten. Melalui juru bahasanya, rombongan menanyakan rumah H. Achmad Chairun. Kemal Idris atas persetujuan kawan-kawannya menjadi penunjuk jalan. Begitu rombongan tiba, H. Achmad Chairun beserta anak buahnya melarikan diri menyeberangi Kali Cisadane. Karena tidak berhasil menemui H. Achmad Chairun, rombongan meneruskan perjalanan ke Cipondoh kemudian kembali ke Jakarta.

Peristiwa tanggal 8 November 1945 itu menjadi sebab merosotnya wibawa H. Achmad Chairun di mata pengikutnya. Pada tanggal 14 Januari 1946 Resimen Tangerang mulai bertindak melaksanakan operasi penumpasan. TKR telah kehilangan kesabarannya karena; pertama, peristiwa penahanan Daan Yahya oleh anggota Laskar

Ubel-ubel di Gerendeng serta penculikan dan pemerkosaan terhadap keluarga salah seorang anggota Polisi Tentara Resimen Tangerang. Kedua, munculnya isu tentang rencana penyerbuan Pemerintah Dewan terhadap Markas Resimen Tangerang.

Operasi penumpasan berjalan lancar tanpa mendapat perlawanan berarti dari Pemerintahan Dewan Tangerang maupun Laskar Ubel ubel. Sumo Atmodjo dan Suwono yang dianggap aktor intelektual di belakang Pemerintahan Dewan Tangerang berhasil ditangkap. Polisi Tentara berhasil menangkap semua pimpinan gerombolan pengacau. Di dekat bendungan Sangego Tangerang, Usman, Lampung, Dulloh, Pande dan Moekri dieksekusi. Dari pemeriksaan terhadap anggota pasukan Ubel-ubel diketahui bahwa yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Otto Iskandardinata adalah Moekri, Pande dan Lampung. Selanjutnya dilakukan pula penangkapan para tokoh-tokoh Dewan seperti H. Achmad Chairun, Sjekh Abdullah, Haji Saalan, Abbas oleh Resimen Tangerang. Mereka dibawa ke Purwakarta, diserahkan kepada pengawasan Panglima Komandemen TKR Jawa Barat, Didi Kartasasmita.

Pemerintah baru dibentuk sesuai dengan struktur Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Untuk mengisi kekosongan aparat Pemerintah yang ada, didirikan Badan Pembantu Aparat Pemerintah (Bapera) yang anggotanya terdiri atas bekas pamong praja yang did...ulit oleh Pemerintah Dewan Tangerang ditambah dengan perwira-perwira Resimen VI dan siswa-siswa Militer Akademi Tangerang.

### **3. Peristiwa Tiga Daerah ( Oktober- Desember 1945)**

Di Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah, dari awal Oktober sampai dengan pertengahan Desember tahun 1945 timbul pergolakan dengan tujuan mengganti aparat pemerintah lama di tiga kabupaten yaitu Brebes, Pematang dan Tegal.

Latar belakang peristiwa ini adalah dampak dari masa pendudukan Jepang. Rakyat di daerah ini sangat menderita, akibat berbagai kewajiban, yang harus mereka laksanakan seperti wajib

setor padi, pengerahan tenaga romusha,<sup>11</sup> menanam, menjaga dan mencari tanaman wajib Qarak, iles-iles) untuk kepentingan perang, sedangkan penjatahan bahan pokok (beras, gula, minyak tanah, kain) tidak merata. Untuk memenuhi kepentingan perang ini, penguasa Jepang menggunakan dan memaksa aparat pemerintahan mulai dari para kepala desa sampai dengan para bupati. Mereka berperan sebagai pengawas jumlah setoran padi dari petani untuk memenuhi jatah setoran yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten. Mereka juga harus memenuhi jatah tenaga romusha yang jumlahnya sudah ditentukan pula. Apabila jatah ini tidak terpenuhi, mereka dikenakan sanksi atau hukuman atau dianggap sebagai mata-mata musuh.

Menjelang akhir tahun 1944 Karesidenan Pekalongan dilanda musim kemarau panjang. Akibatnya timbul paceklik (kekurangan bahan pangan). Sebagaimana di daerah-daerah lain rakyat terpaksa makan bekicot, bonggol pisang, dan daun-daun. Akibatnya berjangkit penyakit kurang gizi, sehingga tidak sedikit orang yang mati di pinggir-pinggir jalan karena sakit dan kelaparan. Dalam situasi seperti ini, rakyat menuduh aparat pemerintah sebagai penyebab terjadinya penderitaan. Perasaan tidak puas dan perasaan benci terhadap aparat pemerintah mulai berkembang dan akhirnya menimbulkan aksi-aksi revolusioner yang bertujuan menegakkan tatanan baru sebagai jalan keluar untuk mengatasi penderitaan. Kondisi yang demikian ini dipahami benar oleh kelompok komunis bawah tanah. Kelompok inilah yang menjadi penggerak aksi-aksi daulat yang telah memanfaatkannya untuk kepentingan komunis sendiri, yaitu membentuk negara-negara soviet.

Berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diterima di daerah ini disambut dengan gembira oleh masyarakat di Karesidenan Pekalongan. Namun para pejabat daerah bersikap ragu-ragu, bahkan ada yang menolak atau meyangkal secara terbuka

---

11. Romusha, tenaga kerja paksa yang dikerahkan dari desa-desa. Mereka mendapat sebutan yang indah : prajurit ekonomi.

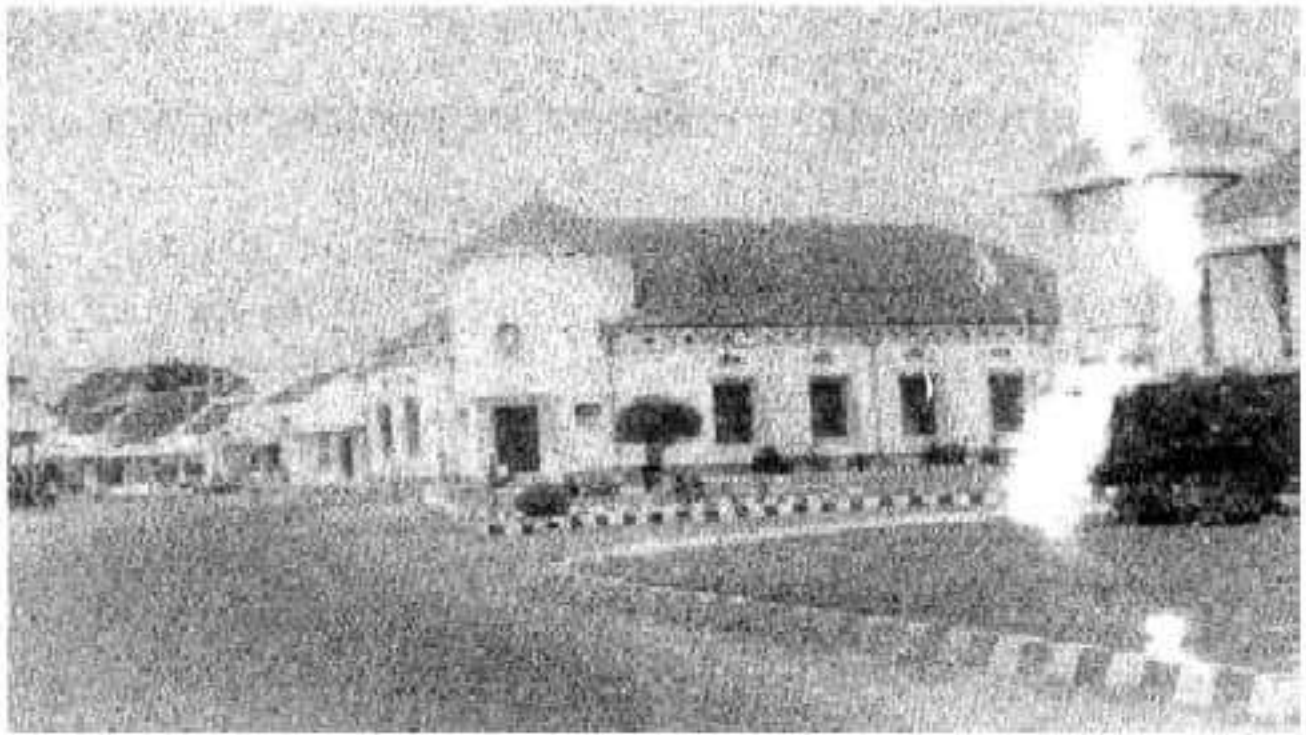
tentang keabsahan proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi kemerdekaan yang mereka terima secara tiba-tiba melahirkan dilema bagi para pejabat setempat. Sulit untuk menentukan sikap, karena pejabat sipil dan militer Jepang secara de facto masih berkuasa di karesidenan tersebut. Pernah terjadi perdebatan yang sengit mengenai masalah ini antara kelompok pemuda dan pejabat. Bahkan ada seorang bupati menyatakan, bahwa proklamasi belum berarti apabila penguasa Jepang di Karesidenan Pekalongan belum secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah republik setempat.<sup>12</sup>

Di sisi lain pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan sebagaimana yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik. Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Karesidenan Pekalongan terbentuk, yang disusul dengan pembentukan KNI kabupaten dan kotamadya. Peranan KNI adalah membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak. Di samping itu terbentuk pula Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dipimpin oleh Iskandar Idris, seorang bekas Daidanco Tentara Peta. Pada waktu yang hampir bersamaan, lahir pula badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) yang keduanya berideologi kiri dan Barisan Pelopor yang telah ada sejak jaman Jepang.

Pada tanggal 5 September 1945 pemerintah pusat di Jakarta mengangkat para bekas wakil residen (fuku syucokan) menjadi Residen Republik Indonesia. Akan tetapi pengangkatan Mr. Besar Mertokusumo sebagai Residen Pekalongan, ditunda karena kesetiannya terhadap RI masih diragukan. KNID Pekalongan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pengangkatan Mr. Besar sebagai residen segera direalisasi. Usul itu diterima oleh pemerintah. Secara definitif residen baru diangkat pada tanggal 21 September 1945.

---

12. Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah*, PT. Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 1989, hal. 96



*Balaikota Tega/1945 Sumber: Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi, Jakarta, 1989, hal. 131.*

Sementara di tingkat karesidenan sedang ditata pemerintahan baru, pada tanggal 8 Oktober 1945 terjadi insiden di Slawi, Tegal selatan. Seorang kepala desa diarak secara beramai-ramai, dipermalukan di depan umum dan kemudian dipaksa melepaskan jabatannya. Tanggal inilah yang dianggap sebagai awal Peristiwa Tiga Daerah. Peristiwa ini disusul oleh peristiwa yang sama melanda hampir semua kawasan pedesaan di Karesidenan Pekalongan. Gerakan yang dimulai dari desa menjalar ke kota, mula-mula kota kecamatan, kota kawedanan selanjutnya kota kabupaten. Seorang wedana, dan dua orang camat terbunuh. Beberapa kepala desa, pegawai dan polisi ikut jatuh jadi korban. Gelombang aksi massa tersebut melanda ibu kota Kabupaten Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk mencegah meluasnya aksi-aksi teror ini KNI kabupaten dan kota Tegal, mengutus dua orang anggotanya yaitu Maryono dan H. Ikhsan ke Slawi untuk mengadakan pendekatan dengan pimpinan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI).<sup>13</sup>

---

13. AMRI, pada Kongres Pemuda I tanggal 10 November 1945 di Yogyakarta bersama 6 organisasi pemuda lainnya, Angkatan Pemuda Indonesia (API), Gerakan Pemuda Republik Indonesia (Gerpi), Angkatan Muda Kereta Api (AMKA), Angkatan Muda Pos Telegraf Telepon (AMPTT) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) bergabung menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO).

Dalam pertemuan tersebut Suwignyo (pimpinan AMRI) menyatakan bahwa ia ingin mengganti pemerintahan dengan pemerintahan rakyat, dan meminta agar BKR tidak menerima bekas anggota tentara Peta dan heiho karena mereka pernah membantu pemerintah fasis. Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh kader-kader PKI bawah tanah. Suwignyo yang menjadi pimpinannya adalah seorang anggota PKI dan pernah dibuang ke Digul akibat peristiwa PKI 1926. Utusan KNI Tegal ini, oleh Sakirman, salah seorang pimpinan AMRI Slawi, dibawa ke pabrik gula Pagongan. Maryono dan H. Ikhsan ditahan di pabrik gula tersebut. Selanjutnya mereka digiring ke markas AMRI Talang, dan dibunuh oleh Kutil, pimpinan AMRI Talang yang juga seorang lenggaong (Jawara) terkenal dari Talang.



*Markas Kutil di Bank Rakyat, Talang, Tegal.*

*Sumber: Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi, Jakarta, 1989, hal. 131.*

Sejak peristiwa itu, aksi teror AMRI merajalela. Para kepala desa di kecamatan Pangkah banyak yang dibunuh. Oleh karena telah merasa mendapat dukungan dari rakyat, mereka merencanakan menyerbu Tegal untuk mengambil alih kekuasaan. Dalam suatu rapatnya tanggal 3 November 1945 yang dipimpin oleh Sakirman, AMRI

memutuskan semua pamong praja harus diperiksa dan diserahkan kepada rakyat untuk diadili, TKR hams dilucuti, dan organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang mempakan saingan AMRI Slawi hams disingkirkan karena melindungi residen dan pamong praja. Untuk semuanya itu, kota Tegal hams direbut dan diduduki.

Sedangkan dalam rencana merebut kota Tegal telah ditetapkan langkah-langkah, seperti<sup>14</sup> membuat rintangan dijalan-jalan untuk mencegah pamong praja melarikan diri, semua kendaraan dan dokar, hams dihentikan, sedang pengemudi dan penumpangnya ditahan, TKR di Adiwerna, Slawi, Balapulang, harus dilucuti dan ditahan. Para anggotanya ditahan dan senjatanya digunakan untuk melakukan serangan umum ke kota Tegal, dan rakyat hams segera berkumpul di pinggir kota dengan membawa senjata hasil rampasan dari TKR serta siap menunggu perintah lebih lanjut serta sasaran yang diserbu adalah kabupaten, dan asrama Batalyon TKR.

Pada tangga 14 November 1945, pasukan AMRI yang dipimpin oleh Sakirman telah berada di pinggir kota Tegal,<sup>15</sup> Ketika mereka menyerbu asrama TKR, pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan. Hanya barisan penyerbu bersenjata yang ditembak oleh TKR, sehingga jatuh korban. Para penyerbu yang hanya bersenjata bambu runcing dihalau dengan tembakan-tembakan yang tidak diarahkan ke sasaran. Sebagian dari mereka bergerak ke kabupaten untuk mencari bupati. Bupati Sunarjo telah menyelamatkan diri, namun keluarganya dianiaya. Istri, ibu dan cucu bupati dipaksa memakai kain dari karung lalu diarak keliling kota. Beberapa tokoh yang termasuk dalam daftar mereka, ditangkap dan dibawa ke Talang, kemudian dibunuh. Mereka menuntut para pamong praja, termasuk bupati dan residen, supaya diadili.

---

14. Anton E. Lucas, *op. cit.*, hal. 209- 210

15. Sakirman sebetulnya adalah seorang bangsawan dari Yogya yang pernah menjadi pegawai jawatan kesehatan dan ditugaskan di Slawi. Sejak itu ia menjadi seorang yang bersikap radikal.

Pimpinan KNI berupaya mencegah tindakan mereka lebih lanjut. Dalam sidang darurat pimpinan KNI memutuskan untuk meminta kepada Komandan Batalyon TKR agar mengeluarkan pernyataan bahwa TKR bukanlah tentara pembela bupati dan pamong praja. Akhirnya komandan TKR membacakan pernyataan di alun-alun Tegal. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, setelah mendengar laporan mengenai peristiwa Tiga Daerah mengirim utusan yang bertindak sebagai wakil untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Yang ditunjuk adalah Sayuti Melik, seorang wartawan dan tokoh pergerakan (pengetik teks proklamasi). Kedatangannya di Pekalongan dan Tegal disambut dingin oleh kelompok AMRI. Ia tidak disukai karena sudah digolongkan sebagai pengikut Tan Malaka. Ia dianggap sebagai orang yang akan menghentikan revolusi. Oleh karena itu pimpinan AMRI Slawi, Suwignyo dan Sakirman sepakat untuk menghalang-halangi dan menghentikan aktivitas Sayuti Melik, dengan cara memblokir semua jalan untuk mencegah Sayuti Melik keluar dari daerah Pekalongan.

Upaya lain untuk mencegah terjadinya teror AMRI datang dari TKR. Komandan Resimen Pekalongan, Kolonel Iskandar Idris, pada tanggal 4 November 1945 beberapa saat sebelum serangan dimulai, pergi ke Markas AMRI Talang untuk menemui Sachyani alias Kutil. Ia didampingi oleh Sayuti Melik dan KH. Basri seorang ulama yang berpengaruh di Tegal. Maksudnya untuk mengadakan pendekatan pribadi dengan Kutil pemimpin AMRI Talang yang terkenal ganas, agar Kutil dan pasukannya tidak melibatkan diri dalam pergolakan. Di tengah perjalanan kendaraan yang mereka tumpangi dicegat dan mereka ditahan. Mereka tidak dibawa ke Talang tapi ke Markas AMRI Slawi dan ditahan di sana. Suwignyo pimpinan AMRI Slawi mengenali Sayuti Melik dan juga anggota rombongannya. Ia meminta agar TKR ditarik ke luar dari wilayah Tiga Daerah. Sebagai sandera, Kolonel Iskandar Idris ditahan di Slawi, tetapi tidak di rumah tahanan.

Akibat peristiwa ini Residen Pekalongan Mr. Besar Mertokusumo diganti dengan Suprpto sebagai pejabat Residen. Demikian pula dengan Bupati Tegal, digantikan oleh KH. Abu Sujai seorang kyai yang amat berpengaruh di Tegal Selatan. Pada tanggal 6 November 1945 Bupati Abu Sujai diperkenalkan di depan massa di alun-alun Tegal. Rakyat setuju dan puas. Untuk sementara pergolakan mereda.

Sejalan dengan perubahan peranan KNI Pusat di Jakarta, sesudah kelompok sosialis memperoleh kemenangan dengan mendirikan Badan Pekerja KNI Pusat (BP KNIP), maka pengaruhnya dirasakan pula di daerah-daerah. Di Tiga Daerah perubahan peranan KNIP ini dinilai sebagai kemenangan kaum sosialis terhadap pengikut fasis. Dan mulailah dibentuk Badan Pekerja (BP) pada KNI Daerah. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh sisa-sisa komunis. K. Mijaya diangkat sebagai ketua BP dan Moh. Saleh sebagai sekretarisnya. K Mijaya adalah seorang tokoh komunis bawah tanah yang sangat berpengalaman. Pada akhir tahun 30-an di Surabaya, K. Mijaya dan Widarta merupakan kelompok kader kader komunis yang dipersiapkan untuk melawan fasisme sesuai dengan garis Stalin. Mereka membentuk jaringan di beberapa kota di pantai utara Pulau Jawa. Pada masa pendudukan Jepang jaringan diperluas antara lain di Lasem, Blitar, dan Pemalang. Meskipun dengan jaringan lokal yang terbatas, mereka berhasil merancang suatu Soviet di Karesidenan Pekalongan.

Razia Kempeitai (Polisi Militer Jepang) pada pertengahan tahun 1944 di Jawa Timur dan Jawa Tengah berhasil menghancurkan sel sel bawah tanah di beberapa kota. Namun basis gerakan bawah tanah Karesidenan Pekalongan tetap utuh, yaitu di daerah hutan jati Sukowati di Pemalang Selatan, berkat lindungan Holle seorang mantri hutan yang bersimpati kepada komunis. Kelompok bawah tanah lainnya yang aktif di Pemalang, berada di bawah pimpinan Amir, seorang anggota PKI yang pernah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena terlibat pergolakan PKI 1926.

Pada kesempatan ini API diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) Cabang Pemalang. Widarta yang muncul di Pemalang ini adalah anggota PKI bawah tanah. Ia bersama K. Mijaya dan Bung Kecil merupakan kelompok inti gerakan komunis bawah tanah. Kelompok lainnya di Pemalang berada di bawah pimpinan Amir. Setelah proklamasi, Widarta pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Mr. Amir Sjarifuddin dalam rangka melakukan konsultasi. Sekalipun PKI bawah tanah yang pada masa pendudukan Jepang ruang gerakanya sempit, namun sejak bulan Agustus 1945 mereka mulai bergerak. Dalam rapatnya di Sukowati diputuskan membentuk Front Persatuan. Strategi front persatuan inilah yang menjadi pedoman kerja bagi para kadernya, yang dilaksanakan lewat organisasi-organisasi atau badan-badan perjuangan yang telah ada secara bertahap. Tugas para kader harus membentuk kelompok baru. Prakarsa dan pimpinan harus berada di tangan para kader.

Ketika KNI Pemalang dan Tegal tidak aktif lagi, maka K. Mijaya dan kawan-kawannya melaksanakan strategi front persatuan tahap kedua di Karesidenan Pekalongan. Pergolakan dan aksi daulat (yang didalangi oleh PKI) adalah tahap pertama dari strategi Front Persatuan ini. Pada tahap ini para pemimpin PKI bawah tanah mulai muncul ke permukaan tanpa menunjukkan identitasnya. Yang pertama kali muncul adalah K. Mijaya. Pada tahap kedua ia muncul melalui Badan Pekerja KNI (BP KNI). Tugasnya secara bertahap menguasai jalannya pemerintahan. BP KNI dijadikan alat untuk merebut kekuasaan secara diam-diam (*silent coup*) dengan mendiktekan kemauannya kepada para pejabat pemerintahan serta menunjuk pejabat-pejabat daerah yang baru. Tahap ketiga adalah membentuk Front Persatuan secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas K. Mijaya. Ia melaksanakan strategi front persatuannya dengan organisasi yang bernama Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D). Organisasi ini dibentuk pada tanggal 16 November 1945. Tujuan yang tidak diumumkan adalah memperkuat persatuan buruh, tani, dan tentara untuk menuju "masyarakat sosialis". Tujuan ini sejalan dengan tujuan Partai Sosialis Indonesia

Di Brebes tindak kekerasan dimulai di Kawedanan Tanjung. Sasarannya adalah orang-orang Cina dan Indo-Belanda. Orang-orang Indo-Belanda yang menjadi korban ialah mereka yang tinggal di sekitar pabrik gula di kabupaten tersebut toko-toko dan penggilingan padi milik Cina dirampas dan diambil alih. Orang-orang Indo-Belanda yang pada umumnya adalah teknisi pabrik gula dan dipandang sebagai penduduk asing yang pernah memperoleh kedudukan ekonomi dengan hak-hak istimewa, dibunuh. Di sisi lain, tindakan itu dimaksud sebagai balasan terhadap teror Belanda terhadap rakyat Jakarta. Puncak kekejaman mereka terjadi pada pertengahan Oktober 1945. Lebih dari seratus orang Indo-Belanda, Ambon, Manado dibunuh di Tegal dan Brebes karena dianggap "pro NICA" atau "mengkhianati revolusi nasional". Tiga tokoh terpenting di Brebes yakni bupati, patih dan wedana, diculik. Mereka diangkut ke Tegal dan ditawan di sana selama dua bulan.

Berbeda dengan kota kabupaten lain, di Pemalang pada awalnya keadaan cukup tenang. Oleh karena sampai bulan Oktober 1945 keadaan masih tenang, maka salah seorang anggota gerakan bawah tanah komunis yakni Tan Djiem Kwan, pada pertengahan Oktober 1945 memanggil pulang Amir, seorang tokoh komunis bawah tanah Pemalang. Amir ketika itu berada di Jakarta. Ia diharapkan dapat mengkoordinasi gerakan, maksudnya membuat pergolakan rakyat untuk menentang pamong praja. Amir pulang ke Pemalang tanggal 15 Oktober 1945 bersama Widarta.

Dalam rapat umum di Pemalang yang diselenggarakan oleh Badan Perjuangan pada tanggal 20 Oktober 1945 Supangat yang sebelumnya adalah pemimpin Angkatan Pemuda Indonesia (API), diangkat sebagai bupati. Rapat itu digunakan sebagai tempat propaganda. Supangat berbicara bersama Widarta dan S. Mustapa mengingatkan pentingnya memperkuat serta mengkonsolidasi kekuatan pemuda dan rakyat menghadapi Belanda. Pada kesempatan ini Widarta menjelaskan tentang "kedaulatan rakyat" yang jika dilaksanakan dengan tepat akan mewujudkan kebahagiaan rakyat.

(Parsi) yang dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan pemerintah daerah.

Adapun susunan pimpinan GBP3D meliputi: Ketua, K.Mijaya (pemimpin komunis bawah tanah PKI 1935) dan Sekretaris, Suwignyo (PKI-1926 Digulis), sedangkan untuk masing-masing kabupaten dipimpin oleh Slamet (PKI-1926) untuk Brebes, Sakirman untuk Tegal dan Pemalang dipimpin oleh Amir (PKI-1926).

Mereka selanjutnya mengadakan rapat-rapat. Rapat yang ketiga diadakan di Brebes pada tanggal 25 November 1945.

Rapat dipimpin oleh K. Mijaya yang dihadiri oleh Moh. Nuh (Ketua Barisan Pelopor, PKI 1926), Widarta, Tan Jiem Kwan, Suwignyo, dan Amir. Dalam rapat ini diambil beberapa keputusan, antara lain: menguasai badan-badan perjuangan kabupaten kabupaten untuk kepentingan Tiga Daerah, mendirikan TKR sendiri, dan Mengganti residen Pekalongan, dimana calon residen diputuskan Sardjito, serta AMRI akan membentuk Parsi, Barisan Pelopor akan menjadi anggotanya.

Untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut, GBP3D mengajukan ultimatum kepada pemerintah daerah Pekalongan, TKR, Polisi, Barisan Pelopor dan badan-badan perjuangan di kabupaten dan kota Pekalongan, supaya daerah Pekalongan tetap menjadi satu karesidenan yang berfaham dan berideologi satu dengan cara:

1. Secepat mungkin mengangkat Sardjito dari Purworejo menjadi Residen Pekalongan
2. Mengganti kepala-kepala pamong praja, kepala-kepala jawatan lain berdasarkan kedaulatan rakyat.

Jika dalam tempo tiga hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 1945 GBP3D belum menerima kesediaan dari pemerintahan Kabupaten Pekalongan, maka GBP3D dan "rakyat Pekalongan yang sealiran dengan mereka" akan terpaksa menentukan sikap. Ultimatum ini dibuat di markas AMRI Tegal Selatan tiga hari

setelah itu GBP3D menyampaikan surat kepada pejabat Residen Pekalongan, agar segera : menyerahkan pemerintahan Karesidenan Pekalongan kepada “rakyat”, Sardjio diangkat sebagai Residen, pimpinan pemerintahan harus disesuaikan dengan susunan pemerintahan Tiga Daerah, semua pekerja yang bertalian dengan politik, sosial, dan ekonomi, diserahkan kepada staf Tiga Daerah pada tanggal 10 Desember 1945, dan para pamong praja yang telah meletakkan jabatannya dilarang meninggalkan tempat.<sup>16</sup>

Pada tanggal 9 Desember 1945 di Pekalongan terjadi penyerahan kekuasaan kepada staf pengoperan, dan Sardjio diangkat menjadi residen. Pada tanggal 12 Desember 1945, dalam rapat umum diperkenalkanlah Sardjio, seorang anggota PKI bawah tanah kepada rakyat setempat. Suasana politik mengalami perubahan dramatis, ketika K. Mijaya dalam pidatonya mengatakan bahwa pemuda Islam Pekalongan dianggap kurang revolusioner.

Ucapan tersebut dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kelompok-kelompok Islam. Dengan dipelopori para pemuda Islam Pekajangan, mereka mengadakan demonstrasi menentang Front Persatuan. Pada tanggal 14 Desember 1945, Residen Sardjw bersama K. Mijaya (Ketua Front Persatuan) serta beberapa stafnya disergap di Pekajangan oleh TKR ketika mereka sedang dalam perjalanan mendatangi kecamatan-kecamatan bagian selatan.

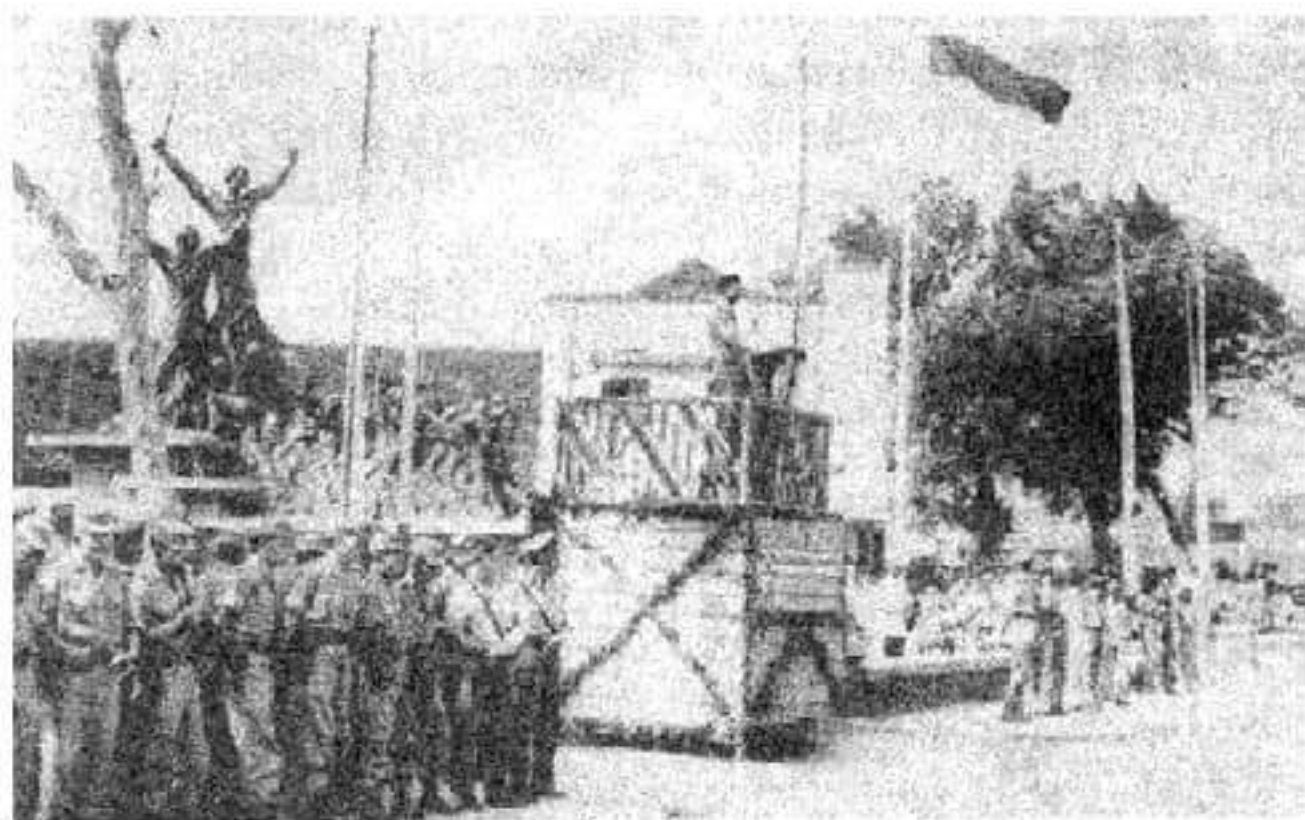
TKR di bawah pimpinan Komandan Resimen XVII, Wadyono-semula berpendirian tidak berkeinginan mencampuri urusan pemerintahan karesidenan. Tetapi ternyata kondisi waktu itu mengharuskan TKR segera mengambil sikap. Tindakannya ini diawali oleh kejengkelan para perwira staf kepada Residen Sardjio yang menempatkan para pengawal Tiga Daerah di seluruh karesidenan. Tindakan itu dinilai oleh komandan TKR bahwa Sardjio tidak mempercayai TKR. Kekerusuhan ini semakin diperuncing oleh terjadinya penggeledahan terhadap kendaraan yang meninggalkan kota, lebih-lebih ketika kereta api yang membawa perbekalan untuk

---

16. Anton E. Lucas, *op cit*, hal. 318

front Semarang dihentikan. Pada waktu itu dalam kondisi perang dengan Inggris di Semarang, maka penghentian suplai tersebut menjadi faktor penghambat. Selain itu pada tanggal 17 Desember 1945 terdengar pula berita bahwa pemerintah baru Pekalongan berniat melucuti TKR.

Tiga hari setelah penangkapan residen reaksi kontra terhadap Tiga Daerah semakin nyata dengan tersiarnya desas-desus adanya serangan dari pihak Tiga Daerah. TKR bersama kalangan Islam di Pekalongan menyusun rencana operasi kontra yang berpedoman lebih baik menyerang daripada diserang.



*Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945 di Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1964 (Sumber: Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi, Jakarta, 1989, hal. 130.*

Gabungan penyerang tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan strategi memasuki Tiga Daerah dari dua jurusan, di bawah pimpinan perwira TKR bekas Peta, Sugiyono dan Mukhlis. Sugiyono ini adalah bekas shodancho dari Daidan Tegal, sedang Mukhlis adalah bekas shodancho Daidan Pekalongan.

TKR menemukan perlawanan hanya di Sragi dan Comal. Dalam hal ini TKR memusatkan operasinya terhadap penangkapan para pemimpin Tiga Daerah dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan terhadap pendukungnya, sebelum mereka diijinkan pulang ke rumah masing-masing.

#### **4. Peristiwa Bojonegoro, September 1945-Juli 1947**

Bojonegoro adalah salah satu Karesidenan di pantai utara Jawa-Timur yang berbatasan dengan karesidenan Jepara Rembang, Jawa Tengah. Pada tanggal 18 Agustus berita tentang Proklamasi Kemerdekaan telah diterima di Bojonegoro, Seperti di daerah-daerah lain di Jawa Timur para pejabat karesidenan meragukan kebenaran berita tersebut. Sebaliknya para pemuda dan tokoh pergerakan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Karesidenan Bojonegoro yang beranggotakan 37 orang sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Pada tanggal 2 September 1945 KNI di kabupaten kabupaten mulai dibentuk. Begitu pula KNI di kawedanan-kawedanan dan kecamatan-kecamatan.

Selanjutnya pada tanggal 22 September 1945 KNI Daerah mengadakan pertemuan. KNI Kabupaten Lamongan yang dipelopori oleh Mr. Boedisoesetyo mengajukan mosi yang berisi desakan kepada residen agar daerah Bojonegoro segera diproklamasikan sebagai karesidenan yang menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Desakan yang keras ini akhirnya mendapat tanggapan dari R.M.T.A. Soeryo.

Pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB tanggal 24 September 1945, ratusan pemuda AMRI dan PRI telah membanjiri halaman karesidenan. Mereka mendesak sekali lagi agar residen menandatangani kesanggupan tersebut. Sesudah itu mereka membawa residen ke alun-alun untuk mengumumkan proklamasi sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

17. Kementerian Penerangan, Republik Indonesia, *Provinsi Djawa Timur*, Surabaya, 1953, hal. 41-42

## PROKLAMASI

Berdasarkan Proklamasi Indonesia Merdeka P.J.M. Soekarno dan P.J.M. Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama seluruh rakyat Daerah Karesidenan Bojonegoro dari segala lapisan, pada hari ini : Senen Wage 24 September 1945 meresmikan pernyataan telah berdirinya Pemerintah Republik Indonesia Daerah Karesidenan Bojonegoro, dan terus mengadakan tindakan-tindakan seperlunya.

Kepada seluruh rakyat kami serukan supaya tetap tinggal tenang dan tenteram melakukan kewajibannya masing-masing.

Bojonegoro, 24 September 1945

R.M.T.A. Soeryo

Tindakan berikutnya, di akhir bulan September 1945 KNI Daerah bersidang yang dihadiri seorang anggota KNI Pusat, yaitu Boedi Soetjitra. 18 Sidang tersebut menghasilkan pembentukan pimpinan KNI baru, yang tersusun sebagai berikut : Ketua, Soetardjo; Sekretaris, Abdul Soekiman; Ketua bagian Organisasi, Dr. Dadi; Ketua bagian Usaha, Soedamadi; Ketua bagian Penerangan, Moh. Said; Ketua bagian Khusus, Soemantri (Lamongan) dan Mr. Boedisoesetyo; Pembantu Umum, Koesno dan Soedirman

Sementara itu terjadi pergantian pejabat. Residen Bojonegoro R.M.T.A. Soeryo diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober 1945. Pengurus baru KNI dan Angkatan Muda "mendesak" kepada Residen Soeryo agar segera menduduki jabatannya di Surabaya, sekalipun belum mendapat surat keputusan. Kemudian mereka beramai-ramai mengantar residen sampai di perbatasan Karesidenan Bojonegoro. Sebelumnya residen telah menunjuk Utomo, Bupati Bojonegoro, sebagai Wakil Residen. Penunjukan ini tidak disetujui oleh KNI. Akibatnya timbul kekosongan jabatan wakil residen. Atas persetujuan KNI diangkat Mr. Boedisoesetyo

---

18. Pada tahun 1946 Boedi Soetjitra, (Prof. Mr. Boedi Soetjitra) anggota KNIP dan Partai Sosialis, menurut Anton E. Lucas, datang ke Bojonegoro atas perintah Bung Hatta untuk menyaksikan baltawa KNI dan Residen Hindromartono melaksanakan instruksi Hatta. Keterangan ini perlu diragukan, yang paling mungkin adalah utusan Mr. Amir Sjarifuddin atau Syahrir, lihat Anton E. Lucas, *op.cit.*, hal. 310

sebagai wakil residen. Pengangkatan ini tetap tidak memuaskan pemuda sebab mereka tidak pernah percaya kepada pamong praja. Seperti di daerah-daerah lain pamong praja dianggap sebagai alat pemerintah fasis Jepang yang tidak jujur. Hampir bersamaan waktunya dengan peristiwa di Tiga Daerah, pemuda-pemuda di Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah pamong praja mulai dari bupati sampai asisten wedana (camat) dan anggota pemerintahan lainnya. Mereka ingin mengetahui orang-orang yang tidak jujur, terutama yang tersangkut dalam perkara pembagian bahan makanan kepada rakyat.

KNI yang telah mendapat pengaruh dari Mr. Amir Sjarifuddin melalui utusannya, yaitu Boedi Soetjito, kemudian memilih sendiri Residen Bojonegoro. Yang dipilih adalah Mr. Hindromartono seorang komunis yang menjabat pula sebagai Ketua Perhimpunan Pegawai Spoor dan Trem (PPST). Pada 1941 ia bergabung dengan kelompok gerakan bawah tanah yakni Gerakan Anti Fasis (Geraf). Pimpinan Geraf terdiri atas Mr. Amir Sjarifuddin, Pamudji, Sukayat, Armunanto dan Widarta. Kelompok ini disebut kelompok Surabaya. Setelah proklamasi ia bergabung kembali dengan Mr. Amir Sjarifuddin dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang didirikan pada 12 November 1945. Ia duduk sebagai anggota DPP. Selain itu ia juga menjadi anggota BP KNIP.

Pada tanggal 17 November 1945 Mr. Hindromartono dilantik secara resmi sebagai Residen Bojonegoro yang baru. Di bawah Residen Hindromartono diadakan perubahan-perubahan radikal. Residen memperkenalkan panggilan yang demokratis untuk forum resmi. Sebutan "Tuan-Tuan", diganti dengan "Saudara saudara", suatu kata yang waktu itu terdengar aneh dan belum lazim digunakan. Penghapusan bahasa penghormatan merupakan salah satu obsesi kaum komunis yang ingin menumbangkan sistem kekuasaan dan hirarki birokrasi.<sup>19</sup> Residen kemudian mengambil alih pimpinan KNI. Situasi Bojonegoro masih diliputi pergolakan.

---

19. *Ibid*, hal. 190-191

Banyak gedung resmi ditinggalkan oleh pejabatnya. Penggeledahan penggeledahan terhadap orang-orang yang dicurigai oleh pemuda semakin merajalela.

Untuk mengatasi pergolakan yang makin bertambah luas ini, KNI Daerah Bojonegoro yang diketuai oleh residen sendiri bersama wakil-wakil KNI dari tiga kabupaten mengadakan rapat. Sebagai keputusan rapat diterbitkan Surat Keputusan Residen Bojonegoro tertanggal 15 Desember 1945. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan "Peraturan Perubahan Pemerintah Daerah Karesidenan Bojonegoro" atau Peraturan Susunan Pemerintahan. Mengenai pelaksanaannya, disusun pula berbagai peraturan, antara lain "Maklumat Pimpinan Pemerintah Komisaris Bojonegoro No.1 tertanggal 16 Desember 1945".<sup>20</sup>

Peraturan-peraturan residen mulai dilaksanakan sejak Februari 1946, adalah mengubah susunan dan cara-cara pemerintahan secara mendesak yang hanya berlaku di seluruh Karesidenan Bojonegoro. Dalam hal ini Residen Hindromartono ingin memberikan kepuasan pada rakyat Bojonegoro, yang sejak permulaan revolusi selalu kurang mempercayai pamong praja. Hal tersebut merupakan suatu taktik untuk mencari pengakuan rakyat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Lebih lanjut ia ingin melepaskan diri dari pemerintahan pusat dan pada akhirnya menuju pada pembentukan pemerintahan komunisme. Dalam mengawali kegiatan pemerintahannya, Mr. Hindromartono melakukan perombakan dengan menciptakan istilah-istilah baru. Sebagai contohnya : Karesidenan diganti menjadi Komisaris, Residen diganti menjadi Komisaris, Bupati menjadi Kepala Bagian, dan Asisten Wedana menjadi Opsiter.

Peraturan Residen juga memuat pasal-pasal yang bermaksud mengatur jawatan-jawatan dalam Daerah Komisaris Bojonegoro antara lain "Poatoesan Residen Bojonegoro tertanggal 15 Desember

---

20. Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Provinsi Djawa Timur, *Op.Cit*, hal. 45'

1945". Semetara itu sebagai pemimpin dari bagian atau jawatan ini diserahkan kepada bupati, wedana dan asisten wedana.

Gubernur Jawa Timur tidak menyetujui perubahan perubahan yang dilakukan oleh Mr. Hindromartono. Gubernur menegurnya dan memberi ultimatum kepada Pemerintah Karesidenan Bojonegoro, agar dalam waktu satu bulan semua peraturan dikembalikan seperti semula. Sebagai jawabannya, Residen Bojonegoro menyatakan menolak ultimatum gubernur. Ia membangkang melaksanakan ultimatum, karena komisariss tidak berada di bawah gubernur, bahkan ia tidak mengakui Gubernur Jawa Timur sebagai atasannya. Dalam peristiwa ini Mr. Hindromartono malahan mendapat dukungan dari KNI yang telah dikuasainya.

Usaha Mr. Hindromartono untuk merebut kekuasaan di Bojonegoro ini ternyata mengalami kegagalan. Perubahan nama yang diciptakannya membawa kesulitan ketika mengadakan hubungan dengan instansi lain. Cap (stempel) komisariss Bojonegoro tidak dikenal oleh Kantor Kas Negara dan menolak membayarkan gaji pegawai. Akibatnya timbul kelambatan dalam pembayaran gaji pegawai.

Melihat kenyataan ini, sikap Mr. Hindromartono melunak, dengan menentukan bahwa sebutan "komisariss" tetap berlaku, tetapi untuk hal-hal yang bersifat resmi seperti cap, dan sebagainya, istilah residen dipakai kembali. Mengenai sistem pilihan tetap dilanjutkan. Sebutan bupati, wedana dan asisten wedana dikembalikan pula seperti semula. Kasus Bojonegoro ini dapat dikategorikan sebagai upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan dari atas. Karena Mr. Hindromartono telah melakukan penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pada akhir tahun 1946 ia diperiksa oleh sebuah tim pemeriksa, yang terdiri atas Menteri Muda Dalam Negeri Wijono, dan Mr. Hamdani dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akhirnya pada bulan Januari 1947 Mr. Hindromartono dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Ia tidak dipersalahkan, bahkan sejak bulan Juli 1947 ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Kepolisian dalam Kabinet Amir Sjarifuddin.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Mr. Hindromartono yang telah melakukan pengambilalihan pemerintahan dan mendirikan pemerintahan bebas di Bojonegoro, ternyata sangat ringan. Sebabnya ialah sebagian anggota tim pemeriksa adalah orang yang sealiran dengan Mr. Hindromartono. Wijono adalah teman Mr. Hindromartono dalam Partai Sosialis. Mr. Amir Sjarifuddin yang ketika itu menjadi Menteri Pertahanan, juga teman Mr. Hindromartono dalam partai yang sama. Oleh karena itu pendaulatan yang dilakukan dari atas ini merupakan salah satu pelaksanaan strategis serta taktik komunis dalam usahanya menanamkan kekuasaan.

### **5. Peristiwa Cirebon (November 1945-Februari 1946)**

Pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang memperbolehkan didirikannya partai-partai politik. Setelah maklumat itu dikeluarkan, lahirlah partai-partai politik baik yang sama sekali baru maupun yang sudah pernah ada pada masa sebelum pendudukan Jepang. Salah satu di antaranya adalah PKI di bawah pimpinan Mr. Mohammad Joesoeph dan Mr. Suprpto yang lahir pada tanggal 7 November 1945. Mr. Mohammad Joesoeph adalah salah seorang bekas pimpinan Gerindo di Bandung pada tahun 1942. Ia tinggal di Cirebon. Di samping menjalankan profesinya sebagai pengacara (advokat), ia menjabat pula sebagai Ketua Persatuan Supir Indonesia (PERSI). Ia kemudian berkenalan dengan Mr. Suprpto. Hubungan mereka semakin akrab, sehingga keduanya kemudian bergabung dengan PKI bawah tanah. Pada jaman pendudukan Jepang ia memimpin kelompok komunis bawah tanah yang bernama "Djojobojo" yang berpusat di Bandung. Ketika menjadi salah seorang siswa Asrama Indonesia Merdeka Jakarta, ia berhasil membentuk sel PKI bersama-sama dengan Mr. Suprpto. Untuk memperoleh simpati rakyat, ia memanfaatkan profesi advokat-nya dengan cara memberikan bantuan hukum bagi rakyat

<sup>21</sup>Ia kemudian tertangkap dan ditahan di rumah tahanan Kempeitai Jakarta. Setelah proklamasi ia dibebaskan. Bersama Ce Mamat, dan Atmadji, mereka berjanji akan membuat gerakan di daerah masing-masing.

Pada tanggal 17 November 1945 kelompok Mohammad Joesoeph memunculkan PKI ke permukaan secara legal, sekalipun tidak disetujui oleh kelompok lain. Pemunculan PKI ditandai dengan terbentuknya Markas Besar PKI yang berkedudukan di Jakarta. Susunan pengurus Markas Besar PKI adalah sebagai berikut: Ketua, Mr. Mohammad Joesoeph; Sekretaris I, Mr. Suprpto;<sup>22</sup> Sekretaris II/Bendahara, Mohammad Sain, W. Aryo, Hamid Sutan, E. Cordian, D. Totong dan Mr. Sutan Mohammad Syah; Ketua Badan Pendidikan, Mr. Sutan Mohammad Syah; dan Ketua Pers dan Penyajian, Hamid Parpatih, dengan anggota, Buyung Saleh Puradisastra,<sup>23</sup> dan E. Cordian.

Markas Besar PKI memperluas cabangnya antara lain di Sukabumi, Solo, Pekalongan, Madiun, Malang, Surabaya. Sebagai organ partai diterbitkan majalah *Bintang Merah*. Pada tanggal 11 Desember 1945 dibentuk Laskar Merah. Selama satu bulan pada bulan Januari 1946, diselenggarakan latihan bersama Laskar Merah dari berbagai daerah di Solo. Dalam latihan ini para peserta diajarkan keterampilan kemiliteran dan ideologi komunis. Lima hari setelah terbentuk, pimpinan PKI menyusun suatu program perjuangannya, yaitu: *pertama*, PKI akan terus berjuang untuk mencapai kebebasan organisasi dari kelas buruh dan petani, *kedua*, PKI akan terus meningkatkan pertentangan kelas, antara kelas petani buruh melawan kelas petani borjuis (pemilik modal), *ketiga*, menyita dengan segera semua pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan, *keempat*,

---

21. Soeranto Soetanto, *Pemberontakan PKI Mr. Moh. Joesoeph Tahun 1946 di Cirebon*, Skripsi (sebagai syarat mencapai gelar Sarjana FSUI), 1981, hal 73

22. Pernah menjadi pembela BTL dalam perkara pembunuhan Pelda Sudjono di Bandar Estsi 1965, terlibat G.30 S/PKI.

23. Penyair dan Curu Besar Bahasa Indonesia, tokoh Baperki, terlibat G. 30.S/PKI. Terakhir menggunakan nama Saleh Imam Poeradisastra.

semua tanah harus di tangan petani yang diorganisir ke dalam soviet-soviet yang terdiri dari wakil-wakil rakyat, dan *kelima*, merasionalisasi semua tanah.

Suasana politik yang tidak stabil, karena terjadi pertentangan antara golongan moderat dengan golongan revolusioner mengenai cara untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, dimanfaatkan oleh PKI untuk menguasai kondisi sosial politik. Pada kesempatan tersebut orang-orang komunis anak buah Joesoeph menyusun rencana pengambilan kekuasaan daerah. Mereka memilih Cirebon sebagai daerah sasarannya, berdasarkan kesepakatan pertengahan Oktober 1945 bahwa Cirebon dijadikan daerah aksi berikutnya. Mr. Joesoeph pernah bekerja sebagai pengacara di kota ini dan dalam pekerjaannya sering menimbulkan kesan membela rakyat. Pada setiap acara pertemuan ia selalu memberikan janji-janji muluk, seperti akan membagi-bagi tanah kepada rakyat. Dengan cara tersebut rakyat Cirebon diharapkan dapat menjadi massa potensial guna mendukung rencananya. Selain kondisi sosial-politik yang telah dikuasai, juga janji-janji muluk dipropagandakan, dengan tema pembagian tanah untuk petani. Semua ini merupakan faktor penentu untuk memperoleh simpati dari rakyat Cirebon.

Meskipun demikian untuk melaksanakan suatu pemberontakan mereka menyadari bahwa PKI di Cirebon belum merasa kuat. Oleh karena itu didatangkanlah berbagai kesatuan Laskar Merah dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan dalih menghadiri konferensi agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Pada tanggal 21 Januari 1946 di gedung Laskar Merah Cirebon berlangsung rapat pembentukan barisan penerima tamu yang diketuai oleh M. Ronggo, pemimpin PKI setempat.

Anggota Laskar Merah dari daerah-daerah lain yang dipusatkan di Hotel Reebrinck mulai membuat keonaran. Tingkah laku yang kasar terhadap masyarakat seperti tidak mau membayar makan di warung-warung, minta rokok secara paksa di pabrik rokok BAT, memancing keributan. Dalam rangka konferensi, diadakan pawai

keliling kota. Dalam pawai mereka mengenakan topi putih yang diikat pita merah serta masing-masing membawa berbagai senjata sambil meneriakkan yel-yel Soviet. Mereka juga membawa bendera merah berlambang palu arit yang menjadi identitas PKI. Pawai itu bertujuan untuk mengadakan pameran kekuatan.

Konferensi dihadiri oleh sekitar 3.000 orang. Sementara konferensi berlangsung, aksi-aksi kekerasan Laskar Merah semakin meningkat untuk memancing insiden dengan kelompok lain. Dalam pidato sambutannya Mr. Mohammad Joesoeph, memberikan pujian terhadap Uni Soviet (Rusia) yang telah mendukung revolusi sosial di Indonesia di forum Dewan Keamanan PBB.

Seperti sudah direncanakan, insidenpun pecah. Insiden ini merupakan awal dari gerakan Mohammad Joesoeph. Sebagai sasaran tindakan-tindakan kasar Laskar Merah adalah kesatuan Polisi Tentara. Tiga hari menjelang peringatan Maulud, tepatnya tanggal 12 Februari 1946, PKI memulai aksinya dengan menyebarkan isu bahwa Polisi Tentara telah melucuti anggota Laskar Merah yang datang dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur di Stasiun Cirebon. Perwira Polisi Tentara Cirebon Letda D. Sudarsono datang ke stasiun menemui seorang bintara jaga untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Namun sesampainya di stasiun, ia disambut dengan tembakan-tembakan. Ia dikepung oleh pasukan Laskar Merah. Beberapa anggota Polisi Tentara ditawan. Letda D. Sudarsono disandera, kemudian dibawa ke Markas Batalyon 13 Polisi Tentara dengan maksud untuk melakukan tuntutan. Karena gagal menemui pimpinan Polisi Tentara, mereka kembali menuju Markas Polisi Tentara Kabupaten di Hotel Phoenic dan menawannya.

Inilah langkah awal PKI dalam upaya menguasai jajaran pemerintahan setempat. Sebagian besar kekuatan bersenjata di Cirebon dilucuti, anggota tentara mereka tangkap dan dijadikan tawanan. Para tawanan itu dikumpulkan di beberapa bangunan yang dikuasai pemberontak. Hanya dalam waktu tiga hari Laskar Merah telah berhasil menguasai unsur bersenjata di Cirebon. Pos pos pertahanan TKR direbut dan Polisi Tentara dilucuti. Tindakan-tindakannya merajalela,

melakukan perampasan dan perampokan di toko-toko serta meminta dengan paksa kebutuhan rokok pada pabrik BAT. Seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah, dengan menduduki atau mengambil alih gedung-gedung vital seperti stasiun radio, dan pelabuhan. Nyatalah bahwa PKI yang didukung oleh 3.000 Laskar Merah melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan yang sah di Cirebon. Laskar Merah kemudian bergerak ke arah selatan sampai daerah Beber menuju ke Kuningan.

Laskar Merah terus bergerak ke selatan menuju ke Markas Polisi Tentara di Linggajati. Tetapi markas tersebut telah dikosongkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kekuatan senjata Polisi Tentara lebih kecil. Pemberontak kemudian kembali ke Cirebon dengan membawa barang-barang rampasan dari markas tersebut antara lain 20 potong kaos, 3 bal kain putih, yang merupakan barang langka pada saat itu. Setelah terjadinya perebutan kekuasaan oleh PKI dan berhasil menguasai seluruh kota, Panglima Divisi II/Sunan Gunungjati, Kolonel Zainal Asikin Yudadibrata mengirim utusan untuk membawa Residen dr. Moerjani dan Kepala Polisi Karesidenan Sulaiman Jayusman ke Markas Divisi yang berkedudukan di Linggajati. Setelah berunding dengan residen dan kepala polisi, Kolonel Zainal Asikin Yudadibrata segera mengambil tindakan. Ia mengirim Mayor Akhmad beserta Kepala Polisi Jayusman, dan Komi saris Sidik untuk menemui Mr. MohamadJoesoeph di Hotel Reebrinck untuk berunding. Dalam perundingan ini pihak PKI berjanji akan menyerahkan senjata-senjata yang dirampasnya kepada tentara pada esok harinya. Ternyata janji itu tidak mereka tepati, bahkan utusan yang datang di Hotel Reebrinck keesokan harinya, mereka sambut dengan serentetan tembakan.

Akhirnya, karena mengalami kegagalan dalam usahanya berunding dengan Mr. Mohammad Joesoeph, Panglima Divisi II menghubungi Komandan Resimen Cikampek, Letkol Moeffreni

guna meminta bantuan pasukan ke Cirebon. Untuk itu Letkol Moeffreni Moekmin mengirimkan pasukan Banteng Taruna yang berkekuatan 600 prajurit di bawah Mayor Banumahdi.<sup>24</sup>

Di pihak lain, sisa-sisa kekuatan TRI dan Polisi Tentara Cirebon juga telah siap melaksanakan penumpasan. Batalyon 1 pimpinan Mayor Ribut akan bergerak dari Sindanglaut, Batalyon 2 pimpinan Mayor Suyana dari arah Kedung Bunder dan Batalyon 3 pimpinan Mayor Dasuki akan bergerak dari Kosambi. Sasaran pertama serbuan adalah merebut pos-pos pertahanan PKI dan kemudian bergerak menuju markas pemberontakan di Hotel Reebrinck. Penyerbuan langsung terhadap markas pemberontak dilakukan oleh pasukan gabungan antara TRI, Polisi Tentara dan lain-lain di bawah pimpinan Lettu Machmud Pasya, Mayor Dasuki dan Mayor Suwardi. Sesuai dengan rencana, pasukan TRI bergerak dari berbagai jurusan untuk mengepung kedudukan pemberontak di markasnya. Tembak-menembak antara kedua belah pihak terjadi hanya sebentar. Melihat pasukan penyerbu jauh lebih besar, pasukan pemberontak menjadi panik. Akhirnya mereka memberikan tanda menyerah. Pimpinan pemberontak Mr. Mohammad Joesoeph dan Mr. Suprpto berhasil ditangkap di rumah Mr. Suparman ketika berusaha mencari perlindungan. Sebulan kemudian Mr. Mohammad Joesoeph dan Mr. Suprpto diajukan ke Pengadilan Tentara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai ganjarannya mereka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Perebutan kekuasaan di Cirebon dengan menggunakan nama PKI yang dipimpin Mr. Mohammad Joesoeph ini dikutuk oleh pemimpin-pemimpin PKI seperti Sardjono dan Maruto Darusman. Mereka menyatakan tidak bertanggung jawab. Tindakan Mr.

---

24. Mayor Banumahdi, bekas shodanco Pacitan (Jawa Timur) sesudah Proklamasi atas perintah Djokosuyono (anggota PKI bawah tanah kelompok Amir yang berhasil menyusup ke tentara Peta sebagai Cudanco di Madiun), diperbantukan ke front Jakarta (Resimen Moeffeni), dengan senjata lengkap. Pasukan Banumahdi menumpas gerakan PKI Mohammad Joesoeph, karena tidak setuju terhadap kepemimpinan Joesoeph, yang memunculkan PKI & sebelum waktunya. Banumahdi akhirnya terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun 1948.

Mohammad Joesoeph dianggap lancang, menyimpang dari strategi PKI. Sardjono dan kawannya kemudian membentuk Panitia Pembersihan PKI. Mr. Mohammad Joesoeph dihadapkan ke mahkamah partai yang dihadiri oleh 60 orang tokoh komunis. Semua pembelaan Joesoeph ditolak.

Dari peristiwa Cirebon ini kita melihat dua hal yang menonjol. Pertama adalah modus operandi yang lain dari gerakan PKI dalam rangka membentuk pemerintahan daerah yang dibebaskan (*liberated zone*). Yang kedua adalah sikap pimpinan PKI yang menolak dan menyangkal setiap aksi yang dilakukan oleh anggotanya apabila mengalami kegagalan.<sup>25</sup>

---

25. Soeranto Soetanto, *op cit*, hal 73-75.



## **BAB IV**

### **KONSOLIDASI PKI MELALUI GERAKAN LEGAL DAN GERAKAN ILEGAL**

#### **1. Upaya Menguasai Pemuda**

Pengikut komunisme di Indonesia pada masa awal kemerdekaan terdiri atas: Kelompok partai ilegal yang didirikan oleh Musso di Surabaya pada tahun 1935, kelompok Joyoboyo yang dipimpin Mr. MohammadJoesoeph dan Mr. Suprpto yang mengikuti garis Stalin, kelompok AmirSjarifuddin, Njono, OeiGeeHwat dan Widarta, kelompok Nederland terdiri atas anggota PKI bekas pengurus Perhimpunan Indonesia (PI), mereka adalah Abdul Madjid Djojodiningrat, Setiadjudi, Maruto Darusman dan Suripno, serta kelompok Digul yang dipimpin oleh Sardjono, Achmad Sumadi, Harjono.

Di antara kelompok-kelompok ini pertama kali tampil ke panggung politik adalah kelompok Amir Sjarifuddin. Mr. Amir Sjarifuddin setelah keluar dari penjara Malang bulan September 1945, langsung pergi ke Jakarta, karena ia telah diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam kabinet pertama RI (19 Agustus-14 November 1945). Kelompoknya segera melakukan konsolidasi serta membagi tugas dalam pelbagai bidang. Bidang politik ditangani oleh Mr. Amir Sjarifuddin karena ia kurang tertarik pada bidang sosial dan ekonomi, bidang kepemudaan oleh Wikana, bidang ketentaraan dan pertahanan oleh Atmadji dan Djokosuyono.

Setelah proklamasi kemerdekaan, organisasi-organisasi pemuda tumbuh laksana jamur di musim hujan. Pada tahun 1945, telah terbentuk lebih kurang 30 organisasi pemuda. Organisasi pemuda ini biasa disebut dengan nama badan-badan perjuangan atau laskar. Di Jakarta lahir beberapa badan perjuangan yang kemudian bersatu dalam Komite van Aksi yang dipimpin oleh Sukarni, Chaerul Saleh, dan Maruto Nitimihardjo. Organisasi-organisasi pemuda yang bernaung dalam Komite van Aksi antara lain Angkatan Pemuda Indonesia

(API), Barisan Rakyat (BARA). Mr. Amir Sjarifuddin juga muncul dalam kubu organisasi pemuda. Ia berhasil mengkonsolidasikan sisa-sisa grupnya yang berada di Surabaya membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia (AMI) pada tanggal 20 September 1945, yang dipimpin oleh Roeslan Abdulgani. Organisasi ini sama sekali bukan organisasi yang berhaluan komunis. AMI berhasil menyelenggarakan rapat raksasa di Stadion Tambaksari, Surabaya pada tanggal 21 September 1945. Dalam suasana awal revolusi itu kader-kader komunis dalam AMI mulai bergerak.

Mereka mendirikan organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang berhaluan komunis. Sekalipun pada awalnya PRI tampak seperti organisasi pemuda non komunis, tetapi kepengurusannya dimonopoli oleh kelompok Amir Sjarifuddin, seperti Soemarsono, Krissubanu, dan Ruslan Widjajasastra. Dengan adanya PRI ini, kelompok Amir Sjarifuddin memperoleh pancangan kaki di Surabaya. Dalam waktu yang singkat organisasi PRI juga berdiri di beberapa kota lainnya di Jawa.

Berdirinya berbagai organisasi pemuda baik yang bersifat nasional maupun lokal selama bulan September dan Oktober 1945, menimbulkan gagasan untuk mempersatukan organisasi-organisasi pemuda tersebut dalam suatu organisasi baru. Pada bulan Oktober 1945 gagasan mengenai hal tersebut dibahas di kalangan pimpinan organisasi-organisasi pemuda di Jakarta. Ketika kelompok Chaerul Saleh mengajukan rencana akan menyelenggarakan Kongres Pemuda, Mr. Amir Sjarifuddin yang dikenal memiliki kemampuan organisatoris tersebut, menyambutnya dengan hangat. Ia kemudian memanfaatkan peluang ini, dan pergi ke Surabaya untuk mempersiapkan PRI dalam menghadapi kongres.<sup>1</sup>

Pada tanggal 6 November 1945 di Yogyakarta berlangsung pertemuan antar organisasi pemuda.

---

1. Roeslan Abdulgani, "100 Hari di Surabaya yang menggemparkan dunia", *Surabaya Past*, 30 Oktober 1973.

Pertemuan itu memutuskan waktu dan tempat kongres yaitu tanggal 10-11 November 1945 di Yogyakarta. Kongres Pemuda dihadiri oleh 332 utusan dari 30 organisasi pemuda seluruh Indonesia. Pimpinan Kongres adalah Chaerul Saleh. Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin mempergunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi pemuda. Dalam sambutannya pada pembukaan kongres, ia menyatakan sebagai berikut: "Hai pemuda, jika kamu memegang bedil di tangan kananmu haruslah karhu memegang palu di tangan kirimu, dan jika kamu memegang pedang di tangan kananmu, peganglah arit di tangan kirimu".

Selama Kongres Pemuda, organisasi-organisasi dari kelompok sosialis dan komunis berhadapan dengan organisasi-organisasi pemuda dan kelompok Tan Malaka. Masing-masing kelompok berusaha merebut kepemimpinan pemuda, dengan menggeser atau menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak revolusioner dan tidak tahu revolusi.<sup>2</sup> Kelompok sosialis-komunis membentuk suatu wadah tunggal. Dengan menggunakan kekuatan organisasi Pemuda Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Amir Sjarifuddin, mereka melakukan gerakan *anschluss* (pencaplokan) terhadap beberapa organisasi pemuda untuk difusikan dalam wadah baru yang bernama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Sebagian besar utusan dari organisasi-organisasi yang hadir menolak fusi dengan Pesindo. Akan tetapi 7 organisasi menerima fusi, yaitu: Angkatan Pemuda Indonesia (API) Jakarta, PRI Surabaya, Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) Semarang, Gerakan Pemuda Republik Indonesia (Gerpi) Yogya, Angkatan Muda Kereta Api (AMKA), Angkatan Muda Listrik dan Gas (AMLG), Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon (AMPTT). Tiga organisasi "profesi", yaitu AMKA, AMLG dan AMPTT lima bulan kemudian keluar dari Pesindo.

Para pimpinan organisasi pemuda peserta Kongres Pemuda (10 November 1945) sengaja tidak diberitahu akan dilaksanakannya fusi tersebut. Pesindo dengan *meng-Jait a compli-kan* organisasi pemuda

---

2. Dahlan Ranumihardja SH., *Pergeseran Pemuda Setelah Proklamasi*, Yayasan Idayu, Jakarta 1979, hal. 13

lokal di kota lain yang tidak hadir pada kongres, berhasil mencaplok satu persatu organisasi tersebut untuk dilebur ke dalam Pesindo, walau mereka tidak tahu menahu mengenai sosialisme apalagi Marxisme-Leninisme.<sup>3</sup> Sebanyak 22 organisasi pemuda berhasil mereka caplok dengan taktik tersebut.

Pengurus Pesindo jelas-jelas dimonopoli oleh kelompok Mr. Amir Sjarifuddin, seperti Krissubanu (PRI Surabaya), Wikana (API Jakarta) dan Ibnu Parna (AMRI Semarang). Sebagai penasehat adalah: Amir Sjarifuddin, Djokosuyono, Chaerul Saleh, S.K. Trimurti, L.M. Sitorus, Martono Tirtonegoro, Soegiono, dan S. Widagdo. Bantuan yang diberikan Mr. Amir Sjarifuddin kepada Pesindo cukup besar ketika menjadi Menteri Pertahanan RI pada tahun 1947. Demikian kuatnya Pesindo, sehingga dapat dipakai oleh kelompok tersebut untuk melakukan intimidasi terhadap lawan-lawan politiknya. Pada tahap selanjutnya Pesindo berusaha menguasai Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BPKRI) yang dibentuk sebagai hasil Kongres Pemuda (November 1945).

Sekalipun struktur pimpinan BPKRI berupa Presidium, namun semua kegiatan organisasi berada di tangan Badan Pekerja Pembangunan yang dipimpin oleh Soemarsono (wakil dari Pesindo). Badan Pekerja Pembangunan berkedudukan di Madiun tempat Markas Pesindo,<sup>4</sup> dan memiliki pemancar radio yang bernama Gelora Pemuda. Dengan demikian Pesindo praktis telah menguasai organisasi pemuda. Pimpinan inti Pesindo adalah mantan pimpinan PRI yang merupakan kader PKI dan anak didik Musso pada tahun 1935, bersama kelompok Amir Sjarifuddin.

Tokoh Pesindo yang menonjol dari Jakarta adalah Wikana, anggota kelompok Amir Sjarifuddin yang memimpin Barisan Gerindo 1937. Pada jaman Jepang ia menjadi anggota kelompok Kaigun, di bawah pimpinan Mr. Achmad Subardjo, yang sesudah proklamasi mendirikan organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API). Oleh

---

3. Ibid, hal. 6 - 10

4. Antara, 1 April 1946

Amir Sjarifuddin, Wikana ditugasi sebagai fungsionaris pemuda dan didudukkan sebagai pimpinan Pesindo. Tokoh Pesindo lainnya adalah Soemarsono bekas anggota gerakan bawah tanah kelompok Amir Sjarifuddin dan kader PKI-35. Setelah proklamasi ia aktif dalam Laskar Buruh Minyak di samping anggota AMI di bawah pimpinan Roeslan Abdulgani. Kemudian ia terpilih sebagai Ketua PRI Surabaya. Tokoh lainnya adalah Krissubanu, seorang aktivis gerakan bawah tanah PKI-35, kemudian menjadi wakil ketua PRI. Berkat keaktifannya dalam PRI Surabaya, ia terpilih sebagai anggota Komite Nasional Daerah Surabaya untuk selanjutnya menduduki kepemimpinan Pesindo. Ketika aliansi Sjahrir-Amir Sjarifuddin pecah, hanya sebagian kecil saja pimpinan Pesindo mengikuti jejak Sjahrir, di antaranya Supeno, wakil Pesindo dalam kepengurusan BKPRI. Supeno kemudian diangkat sebagai Menteri Pemuda dalam Kabinet Hatta, menggantikan kursi yang dijabat Wikana.

## **2. Merebut Kekuatan Buruh**

Kaum buruh menurut doktrin komunis adalah kekuatan pokok revolusi. Pembinaan dan penguasaan organisasi buruh merupakan program prioritas setiap partai komunis. Di Indonesia, sesudah proklamasi, pembentukan organisasi buruh dikaitkan dengan organisasi kelaskaran. Organisasi buruh disusun dalam bentuk barisan yaitu Barisan Buruh Indonesia (BBI). Organisasi BBI ini terbentuk di Menteng 31 Jakarta, dan sebagai ketua terpilih Koesnaeni dan sebagai wakil ketua Pandoe Kartawigoena. BBI juga ikut bersama organisasi pemuda lain melaksanakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan dari tangan Jepang, kemudian menempatkan anggotanya pada perusahaan tersebut.

Pada tanggal 6 September 1945 bertempat di Menteng 31, ketua-BBI Jakarta, yaitu Koesnaeni digantikan oleh Njono. Peristiwa ini merupakan awal dari upaya kelompok komunis untuk menguasai organisasi buruh. Di bawah pimpinan Njono, BBI Jakarta yang mengatasnamakan seluruh BBI mengeluarkan sebuah maklumat

yang menuntut agar KNI mengakui BBI sebagai satu-satunya organisasi yang menyuarakan dan menggerakkan kaum buruh. Pernyataan pimpinan BBI Jakarta ini mendapat dukungan Menteri Sosial, yaitu Mr. Iwa Koesoemasoemantri yang menganjurkan agar BBI menyatukan pendapat. Berdasarkan pernyataan Menteri Sosial tersebut, BBI Jakarta mengumumkan akan menyelenggarakan pertemuan BBI seluruh Indonesia. Kementerian Sosial menyatakan bersedia membantu pertemuan tersebut, dan sebagai penyelenggara ditunjuk BBI Surabaya. Sebelum tempat pertemuan ditunjuk secara pasti, baik BBI Jakarta maupun BBI Surabaya bersikeras agar pertemuan berlangsung di kota mereka masing-masing. Pihak BBI Jakarta menganggap Jakarta sebagai pusat organisasi, sedangkan BBI Surabaya yang diwakili oleh Tasripin<sup>5</sup> menganggap Surabaya sebagai tempat yang lebih pantas. Kemudian diambil jalan tengah dengan menunjuk Surakarta sebagai tempat pertemuan yang berlangsung dari 7-9 November 1945. Karena pertemuan bersifat nasional, maka pertemuan tersebut diubah sebagai kongres. Kongres dihadiri oleh : kurang lebih 3.000 peserta terdiri dari 817 utusan seluruh Jawa. Daerah Sumatera mengirimkan 6 orang wakilnya atas nama organisasi buruh yang dibentuk sekitar bulan Oktober 1945, yaitu: Gabungan Sarekat Boeroeh Indonesia (Gashi). Mereka berasal dari Sumatera Barat, lima orang di bawah pimpinan Adrian dan dari Jambi satu orang, dr Sudiono.

Masalah inti yang memerlukan pemecahan kongres adalah arah perjuangan buruh Indonesia setelah merdeka. Wakil Jawa Timur, Sjamsoe Harja-Oedaja (Ketua BBI Surabaya)<sup>6</sup> menyatakan bahwa : "Tujuan perjuangan buruh yang sebenarnya adalah menuntut supaya semua perusahaan vital disosialisir atas nama masyarakat

---

5. Sejak 1933 anggota Suluh Pemuda Indonesia, organisasi afiliasi PNI-Baru. Kemudian bekerja pada BPM Plaju dan mengorganisasikan buruh minyak. Memimpin pemogokan tetapi gagal, melarikan diri ke Singapura. Kembali ke Binjai membentuk cabang Gerindo. Pada 1938 kembali ke Surabaya membangun jaringan gerakan bawah tanah.

6. Sjamsoe Harja Oedaja, menempuh karir sebagai wartawan Nusantara di Surakarta, kemudian menjadi redaktur *Penyobar Semangat*, *Suara Umum*, yang pada jaman Jepang menjadi *Soeara Asia*. Pernah menjadi Ketua Sarekat Buruh Partikular Indonesia sampai 1942 menjadi pengikut kelompok Tan Malaka.

seluruhnya".<sup>7</sup> Kemudian Njono selaku ketua BBI Jakarta tampil untuk menjelaskan tujuan perjuangan buruh yang merefleksikan aliansi kelompok komunis dan sosialis. Ia menyimpulkan bahwa landasan bagi pergerakan buruh Indonesia yaitu front persatuan menentang penjajahan, bantuan ekonomi bagi buruh serta pembentukan dewan-dewan buruh di setiap perusahaan jawatan.

Masalah bantuan ekonomi dan pembentukan dewan-dewan buruh disetujui peserta kongres, sedang mengenai masalah menggalang front persatuan anti penjajahan menjadi bahan perdebatan. Akhirnya sidang menyetujui usul Sjamsoe Harja Oedaja untuk membentuk suatu partai politik dengan nama *Partai Boeroeh Indonesia* (PBI) dan membubarkan BBI.



*Para pemuda dan anggota masyarakat yang sudah terpengaruh komunisme*

Pembubaran BBI ditentang oleh Njono (Ketua BBI Jakarta) dan oleh seorang peninjau Wijono Soeryokoesoemo<sup>8</sup> yang mewakili organisasi tani. Sampai akhir kongres, masalah setuju dan tidak setuju pembubaran BBI belum tuntas. Di sini kita melihat awal pergulatan kelompok sosialis-komunis melawan kelompok Tan Malaka dalam

7. Sjamsoe Harja-Oedaja, "Kaoem Boeroeh dan Indonesia Merdeka"; hal. 3

8. Merah Poetih, 8 November 1945

memperebutkan massa buruh. Pada tahap ini Sjamsoe Harja Oedaja dari kelompok Tan Malaka berhasil menguasai organisasi buruh.

PBI melangsungkan kongresnya yang pertama pada tanggal 15 Desember 1945 di Yogyakarta yang dihadiri oleh 28 utusan dari 19 Cabang. Masalah yang dibahas masih berkisar pada persoalan kedudukan buruh dan tani. Sjamsoe Hardja Oedaja memaksakan organisasi kaum tani berkiblat kepada PBI. Wijono Soerjokoesoemo mengulangi kembali pendirian golongan tani, bahwa kelompok kaum tani bukan organisasi politik dan mereka sudah membentuk organisasi sendiri yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI).<sup>9</sup> Kongres organisasi kaum tani di Yogyakarta telah menyatakan adanya perbedaan kegiatan antara kaum buruh dan kaum tani. Oleh karena itu BTI mengecam campur tangan PBI dalam masalah intern BTL

Keputusan kongres yang menjadi dasar program PBI ialah partai buruh harus bercorak buruh yang mengakui pertentangan antara majikan dan buruh. Kedudukan sarekat-sarekat buruh menjadi onderbouw (di bawah naungan) partai, tetapi mengakui keberadaan sarekat-sarekat buruh yang tidak dibentuk oleh PBI. Setelah kongres berakhir, PBI kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka. PBI lebih merupakan organisasi politik campuran, karena anggotanya bukan hanya buruh saja sehingga jumlah anggotanya menjadi lebih besar.<sup>10</sup>

Pada akhir Desember 1945 PBI digugat oleh kelompok kelompok yang menentang pembubaran BBI yang dipelopori oleh Njono. Menghadapi tuntutan yang begitu kuat, PBI mengalah. Sejak awal 1946 PBI mengumumkan bahwa BBI dihidupkan kembali dengan status sebagai asosiasi sarekat-sarekat buruh. Dalam pernyataannya PBI meminta kepada sarekat-sarekat buruh

---

9. Organisasi kaum tani mula-mula bergabung dalam Persatuan Perjuangan, kemudian memisahkan diri pada 1 Maret 1946, karena lebih condong kepada Partai Sosialis

10. E. Dwi Arya Wisera, "Partai Buruh Indonesia", *Skrripsi* Fakultas Sastra, Fakultas Sastra UI Jurusan Sejarah, 1988, hal. 33

yang berada “di luar pagar” agar menggabungkan diri ke dalarni BBI. Dalam perkembangannya kemudian, pada bulan Mei 1946 BBI diubah namanya menjadi Gabungan Sarekat Buruh Indonesia (Gasbi) yang bersifat federatif.<sup>11</sup>

Guna menyusun kepengurusan organisasi Gasbi, maka pada tanggal 21 Mei 1946 di Madiun diadakan konferensi PBI. Konferensi memutuskan bahwa Sjamsoe Harja Oedaja (Ketua PBI) sebagai Ketua Gasbi dan Danoehoesodo sebagai Wakil Ketua. Gasbi tidak hanya beranggotakan sarekat-sarekat buruh saja, tetapi juga terbuka bagi organisasi-organisasi pegawai negeri, polisi dan tentara. Meskipun konferensi berhasil menyusun organisasi Gasbi, namun keutuhan organisasi belum terbina. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan pendapat antara sarekat-sarekat buruh. Sebagian menginginkan sarekat buruh dan gabungannya terlepas dari partai politik. Sebagian yang lain menuntut agar sarekat buruh menjadi onderbouw partai politik. Dalam percaturan politik nasional, Gasbi ikut menempatkan wakil-wakilnya dalam organisasi politik Persatuan Perjuangan (PP) dan Konsentrasi Nasional. Koebarsih ditempatkan di PP sebagai wakil Gasbi, sedang Danoehoesodo ditempatkan di Konsentrasi Nasional.

Ketika terjadi kudeta terhadap pemerintah RI di Yogyakarta yang gagal oleh kelompok Tan Malaka pada 3 Juli 1946 hampir semua pimpinan PBI dan Gasbi ditangkap. Diantaranya Sjamsoe Harja Oedaja (Ketua PBI), Mr. Iwa Kusumasumantri, Danoehoesodo, dr.S. Rachmat (Sekretaris PBI), Mr. Moehammad Daljono (Ketua Departemen Politik), Mr. Ahmad Soebardjo (Ketua Departemen Politik Luar Negeri), Kobarsih (wakil PBI dan Gasbi pada PP merangkap Wakil Ketua Barisan Buruh Gas dan Listrik) dan dr. Boentaran Martoatmodjo (Ketua Departemen Kesehatan). Dengan ditangkapnya tokoh-tokoh PBI dan Gasbi, maka sarekat-sarekat buruh yang tergabung di dalamnya menyatakan tidak terikat lagi dengan PBI dan melepaskan diri dari Gasbi.

---

11. *Republik*, 1946, hal. 13

Situasi demikian merupakan kesempatan emas bagi kelompok komunis. Njono, Ketua BBI Jakarta salah seorang pelopor anti pembubaran BBI, menyusun kembali PBI tanpa terikat oleh keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh mantan pimpinan PBI. Njono membentuk Pusat Pimpinan Sementara PBI, yang terdiri atas 7 orang, yaitu: Njono, Setiadjid,<sup>12</sup> S.K. Trimurti, Moesirin, Soeprapti, Soepiman dan Isbandhie. Pimpinan baru segera mengeluarkan pernyataan politik yaitu menuntut dibentuknya kabinet koalisi yang bersifat nasional.<sup>13</sup>

Peranan Gasbi diambil alih oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang dibentuk pada akhir November 1946. Selanjutnya SOBSI mengambil alih peran PBI sebagai partai dan sekaligus sebagai sentral organisasi buruh. Setelah terjadi penggabungan berbagai organisasi-organisasi buruh ke dalam SOBSI, maka hampir semua pimpinan organisasi buruh didominasi oleh kelompok komunis yaitu Harjono, Njono, Oei Gee Hwat. Ketua BTI Wijono, digantikan oleh Sadjarwo<sup>14</sup>

Sejak akhir tahun 1946 organisasi buruh sama sekali telah dikuasai oleh komunis. SOBSI berhasil mencaplok semua organisasi buruh, yang semula dikuasai Gasbi dan kelompok Tan Malaka. Tidak lama kemudian SOBSI menyelenggarakan kongresnya yang pertama pada tahun 1947. Komposisi pimpinan SOBSI setelah Kongres I sebagai berikut:

- |              |  |
|--------------|--|
| Sentral Biro | - Harjono (ketua umum), Setiadjid (wakil ketua umum), Njono (sekretaris umum), S. Wirjodinoto (wakil sekretaris umum), Hartono (bendahara), Soekirno (wakil bendahara mencakup pembelaan). |
| Organisasi   | - Soerjosoepadmo (ketua), Oemar Said (wakil), Sardjoe Moh. Sastradiradja.  |

---

12. Setiadjid, tokoh PKI di negeri Belanda. Kembali ke Indonesia bulan November 1945 bersama Abdul Madjid Djojodiningrat. Ia memillih PBI

13. Kedaulatan Rakjat, 13 Agustus dan 21 Desember- 1946

14. Arnold Brackman, Indonesian Communism a History, Frederick & Pruger, New York, 1963, hal. 57

Sosial	- Affandi (ketua), Koeshartini (wakil), Soedjaprawira, Soenarjo Mangoenpoespito.
Ekonomi	- S. Coerdian (ketua), Soedjoko (wakil), Hardipranoto dan Sabariman
Penerangan	- Oei Gee Hwat (ketua), Wahjono (wakil), Bujung Saleh Puradisastra dan Islan.
Pendidikan	- Djohan Sjahroezah (ketua), Soemedi (wakil), Gondopratomo dan Siti Kalinah.
Wanita	- Soeparmi (ketua), Asiah (wakil), Hj. Soemedi.
Luar Negeri	- Marjono (ketua), Soehadinoto, Setiadi, Handoyo, Maruto Darusman, Bambang Susilo, Achmad Soemedi.
Perencanaan	- Asraroesdin (ketua), Djokosoedjono (wakil), Drs. Danoehoesodo, Harjadi, Maruto Darusman, K. Werdojo, Koesnan, Mr. Dr. Soeripto, Harjono, S.K. Trimurti.

### 3. Konsolidasi Partai

Di bidang politik, Amir Sjarifuddin telah memelopori konsolidasi dari sisa-sisa kelompok gerakan bawah tanah PKI yang telah bercerai berai. Pada tanggal 12 November 1945, Amir Sjarifuddin mendirikan Partai Sosialis Indonesia disingkat Parsi. Komposisi Dewan Pimpinan Partai adalah :Ketua, Amir Sjarifuddin dan Wakil Ketua, Sukendar (dari kelompok PKI-1935) dengan anggota, Mr. Hindromartono (anggota BPKNIP dan Residen Bojonegoro, seorang tokoh buruh komunis dari Gerak berusaha untuk mendirikan daerah bebas di Bojonegoro).

Azas perjuangan partai Parsi ialah membangun masyarakat sosialis dengan buruh, tani dan tentara sebagai tulang punggungnya. Program di bidang politik, mengadakan *Volksfront* atau Front Persatuan Rakyat untuk menegakkan RI dan menuntut adanya dewan-dewan

sekerja. Volksfront menurut Amir Sjarifuddin mengemban tugas ganda, di samping membangun Republik juga membangun semangat anti kapitalis. Usia partai ini hanya satu bulan, mungkin digunakan oleh kelompok Amir Sjarifuddin sebagai sarana untuk konsolidasi dan menjajagi situasi yang berkembang. Sementara itu kelompok Sjahrir membentuk pula Partai Rakyat Sosialis disingkat Paras pada tanggal 19 November 1945. Anggota Paras dihimpun dari kelompok bawah tanah Sjahrir yang berada di beberapa kota.

Pada tanggal 19 Desember 1945 di Cirebon, Partai Sosialis Indonesia (Parsi) dan Partai Rakyat Indonesia (Paras) meleburkan diri dan bersama-sama bersatu membentuk partai baru Partai Sosialis. Pembentukan partai baru ini merupakan lambang kerjasama antara kelompok sosialis (Sjahrir) dengan kelompok komunis (Amir Sjarifuddin). Kepengurusan Partai Sosialis terdiri atas Dewan Pimpinan berjumlah lima orang, yaitu: Amir Sjarifuddin (Ketua), dengan anggota-anggota Mr. Hindromartono, Soedarsono, Supeno, dan Oei Gee Hwat

Komisi Eksekutif terdiri atas : Seksi Politik, dengan anggota Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat, M. Tamzil, M.S. Muwaladi, Sumitro Reksodiputro, Subadio Sastrosatomo, dan Sugondo Djojopuspito. Sekretariat, Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat, Gumara, Sutrisno, Mr. R. Usman Sastroamidjojo, L.M. Sitorus, dan Wiyono Sumartoyo. Bagian Penerangan, Djohan Sjahruzah, Subagio I.N, Wangawijaya, Suwondo, Suyono, Tan Ling Djie, dan Sunarno Sisworahardjo. Bagian Pendidikan, Sukindar, Sukemi, Kusnaini, Sugra, dan Djawoto. Bagian Keuangan, Munodo, Sukanda, dan H. Djunaidi, serta Bagian Perhubungan, Subiantokusumo, Pramono, Abdul Fatah, Ruslan, Nurullah, Sardjono, M. Tauchid, dan Suhadi.<sup>15</sup>

Personalia pimpinan partai yang terdiri atas kelompok Sjahrir dan Amir Sjarifuddin memiliki latar belakang yang berbeda

---

15. Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 205-206

Kelompok Sjahrir, berasal dari tiga generasi, yaitu : Pertama, berasal dari generasi tahun 1920-an, terutama mereka yang tidak ikut dibuang ke Digul. Kedua, berasal dari generasi 1930-an, yaitu : Sugra, dr. Sudarsono, Sukemi, Djohan Sjahruzah, Sugondo Djojopuspito, Wangsawijaya, Sumarno, Kusnaeni, Nurullah, Sardjono, Wijono, M. Tauchid, Hardjono, Suhadi, dan Sudjono. Ketiga, adalah para pemuda dan mahasiswa yang secara pribadi dekat dengan Sjahrir. Mereka adalah: Subadio Sastrosatomo, dan L.M. Sitorus.

Kelompok Amir Sjarifuddin anggotanya terdiri atas kawan kawan Amir Sjarifuddin dalam Gerindo dan kelompok gerakan bawah tanah yang pada umumnya anggota kelompok Geraf seperti: Abdul Fatah, pernah dihukum seumur hidup oleh pemerintah pendudukan Jepang, Sutrisno bekas anggota Gerindo dan aktif dalam PKI-35; Sukindar dan H. Djunaidi adalah anggota PKI tahun 1920-an yang kemudian menjadi anggota PKI ilegal; Ruslan dan Subiantokusumo aktivis Serikat Buruh yang terlibat dalam gerakan bawah tanah, Tan Ling Djie bekas mahasiswa Leiden adalah kader Musso pada tahun 1935; Oei Gee Hwat, anggota Partai Tionghoa Indonesia, yang erat hubungannya dengan PKI-35. Kelompok Amir Sjarifuddin kemudian memperoleh tenaga baru, yaitu Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat. Ia adalah bekas Ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda. Sekalipun seorang keturunan bangsawan ia telah lama menjadi penganut komunis. Ia kembali ke Indonesia bersama Setiadjid pada bulan November 1945. Mereka mendapat tugas istimewa dari Partai Sosialis Belanda, guna melicinkan perundingan Indonesia- Belanda. Temannya Setiadjid bergabung pada Partai Buruh Indonesia (PBI).<sup>16</sup>

Terjalannya kerjasama antara kedua kelompok ini, karena selain mereka pernah bersama-sama melakukan gerakan bawah tanah juga sebagian dari anggota dewan eksekutifnya pernah memasuki partai yang azas perjuangannya non kooperasi. Setelah kelompok

---

16. Soc Hok Gie, "Simpang Kiri dari Sebuah Jalan", *Skrripsi* (Sarjana Fakultas Sastra UT), 1969, hal. 26

Amir Sjarifuddin dan kelompok Sjahrir berhasil menguasai BPK NIP dan kabinet, enam orang anggota Dewan Eksekutif Partai diangkat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP, maka partai ini praktis telah mendominasi pemerintah.<sup>17</sup>

Tujuan yang terpenting dan kerjasama kelompok sosialis dan komunis ini adalah menghadapi lawan politiknya yaitu kelompok Tan Malaka. Usaha coup yang dilancarkan kelompok Tan Malaka pada tanggal 3 Juli 1946, berhasil digagalkan berkat kerjasama tersebut dan sekaligus menyisihkan peranannya dari arena kehidupan politik selama tiga tahun. Latar belakang peristiwa kudeta 3 Juli 1946 bersumber pada perbedaan strategi perjuangan antara pemerintah dalam hal ini kabinet Sjahrir dengan kelompok Tan Malaka. Politik pemerintah menitikberatkan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Sekutu dan Belanda, bagi kemerdekaan Indonesia melalui cara-cara diplomasi.

Sikap pemerintah ini mendapat tantangan dari kelompok Tan Malaka, seorang tokoh politik masa Pergerakan Nasional. Pertentangan pendapat antara Tan Malaka dengan pemerintah sudah dimulai sejak bulan September-Oktober 1945 ketika Tan Malaka meminta kepada Sukarno-Hatta untuk menandatangani Surat Wasiat politik yang isinya mengenai penyerahan pimpinan pemerintahan dan revolusi kepada Tan Malaka jika sewaktu-waktu Sukarno-Hatta berhalangan. Permintaan Tan Malaka ditolak oleh Sukarno-Hatta.

Dalam bulan Januari 1946 kelompok Tan Malaka menyusun kekuatan sebagai *move* (gerakan) politiknya yang baru. Tanggal 4-5 Januari 1946 di Surakarta diadakan pertemuan dengan berbagai pihak yang menghasilkan terbentuknya suatu badan yang diberi nama *Volksfront*. Dalam pertemuan tanggal 15 - 16 Januari 1946, *Volksfront* ini diubah namanya menjadi *Persatuan Perjuangan* (PP) yang anggotanya terdiri dari beberapa organisasi massa. Program

---

17. Effendi Pennana Sinaga, "Partai Sosialis Suatu Kemelut Dalam Mencari Identitas", *Skripsi* (Sarjana Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas Indonesia), 1990, hal. 75

Persatuan Perjuangan dengan minimum program yaitu: Berunding atas dasar kemerdekaan 100%, Pemerintahan rakyat dan Tentara Rakyat. Program ini memperoleh simpati dari organisasi pemuda.

Konsepsi Persatuan Perjuangan mengenai revolusi adalah: revolusi Indonesia bukanlah revolusi nasional yang digerakkan oleh segelintir orang yang bersedia menyerahkan sumber-sumber ekonomi kepada bangsa asing. Sebaliknya revolusi itu harus berani mengambil tindakan ekonomi, sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100%. Dengan minimum programnya ini, Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap Kabinet Sjahrir pada saat pemerintah mengadakan perundingan dengan Belanda. Persatuan Perjuangan melancarkan oposisi dalam sidang KNIP tanggal 28 Februari-2 Maret 1946 dengan maksud menentang Kabinet Sjahrir, sehingga Kabinet Sjahrir jatuh. Akan tetapi Presiden Sukarno menunjuk Sjahrir kembali sebagai formatur.

Persatuan Perjuangan sebenarnya menginginkan agar yang ditunjuk sebagai formatur adalah Tan Malaka. Oleh karena itu mereka tetap meneruskan oposisi, sekalipun program kabinet baru merupakan kompromi antara pendapat pemerintah dengan pendapat Persatuan Perjuangan. Pemerintah menganggap bahwa tindakan mereka itu semata-mata bertujuan untuk merebut kekuasaan pemerintah dan melemahkan perjuangan bangsa, sehingga pada bulan Maret 1946 tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan ditangkap dengan alasan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar. Tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan yang ditangkap adalah: Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Sayuti Melik, Chaerul Saleh, dan Muhammad Yamin.

Sementara itu perundingan antara Indonesia dan Belanda tidak membawa hasil yang memuaskan. Di Indonesia sendiri khususnya di daerah Surakarta dan Sumatra Timur terjadi kekacauan dalam masyarakat. Persatuan Perjuangan memanfaatkan situasi tersebut untuk menculik Perdana Menteri Sjahrir dari tempat penginapannya di Surakarta. Selain itu diculik pula Jendral Mayor Sudibyo, dan dr. Darmasetiawan (Menteri Kemakmuran). Presiden Sukarno ketika mendengar berita itu, menyerukan kepada para penculik untuk

membebaskan Sjahrir dan kawan-kawannya. Seruan ini dipatuhi oleh para penculik, namun kegiatan Persatuan Perjuangan belum berakhir.

Pada tanggal 3 Juli 1946, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Jenderal Mayor Sudarsono (Panglima Divisi Yogyakarta) mencoba untuk memaksa Presiden Sukarno menandatangani konsep susunan pemerintahan baru. Konsep tersebut tertuang dalam dua buah maklumat yaitu Maklumat No.2 dan Maklumat No.3. Isi Maklumat No.2 agar Presiden memberhentikan seluruh menteri-menteri dalam Kabinet Sjahrir. Dasar pemberhentian itu adalah desakan rakyat dalam tingkatan kedua revolusi Indonesia yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan 100%. Maklumat No.3 berisi penyerahan kekuasaan dari Presiden Sukarno.

Dengan kedua maklumat itu Persatuan Perjuangan menghendaki agar pemerintahan diserahkan kepada pengikut Tan Malaka. Ini berarti perebutan kekuasaan. Akan tetapi Presiden menolak menandatangani kedua maklumat itu. Itu berarti perebutan kekuasaan, gagal. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu ditangkap, sehingga menyisihkan peranan Tan Malaka dan kawan-kawan dari arena kehidupan politik selama tiga tahun.

Terjalannya kerjasama antara kelompok Sjahrir dengan kelompok Mr. Amir Sjarifuddin dapat dimaklumi, namun terjadinya fusi merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Tampaknya Amir Sjarifuddin masih menganut *garis Dimitrov* dan mempraktekkan taktik *bloc within* untuk memperlemah kelompok Sjahrir. Untuk sementara Amir Sjarifuddin menerima garis politik Sjahrir, terutama dalam menghadapi Belanda, sekalipun banyak ditentang oleh kelompoknya. Garis politik diplomasi Sjahrir dianut oleh Amir Sjarifuddin sampai awal 1948. Sebaliknya pihak Sjahrir memperhitungkan bahwa Amir Sjarifuddin bisa "ditarik" ke dalam kubu sosialis, karena ia menerima garis diplomasinya yang dipandang sebagai upaya realistik.<sup>18</sup> Garis diplomasi tersebut ialah dalam perjuangan kemerdekaan harus

---

18. St. Sjahrir, *Perjuangan Kita*, Yayasan 28 Oktober, Bandung, 1979, hal. 9- 10

diakui bahwa kekuatan Sekutu sangat besar. Oleh karena itu politik berunding dengan kekuatan-kekuatan Sekutu, termasuk Belanda adalah satu-satunya pilihan terbaik.

Sementara itu kelompok Digulis yang dipimpin oleh Sardjono, Ketua PKI 1926 tiba kembali di Indonesia pada bulan Maret 1946. Kedatangannya disusul oleh kelompok Nederland seperti Maruto Darusman, dan Soeripno pada bulan Maret 1946. Sementara itu beberapa tokoh muda yang baru dibebaskan dari penjara seperti Aidit (dari penjara P. Onrust di Teluk Jakarta), Lukman (dihukum karena terlibat Peristiwa Tiga Daerah) dan Nyoto dari Besuki ikut menggabungkan diri dengan kedua kelompok tersebut. Tokoh lain yang datang dari Cina adalah Alimin, pada bulan Juli 1946. Alimin menyatakan bahwa tujuan kedatangannya dengan maksud :

“Ingin memberikan bantuan pada pekerjaan dan urusan partai yang telah lama terdesak bekerja di bawah tanah terpisah dari rakyat umum dan ditinggalkan oleh pemuka-pemukanya yang telah menjadi korban atau meninggal dunia. Saya telah lama tidak mendapat sambungan dengan partai dan saya sama sekali tak mengetahui apa-apa. Saya akan mulai lagi dari mula-mula. Kita akan kumpulkan lagi kawan kita yang sehati dan setia pada partai kita. Tiap tiap orang komunis diwajibkan hanya bekerja bagi partainya, yaitu Partai Komunis, lain tidak Kaum Komunis, hanya tahu satu partai saja, yaitu Partai Komunis”.<sup>19</sup>

Kedatangan tokoh-tokoh dari beberapa kelompok ini, membuat PKI telah siap untuk mengibarkan panji-panji partainya secara legal. Kemudian PKI menyelenggarakan Kongres IV atau kongres pertama sesudah Proklamasi pada bulan Mei 1946. Pada akhir kongres, PKI mengeluarkan pernyataan politik : bahwa PKI tidak akan masuk kabinet, karena dengan masuknya PKI ke dalam kabinet akan memperlemah kedudukan RI. RI pasti akan dicap sebagai sel Moskow, apabila PKI ikut serta dalam kabinet.

---

19. E, Dwi Arya Wisesa, Partai Buruh Indonesia, Skripsi (Sarjana Fakultas Sastra UI Jurusan Sejarah), 1988, hal. 168

Kongres juga berhasil memilih kembali pemimpinnya dan menyusun para fungsionarisnya sebagai berikut : Dalam Dewan Harian, duduk Ketua I Sardjono, Ketua II Maruto Darusman, Ketua III Djokosoedjono, Sekretaris Umum, dan Ngadiman Hardjosuprpto. Dalam Politbiro, duduk Alimin, Sardjono, Maruto Darusman, Soeripno, dan Ngadiman Hardjosuprpto, dan dalam Biro Organisasi terdapat Djokosoedjono, DN. Aidit (Agitprop) Soedisman, Roeskak (bendahara), dan Koesnandi (penghubung). Sebagai Pembantu Sekretaris Umum terdapat nama-nama seperti Sabarisman (ketentaraan I kelaskaran), Buyung Saleh Puradisastra (buruh), Koebes (tani) Karsali (pemuda), dan Suparmi (wanita). Sedangkan dalam Komisaris Daerah duduk Moh. Ali, Moh. Toha, Hamid Sutan (Jawa Barat), Moh. Senan (Jawa Tengah), Lauw King Hoo, Priyosantoso (Jawa Timur), dan Abdulkarim MS (Sumatra).

Pernyataan politik PKI yang dirumuskan pada tahun 1946 mendukung kebijaksanaan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Alimin pada tanggal 12 Agustus 1946, yang dikenal dengan "garis Sardjono". Garis ini antara lain menegaskan: "Dengan bubarnya Komintern, PKI mengikuti garis yang berdiri sendiri serta menghendaki kerjasama dengan Belanda dalam mengembangkan Negara Indonesia Serikat yang demokratis. Kami orang-orang komunis menganjurkan demokrasi dan perkembangan ekonomi bagi Indonesia dengan menitikberatkan pada modernisasi pertanian".

Dukungan PKI terhadap pemerintah (Perdana Menteri Sjahrir) dan terhadap naskah Persetujuan Linggajati, menimbulkan oposisi dan perpecahan intern. Pada bulan Maret 1947 beberapa tokoh menengah PKI seperti M. Djoni, Amir Husin dan M.A. Kasim, mengadakan pertemuan dan selanjutnya mendirikan partai tandingan yaitu Partai Komunis Indonesia Merah (PKI-Merah) yang dipimpin oleh M. Djoni. Reaksi PKI sangat keras. Dalam Siaran Kilatnya dinyatakan, agar para anggota memegang teguh prinsip, hanya ada satu partai komunis. Dalam anggaran dasar Komintern tidak ada keharusan untuk menamban predikat merah atau biru.

Akhirnya dinyatakan PKI-Merah adalah reaksi anti Marxis dan anti komunis.<sup>20</sup>

Perpecahan dalam tubuh PKI ini karena kader-kader komunis berontak terhadap kebijaksanaan kepemimpinan Sardjono - Alirnin. Khususnya mengenai dukungannya terhadap naskah persetujuan Linggajati. Yang dituduh menjadi "biang keladi" perpecahan ini adalah Widarta, kader dari kelompok Amir Sjarifuddin yang berserbunyi di Pematang. Ia adalah tokoh Peristiwa Tiga Daerah, dan dijatuhi hukuman penjara. Ketika di penjara ia berkumpul bersarna-sarna pelaku Peristiwa Coup 3 Juli (para pengikut Tan Malaka). Widarta melakukan oposisi keras terhadap garis Sardjono - Alimin, yang dinilainya lemah.

Setelah terjadinya perpecahan ia bersama rekannya dari Tegal, K. Mijaya diculik atas perintah pimpinan PKI untuk dihadapkan ke Mahkamah Revolusioner yang anggotanya antara lain Sudisrnan. Ia dituduh keras menyelewengkan garis PKI dalam Peristiwa Tiga Daerah dan melanggar disiplin partai. Atas kesalahannya Widarta bersarna tiga orang kawannya dijatuhi hukuman mati. Mereka ditembak mati di pantai Parangtritis Yogyakarta.<sup>21</sup> Sementara pihak pimpinan menyatakan bahwa mereka tidak sabar dan tidak disiplin. Sebenarnya banyak pula di antara tokoh yang tidak setuju kebijaksanaan pimpinannya, namun mereka tetap bertahan karena disiplin yang kuat.

Pemarafan Persetujuan Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 mengakibatkan kegoncangan dalam kubu Sayap Kiri. Dalam persetujuan itu delegasi Belanda menyodorkan tuntutan tuntutan antara lain gendarmerie bersarna (menyelenggarakan kepolisian bersarna). Tuntutan delegasi Belanda telah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sementara itu Sjahrir bersikeras akan menyelesaikan dengan politik diplomasinya dengan menyetujui

---

20. Soe Hok Gie, *op. cit.*, hal. 87

21. Anton E. Lucas, *op. cit.*, hal. 36

tuntutan Belanda tersebut. Untuk mengatasi kemelut tersebut Sjahrir mengirim Mr. Abdulmadjid Djojodiningrat, anggota Partai Sosialis ke Yogyakarta guna mencari dukungan dari Sayap Kiri. Ternyata Abdulmadjid Djojodiningrat tidak menyetujui kebijaksanaan Sjahrir dan tidak kembali lagi ke Jakarta. Tindakan Abdulmadjid Djojodiningrat disokong oleh Amir Sjarifuddin. Kemudian Sjahrir mendapat serangan dari kawan-kawannya dari kubu Sayap Kiri.

Perubahan sikap kubu Sayap Kiri yang semula mendukung politik diplomasi Sjahrir, sejak 1947 berbalik menentangnya. Hal ini tercermin dalam pernyataan politik Sayap Kiri yang menghendaki rekonstruksi dalam revolusi. Pokok-pokok pernyataan itu antara lain: "Soal politik pokok pangkalnya ialah soal staat (negara). Staat inilah yang punya tugas untuk menyelesaikan revolusi. Tetapi sungguh sayang pemerintah sebagai pengemudi yang menentang imperialisme asing bukan suatu kekuasaan yang revolusioner dan agresif".<sup>22</sup> Rupanya sesudah terjadinya perpecahan dalam tubuh PKI, orang-orang komunis yang masih berada di luar PKI, mulai melakukan aksi melawan Sjahrir. Tema yang digunakan adalah rekonstruksi dalam revolusi. Mereka menuduh pemerintah sebagai pimpinan revolusi telah mulai lemah dan kurang agresif. Orang-orang komunis menghendaki sikap yang lebih revolusioner dan agresif. Tujuan pokoknya adalah "menentang" Sjahrir dari kursi perdana menteri, untuk digantikan dengan orang komunis. Itulah yang dimaksud dengan rekonstruksi dalam revolusi. Kabinet Sjahrir yang mendapat serangan dari kubu Sayap Kiri yang semula mendukungnya, terpaksa harus menyerahkan mandatnya pada presiden tanggal 27 Juni 1947.

Kabinet Sjahrir digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin pada bulan Juli 1947. Ketika kelompok Amir Sjarifuddin menekankan perjuangan kelas dan memihak ke Rusia, maka hal ini ditentang keras oleh kelompok Sjahrir. Pada bulan Desember 1947 Sjahrir mendesak Amir Sjarifuddin untuk memilih, apakah kerjasama

---

22. Effendi Permana Sinaga, *op. cit.*, hal. 10

dengannya atau dengan komunis. Desakan Sjahrir beralasan, sebab Partai Sosialis didominasi oleh tokoh-tokoh komunis seperti Tan Ling Djie dan Abdulmadjid Djojodiningrat. Oleh karena Amir Sjarifuddin tidak mengindahkan peringatan Sjahrir, maka Sjahrir keluar dari Partai Sosialis dan menentang persetujuan Renville. Sjahrir kemudian mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada bulan Februari 1948.

Sampai tahun 1948 tercapailah usaha konsolidasi PKI yang dipelopori oleh Amir Sjarifuddin. Hampir semua lawan-lawannya berhasil disingkirkan secara sistematis baik melalui gerakan legal maupun gerakan ilegal. Saat penggabungan Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dengan PKI yang dipimpin oleh Sardjono telah terbuka dalam Fraksi Sayap Kiri, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada tanggal 23 Januari 1948. Amir Sjarifuddin kemudian melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintah dengan membentuk organisasi yang disebut "Front Demokrasi Rakyat" (FDR), tanggal 26 Februari 1948 di Solo. FDR adalah jelmaan dari golongan "Sayap Kiri" yang program jangka pendeknya menuntut pembatalan Linggajati maupun Renville yang dihasilkannya sendiri, sedangkan program jangka panjangnya "mendominasi kekuasaan pemerintahan". Basis kekuatan FDR adalah:

- a. TNI-Masyarakat daerah Purwodadi, Laskar Rakyat, Laskar Merah dan Laskar Buruh serta Pesindo yang dahulu pernah tergabung dalam Biro Perjuangan pada masa Mr. Amir Sjarifuddin menjabat Menteri Pertahanan,
- b. Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang menurut mereka anggotanya mencapai jumlah 1.307.000 orang.<sup>23</sup>
- c. Partai-partai politik: Partai Sosialis Indonesia dan PKI

---

23. Jahja Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1971, hal. 50-51

Di tengah-tengah aksi oposisi FDR, pada tanggal 10 Agustus 1948 datanglah Musso seorang tokoh komunis Indonesia yang telah lama bermukim di Rusia. Kedatangan Musso ini membawa misi dari komunis internasional untuk melakukan koreksi terhadap komunis Indonesia. Musso menyatakan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi yang defensif. Revolusi yang defensif adalah salah, karena itu harus diganti dengan revolusi yang ofensif ini menurut pandangan Musso dengan membentuk Front Nasional. Tidak lama kemudian Musso mengambil alih pimpinan PKI dari tangan Sardjono.

Pada tanggal 24 Agustus 1948, Polit Biro CC PKI mengumumkan bahwa perlu dibentuknya satu partai kelas buruh. Sebagai koreksi atas kesalahan organisasi masa lampau di masa lalu, CC PKI mengusulkan agar ketiga partai anggota FDR yaitu PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia (PBI) mengadakan fusi sehingga menjadi satu partai kelas buruh yang memakai nama PKI. Selanjutnya berkat koreksi Musso tersebut beberapa organisasi antara lain SOBS! mengaku bersalah karena ikut membantu melaksanakan politik kompromi dengan imperialis, dan selanjutnya berjanji akan melaksanakan politik anti imperialisme yang konsekuen. Kemudian CC PKI mencoba mengajak partai Masyumi dan PNI untuk mengadakan persatuan nasional yang kuat guna menghadapi imperialisme Belanda, sekalipun PKI tahu bahwa mereka akan menolak. Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 1948, Partai Buruh menyatakan meleburkan diri ke dalam PKI. Tindakan serupa diikuti pula oleh Partai Sosialis.

Pada tanggal 1 September 1948 kepengurusan FDR sepenuhnya diambil alih oleh pimpinan PKI. Dengan demikian gerakan FDR sepenuhnya menjadi gerakan PKI. Adapun susunan Politbiro CC PKI adalah sebagai berikut :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Sekretaris Jenderal | : Musso, Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Ngadiman. |
| Sekretaris Buru     | : A.Tjokronegoro, D.N. Aidit, Soetrisno.           |

Sekretaris Pemuda	: Wikana, Soeripno.
Sekretaris Pertahanan	: Mr. Amir Sjarifuddin
Agitasi Propaganda	: M.H. Lukman, Sardjono
Organisasi	: Soedirman
Urusan Luar Negeri	: Soeripno
Perwakilan	: Njoto
Urusan Kader-kader	: Di bawah Sekretaris Umum
Urusan Keuangan	: Roeskak.

Dengan kedatangan Musso, maka selesailah upaya, konsolidasi partai yang dipelopori oleh Mr. Amir Sjarifuddin.

#### **4. Menyusun Kekuatan Bersenjata**

Sesudah pecahnya revolusi di Surabaya bulan. September 1945, kader PKI-35 bersama sisa-sisa kelompok Amir Sjarifuddin mendirikan beberapa organisasi pemuda dan ketentaraan. Organisasi pemuda yang utama adalah Pemuda Republik Indonesia (PRI). Kelompok PRI ini sangat populer di Surabaya karena langsung dapat memanaskan suasana revolusi. Demikian populernya, dalam waktu yang singkat jumlah anggotanya melebihi jumlah yang diperkirakan. Hampir semua pemuda menyatakan bergabung pada PRI. Markas PRI mula -mula di Jalan Tidar (dulu Wilhelmina Princesselaan) kemudian pindah ke Simpang Club (sekarang Gedung Pemuda).

Sebagai organisasi lokal, PRI tidak dikendalikan secara sentral. Selanjutnya Markas PRI diubah menjadi Markas Besar PRI (MBPRI), dan membentuk pasukan sendiri. Organisasi PRI disusun mirip partai politik, yang terdiri atas pimpinan, pembantu pemimpin (pelaksana), cabang-cabang dan pasukan, mereka yang duduk sebagai pucuk pimpinan adalah Soemarsono (Ketua), Muntalib (Sekretaris). Sekretariat, Bambang Kaslan (Ketua), Soepardi (Wakil Ketua), Hasyim (Keuangan), dan Munandar (Bagian Umum). Badan-badan,

terdiri dari Rustam Zein (Penyelidik), Djamal (Propaganda), Ruslan Widjayasastra, Pramudji, Margono (Pembelaan), dan Sukotjo (Penghubung). Di samping itu terdapat enam cabang yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga Pusat yaitu PRI-Utara, PRI-Tengah dan PRI-Selatan.<sup>24</sup> Pengelompokan atas tiga pusat ini rupanya untuk mengaktifkan jalannya organisasi. Di sini sengaja disebutkan agak rinci, agar dapat diikuti kelanjutan peranan tokoh dan perjalanan organisasi ini sampai 1965.

PRI-Utara dipimpin oleh Rambe kemudian diganti oleh Sidik Arselan. Ada Badan Staf dan Barisan Badan Staf yang beranggota: Patinama, Yusuf Bakri, Sapia, dan Imam Kuncahyo. Di bawah Barisan dibentuk pasukan-pasukan, seperti : Barisan (batalyon) dipimpin oleh Sidik Arselan, Pasukan 1 (Ki) di bawah pimpinan Maladi Jusuf, Pasukan 2 di bawah pimpinan Mursid, Pasukan 3 di bawah pimpinan Mussofa dan Pasukan 4 di bawah pimpinan Pandjang Djoko Priyono.

Pusat PRI yang lain, yaitu PRI-Tengah dan PRI-Selatan kurang begitu menonjol, karena mereka tidak membentuk barisan dan pasukan.

Dalam Markas Besar PRI ada beberapa bagian yang peranannya sangat menonjol. Bagian Penyelidik, yang dipimpin oleh Rustam Zein dan Pramudji.<sup>25</sup> Tugasnya adalah tukar menukar informasi, investasi, penahanan dan interogasi. Karena tugasnya demikian luas, maka pada bagian ini dibentuk pasukan yang berkekuatan 1 kompi yang dimaksudkan sebagai *combat-intelligence*. Pasukan ini diberi kode P-10, artinya "Pasukan Penyelidik- 10", berkekuatan 150 orang bersenjata lengkap. Pimpinan pasukan ditunjuk Subardi. Pasukan P-10 ini seringkali melakukan tindakan-tindakan yang kejam dan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai "mata-mata musuh".

---

24. Nugroho Notosusanto (Ed), *Pertempuran Surabaya*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta 1985, hal. 108 - 115

25. Pramodji, kemudian menjadi Komandan Resimen Expedisi 44 Pesindo di Magelang

Bagian Pembelaan, merupakan bagian yang membentuk dan mengendalikan pasukan. Bagian ini diketuai oleh Ruslan Widjajasastra dengan anggota-anggota Pramudji, Margono (Wakil Ketua), Kawidjo (Sekretaris), dan Misban (Pembantu Umum). Selain itu terdapat juga kepala-kepala bagian yaitu Kusnarjo (siasat) dan Sapii Iskandar (angkutan). Bagian ini mempunyai pasukan reguler, disusun dalam Barisan (batalyon) dan Pasukan (kompi) yang juga diasramakan. Barisan tersebut adalah : Barisan 1, yang dipimpin oleh Trenggono, mantan shodanco dan Salimin, mantan heiho, Barisan 2, yang dipimpin oleh Basuki, Barisan 3, yang dipimpin oleh Ismail (mantan budancho), dan Barisan yang dipimpin oleh Sutedjo Eko. Di samping membentuk dan mengendalikan pasukan, peran Bagian Pembelaan ini adalah membagi senjata-senjata untuk "membantu" beberapa kesatuan PRI di luar Surabaya.

Ada pasukan yang mendapat bagian kecil antara 25 - 50 pucuk-senjata tetapi ada juga yang mendapat bagian besar. Bagian yang terbesar diberikan kepada pasukan Banumahdi<sup>25</sup> (mantan shodanco tentara Peta Pacitan) di Madiun. Lewat Djokosuyono, seorang anggota grup Gerak Amir Sjarifuddin yang berhasil menyusup sebagai tentara Peta di Madiun memberikan 500 pucuk senjata kepada pasukan Banumahdi yang dikirim ke front Jakarta. Pasukan ini kemudian tergabung dalam Resimen Moeffreini Mukmin. Bagian terbesar kedua sebanyak 300 pucuk disampaikan kepada Martono Brotokusumo, kemudian menjadi Komandan Brigade Djoko Oentoeng yang katanya untuk keperluan Markas Besar Oeroesan (MBO) TKR. Apakah senjata tersebut sampai ke MBO TKR, tidak ada sumber yang membenarkan. Betapa kuat dan sangat populernya PRI Surabaya ini dapat dilihat ketika Mr. Amir Sjarifuddin menggunakan PRI untuk meng-anschluss (mencaplok) organisasi pemuda lain pada Kongres Pemuda I di Yogyakarta.

---

26. Pasukan Banumahdi yang ditugasi oleh Komandan Resimen Jakarta menghancurkan pemberontakan PKI-Moh. Joesoeph di Cirebon, pada hakekatnya melaksanakan misi Mr. Amir Sjarifuddin yang tidak menyukai munculnya Moh. Joesoeph menggunakan nama PKI. Banumahdi terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, berpangkat Mayor.

PRI Surabaya adalah inti dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) organisasi pemuda pendukung kebijaksanaan Mr. Amir Sjarifuddin yang berskala nasional.

Sementara masih dalam suasana revolusi itu, Drg. Moestopo Ketua BKR Jawa Timur berhasil “menaklukkan” Mayor Jenderal Iwabe, pada bulan September 1945. Drg. Moestopo membentuk Kementerian Pertahanan dan mengangkat diri selaku Menteri Pertahanan. Di antara stafnya yang ditunjuk untuk mengurus masalah Angkatan Laut adalah Atmadji atau Djoko Atmadji yang baru tiba dari Jakarta. Atmadji semula adalah Sekretaris Gerindo di bawah Mr. Amir Sjarifuddin. Pada awal pendudukan Jepang, ia menghindarkan diri dari tangkapan Jepang. Namun tidak lama kemudian ia tertangkap di Bojonegoro lalu dijebloskan dalam tahanan Kempeitai di Tanah Abang bersama Ce Mamat dan kawan-kawannya yang lain. Selaku Staf Menteri Pertahanan, Atmadji mengadakan aktivitas di sekitar basis Angkatan Laut Surabaya. Bahkan ia berhasil menaklukkan pasukan AL Jepang di Pulau Nyamukan. Selanjutnya tanggal 31 Oktober 1945 ia bersama-sama para bekas pelaut yang dipengaruhi paham komunis mengumumkan berdirinya Marine Keamanan Rakyat (MKR) :”Untuk menyelenggarakan dan memelihara keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia telah dibentuk Marine Keamanan Rakyat” .

Atmadji mengangkat dirinya sebagai Laksamana Marine Keamanan Rakyat. Sebagai Kepala Staf MKR, ditunjuk Gunadi, seorang bekas bintanga Marine (AL) Belanda. Setelah Surabaya jatuh ke tangan pasukan Inggris pada bulan Desember 1945, Markas Besar TKR dipindahkan dari Surabaya ke Lawang (Malang). Di sini MKR membentuk semacam pasukan marinir yang diberi nama Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI). Atmadji menunjuk Katamhadi, bekas pegawai jawatan kereta api yang kemudian menjadi daidanco Tentara Peta di Mojokerto, sebagai Komandan TLRI. Oleh karena TLRI dianggap sebagai korps yang dikendalikan dari Lawang, maka disusunlah dua divisi TLRI yaitu divisi TLRI I yang berkedudukan di Malang dan Divisi TLRI II yang berkedudukan di Solo. Sesudah

Agresi Militer I Belanda (21 Juli 1947), Markas Besar TLRI dipindahkan dari Lawang ke Tulungagung.

Lahirnya MKR dan TLRI di Lawang ini, menimbulkan kekisruhan dalam tubuh kekuatan laut. MKR dan TLRI di Lawang membentuk Markas Tertinggi MKR. Padahal di Yogyakarta telah lebih dahulu terbentuk Markas Tertinggi TKR bagian Laut yang dipimpin oleh Laksamana Muda M. Pardi sebagai Kepala Staf Umum. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin berusaha keras untuk menyatukan dua organisasi kekuatan ini.

Pada tanggal 24 Desember 1945 diadakan konferensi segenap unsur kekuatan laut di Yogyakarta. Hasil keputusan konferensi adalah: Atmadji diusulkan sebagai Pemimpin Umum TRI-Laut pada Kementerian Pertahanan dan M. Nazir sebagai Kepala Staf Umum.

Konferensi ini ternyata tidak memecahkan masalah bahkan sebaliknya memperuncing masalah. Pihak Amir Sjarifuddin tidak ingin kehilangan kekuatan yang telah dibina oleh Atmadji sejak dari Surabaya. Akhirnya tercapai kesepakatan Atmadji diangkat sebagai Kepala Urusan Angkatan Laut pada Kementerian Pertahanan yang bermarkas di Lawang. Tampaknya kesepakatan ini tidak memuaskan kelompok Amir Sjarifuddin. Pada tanggal 19 Juli 1946 diadakan konferensi di Lawang yang khusus membahas organisasi. Konferensi memutuskan : Pertama, Markas Tertinggi TRI Laut berkedudukan di Lawang dan Sub Markas Tertinggi di Yogyakarta, kedua, nama Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) secara resmi digunakan.

Dalam konferensi ini kelompok Amir Sjarifuddin mencoba memindahkan Markas Tertinggi TRI-Laut dari Yogyakarta ke Lawang, di bawah Atmadji. Usahanya ini banyak mendapat tantangan. Agar supaya tidak terlalu banyak kehilangan kekuatan , maka Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin mengganti nama Markas Tertinggi di Lawang menjadi Direktorat Jenderal Urusan Angkatan Laut Republik Indonesia dengan susunan pimpinan adalah :

Direktur Jenderal Laksamana Muda Atmadji, Kepala Staf Jenderal Mayor Katamhadi, dan Wakil Kepala Staf Kolonel Subardjo. Perlu dicatat bahwa Direktorat Jenderal ini tetap membawahi divisi-divisi Tentara Laut Republik Indonesia /TLRI yang berada di Malang dan Solo. TLRI tidak pernah bergabung dengan ALRI.

Pada tanggal 14 November 1945, Kabinet Sjahrir terbentuk. Kabinet ini merupakan kabinet parlementer yang pertama. Mr. Amir Sjarifuddin ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Segera setelah menduduki posnya, ia menyatakan konsepsinya mengenai ketentaraan, antara lain : tentara harus disusun menurut model Red Army (tentara Rusia), tentara berwatak anti kapitalis-imperialis, dan tentara harus tahu politik dan dibimbing oleh opsir-opsir Politik.

Ternyata organisasi tentara yang ia jumpai pada waktu itu, telah membesar sedemikian rupa, bahkan telah memilih Kolonel Soedirman sebagai pimpinan tertinggi tentara untuk menggantikan Supriadi, pemimpin pemberontakan Peta di Blitar yang tidak diketahui beritanya. Terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pemimpin Tertinggi TKR (kemudian Panglima Besar) sesungguhnya kurang berkenan di hati Menteri Keamanan Rakyat Mr. Amir Sjarifuddin maupun Perdana Menteri Sjahrir. Mereka berpendapat tentara harus bersih diri sisa-sisa pendukung fasisme Jepang, karena khawatir akan timbulnya bahaya militerisme. Mereka tidak mengenal Pemimpin TKR Soedirman. Mereka menginginkan orang lain, seperti, yang di-klaim sebagai hasil binaan Dr. Ismail (Ismangil) anggota Gerak kelompok Amir Sjarifuddin.

Namun kenyataan menunjukkan lain. Presiden Sukarno mengukuhkan Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Kementerian Pertahanan mulai dibentuk. Staf Markas Tertinggi TKR dibagi menjadi dua. Sebagian menjadi Staf Kementerian Keamanan dan sebagian lagi menjadi Staf Markas Tertinggi. Yang termasuk diambil oleh Kementerian Pertahanan adalah Badan Pendidikan Tentara. Badan Pendidikan

kernudian diperluas fungsi-fungsinya disesuaikan dengan konsep Menteri Pertahanan Mr. Arnir Sjarifuddin yaitu tentara harus tahu politik, yang harus dibimbing oleh opsir-opsir (perwira) politik. Berdasarkan konsep itu, badan pendidikan itu diubah menjadi Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) pada tanggal 30 Mei 1946.

Sampai dengan bulan Mei 1946, Letjen Soedirnan berhasil mengkonsolidasi Tentara Republik Indonesia (TRI). Letjen Soedirnan telah muncul sebagai saingan Menteri Arnir Sjarifuddin, karena menang secara organisatoris TRI tidak di bawah Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Arnir Sjarifuddin pada bulan Mei 1946 membentuk Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) untuk mendidik dan menghasilkan perwira yang disebut "opsir-opsir politik". Opsir-opsir tersebut kernudian disebar ke divisi, resimen TRI atau kesatuan yang lebih rendah. Namun opsir-opsir politik yang dikirim dari Kementerian Pertahanan, ditolak oleh para Komandan Kesatuan TRI. Tantangan pun datang pula dari luar TRI. Sebagian besar politisi menganggap bahwa opsir politik yang ditempatkan di pelbagai kesatuan dapat menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan bangsa, khususnya dalam tubuh TRI, serta merusak tatanan komando.

Jelaslah bahwa Pepolit dan segala aktivitas opsir politik merupakan upaya kelompok komunis untuk mencoba menguasai tentara lewat jalan ideologi. Disamping usaha untuk menguasai TRI melalui Pepolit, Menteri Pertahanan Mr. Arnir Sjarifuddin membentuk badan baru yaitu Biro Perjuangan, yang bertugas mengkoordinasikan seluruh Badan-badan Perjuangan dalam Kementerian Pertahanan. Pimpinan Biro Perjuangan ialah Djokosuyono, dari kelompok Arnir Sjarifuddin dibantu oleh Ir. Sakirman, pemimpin Laskar Rakyat. Di daerah-daerah dibentuk pula inspektorat-inspektorat Biro Perjuangan, yang dikuasai oleh laskar komunis, terutama laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Tujuannya jelas, minimal untuk mengurangi "kekuatan" dan "kekuasaan" Letjen Soedirnan dan selanjutnya untuk menjatuhkannya

yang sejak semula memang tidak mereka sukai. Oleh karena itu Biro Perjuangan dikembangkan secara pesat, dan aktivitas Pepolit ditingkatkan untuk mempengaruhi tentara agar “mengerti” azas perjuangan komunis. Melalui kedua badan ini, kelompok komunis mempersiapkan kekuatan bersenjata dengan cara lain.<sup>27</sup>

Adanya dua kekuatan bersenjata yaitu TRI dan laskar/badan perjuangan yang saling konflik baik dalam masalah kepentingan politik, ideologi dan lain-lain, sangat merugikan strategi perjuangan bangsa. Atas prakarsa Presiden, pimpinan Angkatan Perang dan sejumlah politisi; maka kedua kekuatan bersenjata ini diintegrasikan dalam satu wadah organisasi baru yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nama TNI mencerminkan tekad dan pengabdian tentara sebagai pembela kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan atau kelompok. TNI mencakup pengertian sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial politik.

Secara formal integrasi ini dimulai pada bulan Juni 1947 dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sebagai “jalan tengah”, pada tingkat pimpinan dibentuk “pimpinan kolektif”, yang terdiri atas unsur TRI dan laskar-laskar, yang disebut Pucuk Pimpinan TNI (PP-TNI) :

- Ketua : Jenderal Soedirman (Panglima Besar)
- Anggota : LetnanJenderal Ocrip Soemohardjo (Kepala Staf Umum). Laksamana Muda Nazir (Panglima ALRI). Komodor Muda S. Suryadarma (Kepala Staf Angkatan Udara).  
Jenderal Mayor Ir. Sakirman (Laskar Rakyat).  
Jenderal Mayor Djokosujono (Biro Perjuangan).  
Jenderal Mayor Soetomo (Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (BPRI).

Lahirnya TNI dan kepemimpinan kolektif TNI merupakan pukulan politis yang merugikan kelompok komunis. Kekuatan

---

27. *Tentara Keselamatan Rakyat*, No. 2 th, 25 Januari 1946, hal. 43

bersenjata komunis yang dibinanya sejak 1945, akan diserap oleh TNI apabila integrasi benar-benar dilakukan. Sejalan dengan proses pengintegrasian tersebut, Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin mengubah organisasi Kementerian Pertahanan dengan maksud mengukuhkan status beberapa kesatuan laskar agar tetap berada di bawah pembinaannya, seperti Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI), serta membentuk organisasi TNI-Masyarakat pada bulan Agustus 1947. Pelaksanaan integrasi dihambat. Pembentukan TNI ini ternyata semakin memperkuat posisi Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Untuk menyelamatkan kekuatan bersenjata, Mr. Amir Sjarifuddin membuat move politik baru, lewat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), untuk menjatuhkan Panglima Besar Soedirman dan menguasai sepenuhnya Angkatan Perang. Zainul Baharuddin seorang anggota Fraksi Sayap Kiri dalam KNIP mengajukan suatu mosi yaitu mosi Rasionalisasi Angkatan Perang. Mosi ini berisi desakan agar diadakan reorganisasi Angkatan Perang yang langsung berada di bawah Menteri Pertahanan. Usaha Mr. Amir Sjarifuddin ternyata kandas dan bahkan menjadi bumerang bagi kelompoknya. Sekalipun demikian, Mr. Amir Sjarifuddin sebagai wakil dari kelompok komunis secara sistematis berhasil menyusun kekuatan bersenjata komunis yang apabila sewaktu waktu diperlukan telah siap untuk digunakan merebut kekuasaan negara.<sup>28</sup>

---

28. Kahin George Marc Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, cornel Uviercity pres, New york, th 1962 hal. 26



## **BAB V**

### **JATUHNYA KABINET AMIR SYARIFUDDIN MUNCULNYA KELOMPOK OPOSISI FRONT DEMOKRASI RAKYAT**

#### **1. Oposisi Front Demokrasi Rakyat di Komite Nasional Indonesia Pusat**

Hanya dalam waktu 18 hari sejak Kabinet Amir Syarifuddin memimpin pemerintahan,<sup>1</sup> Belanda melancarkan perang kolonialnya yang pertama tanggal 21 Juli 1947. Dalam agresi militer pertama, sistem pertahanan RI yang berbentuk linier terpaksa bobol menahan arus serangan Belanda. Namun agresi Belanda ini segera diakhiri dengan adanya campur tangan pihak luar, karena PBB dan KTN mengusulkan untuk diadakan suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang sedang bertempur, lahirlah perjanjian Indonesia-Belanda di bawah Komisi Tiga Negara di geladak kapal Renville, sehingga dikenal sebagai Perjanjian Renville dan beberapa hari kemudian kabinet kiri jatuh.

Wakil Presiden Moh. Hatta yang ditunjuk sebagai formatur penyusunan Kabinet Baru, berhasil menempatkan personalianya dan menentukan program sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan persetujuan Renville
- b. Mempercepat pembentukan NIS
- c. Rasionalisasi Angkatan Perang
- d. Pembangunan

Sebelum Kabinet Presidential ini terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948 Hatta sebagai pemegang mandat, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi telah memberikan 4 kursi untuk

---

1. Dengan bubarnya Kabinet ke IV ST. Syahrir maka terbentuklah Kabinet (ke V) Amir Syarifuddin pada tanggal 13 Juli 1947. Setelah Kabinet Amir Syarifuddin bubar maka diganti dengan Kabinet ke VI Hatta yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948; Lihat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, *Partai Komunis Indonesia dan G 30 S/PKL*, Team Serining Pusat, Jakarta, Th. 69, hal. 5

golongan sosialis. Akan tetapi tawaran ini tidak diterima, karena mereka menghendaki 9 kursi dan menuntut tempat-tempat yang merupakan unsur-unsur terpenting, seperti Bidang Perhubungan dan Sosial, Penerangan, Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Sudah barang tentu keinginan mereka ditolak, dan bagi Hatta yang merupakan seorang tokoh anti komunis yang konsekwen dalam hal ini tidak ada tawar menawar lagi, ialah golongan kiri diberikan 4 kursi dengan sekaligus ditentukan dimana mereka harus duduk.

Setelah Kabinet Hatta dilantik pada tanggal 3 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta berpidato di hadapan sidang Badan Pekerja KNIP untuk memperjelas kemana perjuangan Republik Indonesia akan diarahkan. Dari pidato itu dapat diketahui dengan gamblang perbedaan politik Hatta dengan grup Sayap Kiri-Front Demokrasi Rakyat. Tekanan Hatta diletakkan kepada aspek-aspek yang pragmatis, sedangkan Amir Syarifuddin diletakkan kepada segi-segi ideologi. Sejak itu pertentangan-pertentangan antar partai-partai politik Pemerintah dan pihak oposisi semakin menghebat.

Akibatnya golongan sayap kiri dengan keras melakukan oposisi dan menuntut dibubarkannya Kabinet Presidentil Hatta dan diganti Kabinet Parlemerter Nasional, sehingga orang-orang dari partai kiri ikut duduk di dalamnya.<sup>2</sup> Dalam memperkuat oposisinya di bidang politik ini pada tanggal 26 Februari 1948 golongan kiri telah mengadakan suatu pertemuan umum di Sala yang dihadiri oleh para tokoh Komunis Indonesia yang menelorkan Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang merupakan fungsi dari kekuatan-kekuatan dan partai sayap kiri dengan Amir Syarifuddin sebagai ketuanya. Meskipun potensi mereka telah dipusatkan, namun beberapa hari sebelumnya partai Sosial di bawah Amir telah mengalami perpecahan, dimana Syahrir berhasil menarik orang-orang cendekiawan ke pihaknya, yang kemudian dikenal sebagai orang-orang sosialis kanan.

---

2. Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Bandung, Th. 1985, hal. 80-81

Sementara itu Kabinet Hatta baru terbentuk segera dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan, terutama penyelesaian persetujuan Renville dengan Belanda dan perbaikan keadaan ekonomi yang parah. Penderitaan ekonomi yang sangat terasa bagi sebagian besar penduduk itu.

Dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi, maka Kabinet Hatta mengambil kebijakan yang dikenal dengan sebutan program Rasionalisasi dan Rekonstruksi yang disingkat menjadi Re-Ra. Dengan Re-Ra Kabinet Hatta dapat mengatasi dua persoalan pokok sekaligus yaitu mengecilkan defisit dan anggaran belanja negara serta menyusun tentara, suatu komando dalam bentuk yang efektif, karena Hatta yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan menyadari adanya bahaya dengan terbentuknya TNI-Masyarakat.

Sebenarnya reorganisasi Angkatan Perang adalah perwujudan dari misi Zainal Baharuddin dari Sayap Kiri yang telah diterima oleh BP-KNIP tanggal 20 September 1947 yakni semasa Amir Syarifuddin menjabat Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Maksud golongan kiri mengadakan misi tersebut ialah menempatkan Angkatan Perang di bawah komando kaum Komunis cq. Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Undang-undang No. 3 tahun 1948 tentang rasionalisasi yang telah dipersiapkan sejak masa Amir, setelah Kabinet Hatta berkuasa maka pelaksanaannya ditentang oleh golongan kiri sendiri. Padahal Pemerintah Hatta berusaha mengkoordinir dirinya via rasionalisasi di semua lapangan untuk melaksanakan dan menyesuaikan diri dengan persetujuan Renville. Bila sayap kiri dengan keras melakukan oposisinya, hanyalah mencari-cari alasan untuk menghancurkan Pemerintah Hatta yang kesemuanya berakar dari pengaruh politik dan ideologi.

Selain itu, semasa Amir berkuasa kecuali telah membina TNI Masyarakat beserta orang-orangnya dan menandatangani perjanjian Renville yang sedikit banyak makin menguntungkan perjuangan golongan kiri, juga telah mengirimkan perutusan ke Eropa Timur. Soeripno seorang mahasiswa yang sedang menuntut pelajaran di

negara Sosialis Polandia, oleh Kabinet Amir telah diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa RJ, yang di kemudian hari berhasil meratifikasi pembukaan hubungan konsuler antara Pemerintah Indonesia dan pihak Rusia yang diwakili oleh Duta Besar Sovyet M.A. Salim di Praha. Dengan demikian jelas kaum Komunis Indonesia mulai mencari kontak untuk mendapatkan dukungan diplomatik dengan pusat gerakan Komunis dunia, yang kemudian hari ternyata Musso yang telah berpuluh-puluh tahun dididik dan digembleng tentang taktik dan strategi dasar perjuangan Komunis di Mosko, segera didatangkan kembali ke tanah air.<sup>3</sup>

Sikap Amir Syarifuddin yang keras melakukan oposisi terhadap Pemerintah Hatta menimbulkan perpecahan di dalam Partai Sosialis. Kelompok Syahrir menentang tindakan Amir, dan dengan telah adanya perbedaan lainnya yang telah ada sebelumnya, Syahrir akhirnya memisahkan diri dari Partai Sosialis dan koalisi sayap Kiri, pada tanggal 13 Februari 1948. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI), partai baru ini segera bersumpah untuk mendukung pemerintahan Hatta. Sejak itu pimpinan sisa Partai Sosialis berada di tangan Amir Syarifuddin dan rekan-rekannya, Tan Ling Djie, Abdulmadjid. Propaganda kampanye oleh tokoh-tokoh FDR ke seluruh karesidenan di wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dilaksanakan secara intensip.<sup>4</sup>

Berlandaskan konsep kampanye yang telah diputuskan oleh Dewan Haris FDR tertanggal 15 Februari 1948 yang terdiri dari 10 pasal, yang terpenting adalah pembubaran kabinet Presidentil dan diganti secepatnya dengan Kabinet Parlementer, dengan formaturnya harus dari Sayap Kiri-Front Demokrasi Rakyat. Kabinet Hatta bukanlah suatu kabinet ahli, tetapi kabinet Masyumi yang ditutupi oleh Wakil Presiden Hatta. FDR tidak dapat menerima kabinet Masyumi, karena pemerintah ini berbau agama dan para

---

3. *Ibid*, hal. 83

4. Lihat Kahin, George Me. Tuman, "Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia". Alih bahasa dari buku: *Nationalism and Revolution In Indonesia*, oleh Nina Bakdi Soemanto. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 326-327

pemimpin agama Islam dapat bertindak semaunya. Jelas ini bertentangan dengan perjuangan FDR yang memperjuangkan diterimanya prinsip sosialisme dan komunisme.

Kampanye-kampanye dilakukan secara bertahap. Pertama, mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan pertemuan tertutup, pertemuan bersama dengan partai partai dan organisasi lain seperti PNI, PSII, Masyumi, Parkindo, BPRI. Kedua, mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah, polisi, ten tara, terutama dengan para bawahan. Ketiga, FDR mewaspadaikan agar agama jangan digunakan oleh pemimpin-pemimpinnya untuk kepentingan mereka sendiri. FDR setuju dengan ajaran agama, tetapi dengan cara .... "*delicate teaching*". Tujuan sosialis-komunis adalah tujuan yang ideal baginya, dan FDR menyatakan pula, apabila kekuasaannya telah berada di tangannya, semuanya akan berjalan dengan beres. Aktivitas lainnya di dalam melakukan aksi propagandanya adalah kampanye pers, penyebaran pamflet-pamflet, poster-poster, siaran radio, melakukan demonstrasi dan lain-lain. Di dalam tahap ini belum dipandang waktunya untuk mengadakan pemogokan-pemogokan, pemboikotan-pemboikotan sebagai alat perjuangan yang demokratis.

Lawan-lawan FDR kemudian menemukan, bahwa ternyata rencana kampanye FDR ini tidak terdiri atas 10 fasal, tetapi sebelas (11) fasal. Fasal ini menyatakan perlu dipersiapkannya aksi-aksi ilegal, yang berbunyi:

- a. Menimbulkan kekacauan dimana-mana, selama kabinet Masyumi masih memerintah dengan mengerahkan gerombolan-gerombolan untuk melakukan plunder, merompak secara intensif siang dan malam. Polisi tidak cukup kuat untuk menumpasnya. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat, seluruh rakyat akan hidup dalam ketakutan yang tetap dan sebagai akibatnya rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

- b. Tindakan-tindakan keras harus dijalankan seperti menculik, kalau perlu terhadap orang-orang (termasuk mereka yang telah keluar dari FDR) yang menentang rencana dari FDR, Partai Buruh Merdeka, Sarekat Buruh Gula dan lain-lain.

Akibatnya hubungan antara FDR dan Kabinet Hatta semakin renggang sementara itu oposisi FDR semakin hari semakin radikal.

Namun pada bulan Maret, April tahun 1948 relatif tenang bagi Republik, karena secara formal Amir Syarifuddin, Ketua FDR menyatakan kesediaannya untuk melakukan "oposisi loyal", membantu pelaksanaan Renville dan upaya-upaya untuk melancarkan penerimaan pasukan-pasukan yang di"hijrahkan" dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Tantangan terhadap salah satu program Kabinet Hatta, yaitu melakukan Rasionalisasi dan Reorganisasi (Re-Ra), sekalipun Panglima Besar Sudirman secara bijaksana mencoba untuk menenangkan situasi dan membela Kabinet Hatta.<sup>5</sup> Panglima Besar menyatakan bahwa Angkatan Perang RI telah siap untuk melaksanakan Rasionalisasi dan Reorganisasi karena telah direncanakan sejak Kabinet Syahrir, sebuah Kabinet yang didukung Sayap Kiri.

Namun mulai akhir Mei 1948, Front Demokrasi Rakyat merubah strategi dan meningkatkan oposisinya yang lebih radikal terhadap Pemerintah Hatta, yang juga disebutnya sebagai kabinet Masyumi, sedangkan Pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri untuk memimpin pemerintahan tanpa melibatkan Sayap Kiri/FDR. Sejak akhir Mei dan awal Juni, FDR meningkatkan kampanye perlawanan lebih keras dan lebih terarah terhadap pemerintah. Serangan politiknya semakin meningkat terutama diarahkan kepada partai Masyumi, serangan

---

5. Laporan Komisaris Polisi K.H. Mochammad Oemargatab, Kepala Bagian P.A.M. No. Pol 234/A.R. Pam, tertanggal 4 Juni 1948, perihal: "Ichtisar dari kegiatan-kegiatan FDR sedjak terbentuknya Kabinet Hatta teratir setjara ebronologisch", dikutipkembali oleh Himawan Sutanto, "Madiun, Dari Republikke Republik", *Thesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 37-38

agitatif meningkat agar merealisasikan hubungan diplomatik dengan Rusia dan mendesak kepada pemerintah agar bersikap lebih keras terhadap Belanda yang semakin merupakan ancaman nyata.

Dalam rangka mendapatkan dukungan politik dan militer, Front Demokrasi Rakyat /FDR di Komite Nasional Indonesia Pusat meningkatkan propaganda-propaganda dengan segala cara untuk memenangkan pengaruh simpati. Penggalangan politik dilakukan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai strata masyarakat di dalam Republik Indonesia, dari para pemuda yang tidak sabar dan tidak puas terhadap sikap pemerintah yang terlalu lunak terhadap Belanda, dari para anggota TNI yang kecewa terkena oleh program Rasionalisasi Rekonstruksi (Re-Ra), para petani yang nasibnya selalu berada di dalam keadaan tidak baik karena padatnya penduduk terutama di wilayah Jawa Tengah, ketidakpuasan para buruh (yang menderita paling berat), karena sebagian besar hidup di kota-kota, begitu pula karena ketatnya blokade laut pihak Belanda dan lain-lain.<sup>6</sup> Meski oposisi FDR semakin menguat, namun FDR masih melakukan oposisi secara parlementer. Program oposisi FDR secara parlementer adalah:

- a. Mempengaruhi BP TNI untuk meninggalkan mosi supaya program FDR harus menjadi program pemerintah, oleh karena itu pemerintah Hatta harus dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan parlementer.
- b. Mempercepat pembentukan Front Nasional dan selanjutnya apabila front sudah terbentuk maka Front Nasional akan mengadakan kampanye yang luas untuk membubarkan kabinet.
- c. Jika rencana gagal akan dilancarkan demokrasi luas oleh kaum buruh, prajurit dan golongan yang dapat diajak bergabung serta disusul dengan pemogokkan umum seperti dalam peristiwa pemogokkan Delanggu tanggal 2 Juni 1948.<sup>7</sup>

---

6. Lihat : Soe Hok Gie : *"Orang-orang dipersimpangan kiri jalan"*, mengutip dari *harian Nasional* tanggal 20 Maret 1948, terbitan Yayasan Benteng Budaya-Yogyakarta 1999, halaman 178-179

7. *Ibid*, hal. 179

## 2. Gerakan Front Demokrasi Rakyat dan Peristiwa Pemogokan di Delanggu 28 Juni 1948

Dalam rangka menanamkan pengaruhnya maka FDR telah berupaya mendekati kaum buruh dan petani, terutama sekali pada organisasi BTI (Barisan Tani Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang mempunyai keanggotaan kurang lebih 200.000-300.000 orang. Kekuatan-kekuatan politik ini dilibatkan oleh FDR di dalam perjuangan untuk mencapai tujuan politiknya, antara lain dengan mengobarkan suatu konfrontasi dengan pemerintah di Delanggu,<sup>8</sup> sesuatu tempat dimana negara mengusahakan penanaman kapas dan pabrik goni. Ladang-ladang kapas merupakan sumber utama bahan mentah untuk industri tekstil yang sedikit itu di wilayah Republik Indonesia.

Akibat pendudukan Belanda di daerah-daerah Republik Indonesia, terutama daerah-daerah yang subur dan daerah-daerah industri kecil, masalah makanan menjadi masalah gawat. Akibat blokade Belanda, mengalirnya pengungsi dari daerah pendudukan, dan tekanan jumlah penduduk yang meningkat kuat, membawa persoalan-persoalan baru. Penduduk ingin mengambil tanah-tanah konversi (milik asing maupun milik kesunanan Solo dan kesultanan Yogya), padahal Republik Indonesia menjadi milik perkebunan-perkebunan asing ini dalam rangka Manifesto 1 November 1945. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyadari bahwa masalah ini perlu ditinjau kembali karena kurang sesuai dengan alam kemerdekaan. Tekanan terhadap soal tanah tuntutan upah yang lebih baik dan kekurangan-kekurangan di dalam bidang sandang/pangan akhirnya berwujud di dalam pemogokan Delanggu.

Pihak buruh di Delanggu di bawah pimpinan Lembaga Buruh-Tani/LBT (bernaung di bawah SOBSI), sebenarnya sejak bulan Februari 1948, telah mengajukan tuntutan kenaikan gaji dan jatah beras kepada Pemerintah.<sup>9</sup> Pada prinsipnya pemerintah setuju untuk meluluskan

---

8. Lihat : Soe Hok Gie: "Orang-orang di persimpangan kiri jalan" hal 200-206, dan lihat DR. A.H. Nasution : "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia VIII", halaman 36-60 .

9. Lihat: Soe Hok Gie: "Orang-orang di persimpangan kiri jalan"-1999, hal. 201-202

permintaan tersebut, tetapi belum dapat memenuhi karena terhalang oleh persoalan-persoalan teknis, antara lain karena tidak tersedianya persediaan tekstil yang cukup dan akan membahayakan nasib perusahaan yang sangat diperlukan bagi industri tekstil. Akibat pertentangan yang semakin meruncing, LBT mengultimatum pemerintah, apabila tuntutan buruh tidak dipenuhi sampai tanggal 19 Juni, maka akan diadakan pemogokan. Jawaban pemerintah yang dianggap tidak memuaskan, mengakibatkan SOBSI pada tanggal 19 Juni 1948, pada jam 19.00, mengambil alih persoalan mogok, dan sejak itu masalah pemogokan menjadi masalah politik.

Tanggal 23 Juni 1948 buruh mulai mogok di pabrik karung dan ditujuh perkebunan kapas. Masalah pemogokan, yang pada awalnya mengenai tuntutan beras dan tekstil untuk buruh yang disengketakan, meningkat menjadi masalah politik di kabinet maupun di KNIP. Menteri Kemakmuran RI, Sjafrudin Prawiranegara (dari Masyumi) menuduh bahwa pemogokan itu adalah sepenuhnya masalah politik, dan melalui pemberitaan pemerintah menyatakan bahwa para buruh yang melakukan pemogokan ini melemahkan perjuangan bangsa yang sedang menghadapi ancaman Belanda yang setiap saat akan melancarkan agresi militernya.<sup>10</sup>

Kekuatan yang pro pemerintah mengecam keras pemogokan ini yang mengatasnamakan hak-hak buruh, dan mereka bertanya mengapa di dalam keadaan sulit, SOBSI masih mencoba menarik keuntungan politik. Mengapa sekarang setelah Sayap Kiri tidak lagi mengemudikan negara, setelah SOBSI tidak lagi menjadi tulang punggung pemerintahan Sayap Kiri, pemimpin-pemimpin FDR menganjurkan pemogokan dalam masa n gara di dalam keadaan bahaya? pihak FDR membenarkan pemogokan ini karena mogok adalah senjata buruh yang terakhir, tetapi mereka

---

10. Lihat Ann Swilt: *The road to Madun. The Indonesian Communist Uprising of 1948*. Cornell University 1989, hal. 41-42, juga pelajari G.N. T. Kahin: "Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia 1945", alih bahasa Nin Bakdi Soemanto. Sebelas Maret University Press 1995, hal. 336-338

menyangkal bahwa FDR adalah aktor intelektual dari pemogokan ini. SOBSI dengan gigih membela hak-hak buruh dan di dalam situasi inflasi dan kenaikan harga-harga dan kekecewaan-kekecewaan massal ini, mereka berhasil menjadi “pahlawan” rakyat.

Tiadanya keputusan politik untuk penyelesaian pemogokan ini secara cepat, menimbulkan konflik horizontal secara fisik yang cukup gawat. Pada tanggal 10 Juli petani-petani yang tergabung di dalam Serikat Tani Islam Indonesia (STII), tetap bekerja dengan alasan untuk menyelamatkan tanaman-tanaman kapas yang masih muda. STII menyatakan bahwa pada suatu hari, 500 orang SOBSI menengoroyok petani-petani STII yang sedang bekerja. Insiden-insiden timbul karena pasukan Hizbullah bersenjata melawan para pemogok, dan mengakibatkan jatuhnya korban di antara para pemogok. Pembakaran rumah, penculikan dan serangan-serangan teror terjadi selama pemogokan ini dan suasananya menjadi cukup gawat. Adanya pasukan-pasukan yang “pro dan kontra” terlibat di dalam pemogokan yang saling berhadapan, atas kebijaksanaan Wakil Presiden/Menteri Pertahanan. Pasukan-pasukan TNI ditugaskan untuk mengamankan keadaan dengan mengiriratkan kesatuan-kesatuan tentara untuk menjaga keamanan dan harus berada di luar soal-soal pemogokan. FDR dan Masyurni dilarang untuk menempatkan pasukan-pasukannya untuk melakukan penjagaan-penjagaan, diganti oleh pasukan TNI.<sup>11</sup> Panglima Besar Sudirman menegaskan, bahwa ditugaskannya pasukan TNI untuk mengamankan pemogokan, diarahkan sepenuhnya untuk mengamankan keadaan, dan tidak melibatkan diri di dalam masalah pemogokan. Di dalam suasana yang gawat ini, TNI adalah kesatuan yang tidak mencampuri soal-soal praktis.<sup>12</sup>

11. Batalyon Taruna Negara di bawah pimpinan Mayor Sentot Iskandar Dinata, pada tanggal 10 Juli 1948 ditugaskan untuk mengamankan situasi pemogokan Delanggu, setelah terjadi insiden berdarah antara para pemogok di bawah SOBSI/SARBUPRI dengan pihak STII/SBII yang membawa korban 5 orang luka dan satu meninggal. Bahkan pihak SARBUPRI juga telah berusaha memancing ketegangan dengan para prajurit Siliwangi, mendatangkan pasukan bersenjata PESINDO, namun situasi dapat diatasi dengan adanya peraturan Dewan Pertahanan Daerah, Nomor 8 dan 9 dan surat perintah Kmd Bat II/84, untuk diadakannya jam malam dan pasukan PESINDO segera ditarik kembali. Buku ini tidak diterbitkan.

12. Lihat: Soe Hok Gie: “Orang-orang di persimpangan kiri jalan”, mengutip dari *harian Nasional* tanggal 20 Maret 1948, terbitan Yayasan Benteng Budaya-Yogyakarta 1999-halaman 2044- 2045. SHG mengutip wawancara Panglima Besar oleh *harian Nasional*, 16 Juli 1948

Posisi fisik pemerintah kuat dengan sikapnya yang tegas dan wajar. Pemerintah menyatakan bersedia untuk menerima tuntutan tuntutan buruh tetapi di pihak lain menegaskan akan adanya kenyataan-kenyataan yang harus dipatuhi. Perdana Menteri Hatta meminta agar tokoh-tokoh buruh bekerja terus, sedangkan pihak FDR setuju dan meminta agar tuntutanannya diakui sebagai suatu yang “benar dan adil”. Tanggal 18 Juli pemogokan Delanggu dihentikan. Posisi Hatta bertambah kuat, sedangkan senjata mogok FDR tidak dapat menumbangkan pemerintah Hatta.

### **3. Kedatangan Tokoh PKI Musso Agustus 1948 dan Konsolidasi PKI**

Di tengah-tengah menguatnya kegiatan Front Demokrasi Rakyat/FDR datanglah Musso seorang pemimpin dari tokoh Komunis Indonesia yang telah berada di Moskow sejak tahun 1925. Ia pergi ke Moskow dalam rangka minta persetujuan Stalin untuk melancarkan pemberontakan rakyat yang akan direncanakan pada tahun 1928 sesuai dengan hasil kesepakatan Kongres Prambanan yang telah diadakan pada bulan Desember 1925. Namun Stalin tidak menyetujuinya karena saatnya belum tiba, dan ia diperintahkan kembali ke Indonesia untuk meneruskan perjuangan secara illegal. Akan tetapi sebelum ia sampai ke Indonesia pemberontakan meletus tahun 1926 tidak seperti yang direncanakan semula, sehingga demi keselamatannya ia terpaksa balik kembali ke Moskow menyusup ke Rusia.<sup>13</sup>

Sedangkan pemberontakan PKI tersebut mengalami kegagalan karena munculnya secara setempat-setempat saja sehingga pemerintah Kolonial Belanda lebih mudah mengatasi pemberontakan tersebut. Setelah gagalnya pemberontakan ini, maka pada tahun 1935 gerakan Komunis internasional kembali mengirimkan Musso ke Indonesia dalam rangka membentuk suatu organisasi yang diberi nama PKI

---

13. Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran, *Dampak Pemberontakan PKI tahun 1948 Terhadap Organisasi PKI (1948-1955)*, Pajajaran, 1994, hal. 25.

ilegal dan Front Anti Fasis karena pada waktu itu telah dicanangkan garis baru dalam gerakan komunis internasional yang dikenal dengan Doktrin Demitrow (konsep George Demitrow). Intisari dari Doktrin Demitrow tersebut ialah bahwa kaum komunis harus bekerja sama dengan kekuatan apapun juga termasuk kaum imperialisme/ kolonialisme untuk ditarik ke dalam Front Anti Fasis, guna menghadapi bahaya Jerman, Italy dan Jepang secara bersama-sama.

Namun Front Anti Fasis ternyata tidak dapat berjalan dan PKI ilegal tidak dapat berkembang maupun karena Belanda tidak tertarik bekerja sama dengan komunis, sehingga pada tahun 1936 Musso meninggalkan Indonesia menuju Moskow. Namun 14 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1948, Musso kembali lagi ke Indonesia bersama Soeripno yang telah ditugaskan oleh Pemerintah RI untuk menghadiri Konferensi Pemuda di Praha dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Negara-negara Eropa Timur.<sup>14</sup>

Musso berhasil menerobos blockade Belanda dengan menyamar sebagai Suparto Sekretaris Soeripno dan mendarat dengan pesawat Catalina di Tulung Agung. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1948 ia menghadap Presiden dan Wakil Presiden setelah lebih dahulu singgah di Bukittinggi, Suripno bersama Suparto (yang mengaku sebagai Sekretaris Suripno) sampai di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus. Setelah memberikan laporan kepada Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Suripno memberikan penjelasan tentang hasil kegiatannya dan politik internasional kepada kawan-kawan sepehamnya, dalam pertemuan itu ia memuji-muji Rusia, dan bahwa Rusia mengakui RI dan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Suparto, yang sesungguhnya adalah Musso, menerangkan bahwa ia ikut melicinkan jalan bagi pengakuan itu. Hal ini sangat penting karena Rusia adalah satu-satunya negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat, pemimpin blok Barat.

---

14. Staf Ahli Bidang Sospol, *Mengapa Kita Menentang Komunisme, Tinjauan dengan Orientasi Pancasila*, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, tahun 1997, hal. 157

Sejak menerima penjelasan tersebut, FDR memajukan resolusi agar pemerintah segera melaksanakan persetujuan tersebut. Mereka menyatakan bahwa Indonesia harus bergabung dengan blok Rusia jika terjadi perang.<sup>15</sup> Menanggapi masalah yang dilontarkan dalam resolusi FDR itu, Menteri Luar Negeri H. Agus Salim menjelaskan di muka sidang KNIP tanggal 16 September 1948, “bahwa pengakuan unilateral dari negara manapun akan disambut oleh RI dengan gembira Indonesia tidak akan membatalkan persetujuan dengan pihak luar negeri yang telah diadakan pada waktu-waktu lampau. Pengakuan kedaulatan Belanda hanyalah simbolis belaka dalam rangka Renville”<sup>16</sup> sehubungan dengan politik luar negeri dan hubungan internasional ini.

Kehadiran Musso ternyata membawa “angin baru” bagi aktivitas-FDR/PKI. Pada waktu ia menghadap Presiden Sukarno untuk melaporkan bahwa ia telah kembali ke Indonesia, Presiden meminta supaya Musso bersedia membantu memperkuat negara dalam melancarkan revolusi. Musso menjawab: “Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde te scheppen”. Kenyataannya, memang begitu ia datang, ia mulai sibuk dengan kegiatannya untuk “melancarkan persiapan revolusi”, yang kemudian malah ditujukan terhadap bangsanya sendiri. Ia aktif mengadakan diskusi dengan partai-partai Masyumi, PNI, Partai Sosialis, dan juga berpidato di alun-alun Yogyakarta untuk membakar semangat rakyat untuk menentang kapitalis dan imperialis. Dalam konperensi PKI tanggal 26-27 Agustus 1948 Musso mengajukan tesis dengan judul Jalan Bam Untuk Republik Indonesia. Pokok isinya adalah kritik Musso terhadap kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin komunis Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dinilai sangat salah besar. Konsep Jalan Bam untuk Republik Indonesia pada intinya terdapat :

---

15. Kahin, *Op. cit.*, hal. 271 - 274 ; lihat juga AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid VIII, hal. 163

16. *Op.cit.*, hal. 158 - 159

- a. Hanya boleh ada satu partai berlandaskan Marxisme Leninisme, karena itu partai-partai yang bernaung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), harus menyatukan diri dengan partai kelas pekerja.
- b. Partai Komunis harus mengadakan Front Persatuan Nasional, yang dikendalikan oleh Musso sendiri.

Konsep ini dilaksanakan dengan patuh oleh Amir Syarifuddin, Setiadjit dan lain-lain, sehingga semua partai-partai dalam FDR bergabung dengan PKI (SOBSI, BTI, PESINDO dan lain-lain yang tadinya bergabung ke dalam FDR).

Pada tanggal 1 September 1948 Musso dipilih menjadi Ketua PKI menggantikan Sardjono. Selanjutnya Musso membentuk Polit Biro Baru, yang beranggotakan :

- a. Amir Syarifuddin menjadi Sekretaris Urusan Pertahanan.
- b. Suripno memegang Urusan Luar Negeri.
- c. M.R. Lukman memimpin Sekretariat Agitrop.
- d. D.N. Aidit memimpin Urusan Perburuhan.

Dua hari setelah susunan Politbiro itu diumumkan, ia bersama pemimpin-pemimpin lainnya antara lain Amir Syarifuddin, Wikana, Haryono dan lain-lain mulai mengadakan perjalanan keliling dalam rangka kampanye untuk mencari dukungan politik dari rakyat. Setelah beberapa hari berada di Surakarta, tanggal 8 September Musso berpidato di Madiun, tanggal 10 dan 11 September meneruskan kampanye ke kota-kota Kediri, Jember tanggal 14 ke Bojonegoro, tanggal 16 di Cepu dan sehari sebelum Coup dilakukan ia telah siap berpidato di suatu rapat umum di Purwodadi.

Sebagai seorang ahli politik dan memimpin gerakan massa yang telah banyak makan asam garam perjuangan, ditambah dengan situasi dan kondisi obyektif yang pada saat itu memang menguntungkan, maka tidak sedikit hasutan-hasutan Musso

termakan di hati rakyat yang kebanyakan tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari negaranya. Agitasinya yang terutama diarahkan kepada organisasi-organisasi mahasiswa, para prajurit yang kena program Re-Ra, kelompok-kelompok petani yang tergabung dalam BTL dan kalangan masyarakat umum yang tidak puas akan adanya politik pemerintah telah mendapatkan sambutan yang cukup hangat. Demikian pandainya Musso mengeksploitir perasaan dan semangat mereka bagaikan bensin yang dituangkan dalam api para pendengarnya.

Mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan yang menyesatkan rakyat di rapat-rapat umum yang mereka selenggarakan. Di mana-mana rakyat dihasut untuk mengadakan pembagian tanah, karena mereka menuduh Pemerintah mempertahankan sisa-sisa feodal dan untuk itu mereka menggembor-gemborkan bahwa banyak tanah yang dikuasai Pemerintah serta tidak mau membagi-bagikan. Kecuali itu i menganggap Rusia sebagai modal perjuangan dan menghendak' suatu siasat yang ditentukan oleh Moskwa di dalam melawar kapitalis dan imperialis.

Dengan demikian jelaslah apa yang menjadi tujuan PKI/ Musso-nyata-nyata bertolak belakang dengan sikap Pemerintah. Meskipun demikian Pemerintah Hatta belum mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan Musso Cs tersebut karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis FDR belum melancarkan gerakan. Menurut informasi, Musso baru akan mengayunkan senjatanya sekitar bulan Desember 1948.<sup>17</sup>

Bertolak dari sudut pandangan komunis bahwa kontradiksi merupakan inti daripada dialektika, maka obsesi PKI untuk mewujudkan adanya konflik/pertentangan dalam masyarakat Indonesia telah terwujud. Pertentangan antara Pemerintah Hatta dan PKI/Musso sebagai partai oposisi, antara mereka yang loyal terhadap Pemerintah dan yang berdiri di belakang sayap kiri telah

---

17. Wawancara dengan Bapak Dr. Moh. Hatta

dilakukan. Timbullah saatnya bagi FDR/PKI untuk memulai menggunakan organ-organ para militemya melakukan perlawanan terhadap kesatuan-kesatuan Siliwangi serta laskar-laskar khususnya di Surakarta. Sala atau Surakarta seolah-olah menjadi medan perang saudara dalam rangka persiapan pemberontakan Madiun.

## **BAB VI**

### **PERSIAPAN PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN 1948**

#### **1. “Pisau Hatta” Memotong Pengaruh Komunisme**

Setelah Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada bulan Januari 1948, akibat Perjanjian Renville, Moh. Hatta ditunjuk sebagai formatur kabinet. Hatta mengajak Masyumi, PNI, dan Sayap Kiri untuk bersama-sama membentuk Kabinet Koalisi dengan wakil-wakil berimbang. Sayap Kiri tidak menolak tetapi menuntut untuk memperoleh 10 kursi dalam kabinet dengan posisi yang dikehendaki, seperti menteri pertahanan, menteri luar negeri dan sebagainya. Tuntutan ini ditolak, karena Hatta hanya menawarkan 4 kursi kepada Sayap Kiri. Tawaran Hatta tidak disetujui mereka. Akhirnya Hatta menyusun kabinetnya tanpa Sayap Kiri.

Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Presidensial Hatta diumumkan tanpa mengikutsertakan Sayap Kiri. Namun ada 2 tokoh Sayap Kiri dari SOBSI yaitu Supeno dan Kusnan yang duduk dalam kabinet, sebagai pribadi. Pada tanggal 3 Februari 1948 kabinet ini dilantik oleh Presiden. Program kabinet singkat dan sederhana yaitu menyelenggarakan persetujuan Renville; mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat; melaksanakan rasionalisasi; dan pembangunan.

Tugas yang dihadapi kabinet ini sangat berat karena warisan kabinet sebelumnya, sehingga harus bertindak tegas menghadapi setiap masalah berat yang muncul. Karena tugas berat ini Harian Nasional menamakan Kabinet Hatta sebagai Kabinet “Pisau Cukur”.<sup>1</sup>

Kritik pertama terhadap Kabinet Hatta dilancarkan oleh kelompok Amir Sjarifuddin (FDR). Kelompok ini menyatakan bahwa Kabinet Hatta tidak bertanggungjawab kepada Parlemen (KNIP).<sup>2</sup> Di samping kritik, kelompok ini menuntut : pertama, agar Pemerintah membatalkan

---

1. Nasional, 1 Februari 1948

2. Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, *The Development of the Indonesian Communist Party*, Cornell University Press, New York, hal. 51

Persetujuan Linggajati dan Renville serta berunding atas dasar pengakuan kedaulatan., dan kedua, melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tanpa kompensasi.<sup>3</sup>

Sementara itu dengan adanya perubahan dalam garis strategi komunisme internasional, mempengaruhi juga tingkah laku politik PKI. Perubahan dari garis Dimitrov, yang menganut garis lunak: kerjasama komunis dengan kapitalis dan imperialis dalam menghadapi fasisme, ke garis Zhdanov yang menganut garis keras. Isi pokok garis Zhdanov adalah membagi dua kubu yang bertentangan yaitu kubu kapitalis-imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Penjelasan tentang pelaksanaan garis ini dibahas dalam Konferensi Pemuda Asia Tenggara di Calcutta yang berlangsung dari tanggal 19-26 Februari 1948.<sup>4</sup> Pada konferensi tersebut Indonesia diwakili oleh dua orang kader PKI, yaitu Suripno dan Francisca Fangiday. Pada konferensi ini dirumuskan garis doktrin perjuangan komunis yang baru.

Meskipun demikian pada tanggal 16 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta di hadapan Sidang BP KNIP menjelaskan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan programnya, yaitu :

- a. Krisis Indonesia-Belanda akan diselesaikan atas dasar Persetujuan Renville;
- b. Usaha untuk mempertahankan RI diubah menjadi usaha pembentukan Negara Indonesia Serikat. Dan kita (RI) akan memberikan beberapa hak kita untuk Pemerintah Sementara;
- c. Rasionalisasi ke dalam, karena pentingnya penyaluran tenaga-tenaga produktif ke bidang masing-masing;

---

3. Ruth T. Me Vey, *ibid.*, hal 52 ; Kahin, George Me. Tuman Kahin, *Nationalisme and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, New York, hal. 260

4. Ruth T. Me Vey, *the Soviet View the Indonesia Revolution, a Study in the Russian Attitude Toward Asian Nationalism*, New York, Cornell University, 1957, hal. 45

- d. Rasionalisasi Angkatan Perang, akan dilaksanakan karena di bidang ini banyak tenaga tidak produktif. Mosi Baharudin<sup>5</sup> yang telah diterima oleh KNIP akan dilaksanakan dan akan dibentuk sistem satu komando tentara. Mereka yang terkena rasionalisasi akan dijamin dan akan disalurkan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Mengenai rasionalisasi Angkatan Perang, Perdana Menteri Hatta menegaskan di depan sidang tersebut :

“.....Terutama di kalangan Angkatan Perang terjadi penggunaan tenaga manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak dimulai mengadakan rasionalisasi, maka negara akan mengalami inflasi yang begitu parah. Untuk setiap orang yang terkena rasionalisasi harus mendapat lapangan kerja baru untuk mendapat hidup yang layak. Dalam taraf pertama akan didemobilisasikan sebanyak 160.000 orang dari kalangan anggota Angkatan Perang. Diharapkan dalam AP akan terdapat jumlah 57.000 orang pasukan tetap .....”<sup>6</sup>

Gagasan Hatta langsung bisa memotong garis politik kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR). Adanya tentara yang efisien dan satu komando, akan merupakan alat negara yang ampuh dan “kebal” terhadap agitasi kekuatan-kekuatan politik di luar tentara sendiri. RI yang kuat pastilah akan lebih menguntungkan dalam menghadapi tekanan-tekanan Belanda.

Dengan Penetapan Presiden nomor 9 tanggal 27 Februari 1948, pemerintah melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) tentara pada Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tertinggi Angkatan Perang sampai ke eselon terbawah. Di dalam rasionalisasi ini beberapa pejabat Kementerian Pertahanan pada

- 
5. Mosi Zainul Baharudin dan Ir. Salsirman (PKI) yang mendesak pemerintah agar diadakan peninjauan kembali struktur organisasi kementerian pertahanan dan secepat mungkin dibentuk Undang-Undang Pertahanan untuk mengatur lebih lanjut kedudukan hukum setiap anggota Angkatan Perang. Mosi ini merupakan mosi tidak percaya terhadap kebijaksanaan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ; Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI, Sinar Harapan, Jakarta 1984, hal.68.
6. Goenawan Mohammad, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*, Jakarta (1983), hal, 27.

masa Kabinet Amir Sjarifuddin dibebaskan dari jabatannya, antara lain Sekjen Kementerian Pertahanan Sukono Djojopratiknjo (bekas Ketua Pepolit), Atmadji (Direktur Jenderal Urusan Laut) serta para pejabat lainnya yang beraliran komunis di Kementerian Pertahanan.

Realisasi selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Presiden No.14 tanggal 4 Mei 1948 yang menegaskan mengenai pelaksanaan teknis rasionalisasi. Penpres tersebut menyatakan bahwa dalam wilayah RI dibentuk dua komando wilayah, yaitu Markas Besar Komando Jawa (MBKD) dan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) yang mulai berlaku 15 Mei 1948. Di Jawa yang sebelumnya ada tujuh divisi, dengan adanya rasionalisasi tersebut menjadi empat divisi. Juga dikeluarkan keputusan pemerintah bahwa sejak tanggal 15 Mei 1948 TNI Masyarakat dibubarkan secara resmi. Pada tanggal 29 Mei 1948 Gubernur Militer Daerah Militer Surakarta di bawah pimpinan Wikana (komunis) dibubarkan dan tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.<sup>7</sup>

Seperti telah diuraikan bahwa reorganisasi dan rasionalisasi ketentaraan bertujuan untuk melepaskan tenaga-tenaga produktif dari sektor pertahanan ke sektor produksi. Menurut Perdana Menteri Hatta ada tiga cara untuk melakukan hal tersebut: pertama, melepaskan mereka yang ingin kembali pada pekerjaan semula (seperti guru dan pamong praja); kedua, menyerahkan bekas tentara ini kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut; dan ketiga, mengembalikan seratus ribu orang kembali ke dalam masyarakat desa.

Hatta melihat bahwa di Indonesia terdapat beribu-ribu desa dan jika tiap desa menampung mereka yang dikembalikan 10 orang, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai penjaga keamanan dan lain-lain, maka pelaksanaannya tidaklah sulit. Apa lagi mereka ini akan mendapat uang ganti rugi jabatan (pesangon) sebanyak tiga bulan gaji.

---

7. Semdam VII/Diponegoro, *Sedjarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro, Sirmannig lakso katon Gapuraring Ratu*, Yayasan Diponegoro, Semarang, 1968, hal. 110.

Pada waktu itu jumlah anggota APRI adalah 350.000 orang, jumlah tersebut tidak sanggup dibiayai oleh negara.<sup>8</sup> Dengan rasionalisasi dan rekonstruksi TNI, Perdana Menteri Hatta yakin bahwa efektivitas mereka akan bertambah. Prinsip pertahanan rakyat tetap dijalankan, tetapi pertahanan ini tidak menarik orang dari sumber-sumber kerjanya yang berakibat memperkecil tenaga produksi.<sup>9</sup>

Apabila rasionalisasi ini berhasil dilaksanakan seperti yang direncanakan, FDR adalah kelompok yang merasa paling dirugikan. Sistem komando yang tidak terpecah-pecah oleh ideologi politik berarti suatu *set-back* untuk FDR. Padahal sejak tahun 1945 mereka telah bersusah payah membina dan memasukkan perwira perwira komunis dalam pucuk pimpinan Angkatan Perang. Bahkan mereka menaksir 35% dari tentara telah berada di pihak mereka, dan bahkan pada beberapa kesatuan merupakan kelompok yang dominan. Rasionalisasi adalah pisau cukur yang akan menggunduli FDR. Karena itu bagaimanapun baik dan manfaatnya tujuan rasionalisasi, FDR tetap menganggap bahwa rencana itu ditujukan untuk “mencukur” dirinya.

Pemerintah memulai reorganisasi dan rasionalisasi pada pasukan yang dinilai disiplinnya rendah, seperti Batalyon Mardjuki dan pasukan BPRI di Solo. Ternyata pasukan-pasukan ini membangkang. Baru dengan tindak kekerasan pasukan Mardjuki dan BPRI Solo berhasil dilucuti. Peristiwa ini dikenal dengan “peristiwa penyehatan” terhadap TNI. Peristiwa “penyehatan” di Solo terhadap kedua kesatuan itu ternyata berpengaruh terhadap pasukan-pasukan yang lebih kecil, yang semula akan menentang program pemerintah, akhirnya menyetujuinya.

---

8. Djenderal A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 130

9. Pidato Perdana Menteri Drs. Muh. Hatta di muka Sidang KNIP tanggal 12 September 1948

Langkah selanjutnya dicoba pada kesatuan yang lebih besar seperti Divisi IV dan kesatuan-kesatuan lainnya. Kolonel Sutarto Panglima Divisi IV Panembahan Senopati yang diminta untuk melaksanakan rasionalisasi karena mendapat dukungan FDR, menolak melaksanakan perintah itu. Setelah diadakan pendekatan antara pemerintah pusat dengan Divisi IV, akhirnya divisi itu dihapuskan dan diganti menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati dengan Panglima Kolonel Sutarto. Komando ini terdiri atas 5 brigade dengan jumlah keseluruhan 20 batalyon, masing-masing brigade dipimpin oleh Letkol Suadi Suromihardjo, Letkol Soediarto, Letkol A. Jadau, Letkol Iskandar dan Letkol Soejoto, yang dikenal pro FDR.

Sampai bulan Juni 1948 sejumlah 60.000 anggota tentara yang telah dirasionalisasikan dan 40.000 orang lagi akan menyusul. Perdana Menteri Hatta mengakui bahwa masalah yang terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah rintangan psikologis, karena kembali ke desa menjadi petani untuk menanam singkong dan membuat saluran-saluran air, dianggap sebagai pekerjaan romusha.<sup>10</sup> Kemudian ternyata banyak di antara mereka yang terkena rasionalisasi terkatung-katung nasibnya.

Dilihat dari sikap dan tindakannya, kelompok anti rasionalisasi dapat dibagi atas: pertama, kelompok yang berpendapat bahwa rasionalisasi akan memperlemah kekuatan RI; kedua, kelompok yang merasa hina sekali jika pada suasana perjuangan harus terjun kembali ke masyarakat. Mereka merasa tidak lagi dibutuhkan negara setelah terkena rasionalisasi ; dan ketiga, kelompok yang menampung keuntungan politik akibat pelaksanaan kebijakan rasionalisasi.

Kelompok pertama dan kedua kemudian mencari kepemimpinan politik dengan mendekati diri pada FDR. Mereka terpengaruh agitasi, hasutan, dan intrik-intrik model komunis. Pada waktu itu banyak tersebar isu; seperti “habis manis sepeh dibuang”, isu “rasionalisasi bertujuan untuk memperlemah hubungan tentara

---

10. Siasat, 20 Juni 1948.

dan rakyat". Isu demikian sengaja disebarakan oleh pihak komunis untuk memperoleh keuntungan psikis maupun fisik. Yang paling parah adalah isu bahwa pertahanan rakyat telah dilemahkan, maka RI akan diserahkan pada Belanda.<sup>11</sup> Demikian isu-isu itu dilancarkan oleh orang-orang komunis sambil menyerang pelaksanaan program rasionalisasi. Menurut mereka dalam saat-saat revolusi kemerdekaan, seharusnya tenaga tempur ditambah, bukan dikurangi.

Kabinet Hatta dalam melaksanakan programnya memiliki beberapa hal yang menguntungkan, sehingga sulit untuk diserang. Pertama, mosi rasionalisasi Angkatan Perang datangnya dari pihak komunis sendiri pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin. Mosi Baharudin diterima secara bulat oleh sidang KNIP yaitu pada saat Sayap Kiri masih berkuasa. Tujuan Sayap Kiri dengan mengajukan usul mosi tersebut agar lebih mudah mengawasi dan menguasai tentara (TNI). Mosi ini merupakan usaha jalur politik untuk memusatkan kekuasaan militer pada tangan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin. Upaya ini gagal, karena jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Dengan demikian kelompok yang pro Pemerintah dapat menangkis serangan-serangan FDR dengan menunjukkan bukti bahwa mereka hanyalah meneruskan kebijaksanaan pemerintah sebelumnya.

Bagi TNI adanya rasionalisasi merupakan kesempatan mengawasi penertiban organisasi, operasi-operasi dan melaksanakan pemikiran-pemikiran militer tanpa terlalu banyak dikacau oleh partai-partai politik. Jenderal Soedirman menyatakan bahwa TNI telah siap untuk rasionalisasi karena sudah direncanakan sejak Kabinet Sjahrir.<sup>12</sup> Apalagi Masyumi dan PNI serta Presiden Sukarno sendiri menyokong Perdana Menteri Hatta. Keadaan politik juga menguntungkan Hatta karena Renville yang tidak disukai itu dibuat oleh lawan politiknya. Serangan-serangan terhadap politik diplomasi dapat dijawab dengan menunjukkan bahwa FDR-lah yang membuat suasana menjadi kacau.

---

11. Djamal Marsudi, *Menjungkap Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun*, Merdeka Press, Jakarta, 1966, hal. 45

12. *Nasional*, 20 Maret 1948

Pada waktu itu arena politik Indonesia pecah menjadi tiga yaitu :

- a. Kelompok radikal Persatuan Perjuangan yang anti Linggajati dan Renville dengan menuntut merdeka 100% di bawah Tan Malaka.
- b. Kelompok FDR yang juga anti Linggajati dan Renville. Mereka berpedoman pada garis keras karena instruksi Moskow.
- c. Kelompok Pemerintah di bawah Hatta yang menerima Linggajati-Renville dan menjalankan politik berunding karena tidak melihat pilihan lain.<sup>13</sup>

Di saat-saat bangsa Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaannya dari rongrongan agresor Belanda betapa sangat perlunya kekompakan dan persatuan seluruh rakyat. Semua pihak menyadari bahwa tanpa persatuan, posisi RI akan sangat lemah. Yang sangat didambakan adalah nasib rakyat dan negara haruslah berada di atas kepentingan siapapun juga. Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1948, FDR, PNI dan Masyumi mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama itu diserukan adanya kesatuan sikap, program dan aksi agar pembinaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara demokratis dapat dicapai. Juga dianjurkan perlunya kerjasama yang erat untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan pendapat antara organisasi organisasi.<sup>14</sup>

Pada akhir Mei 1948 Perdana Menteri Hatta mengajak pimpinan partai-partai politik untuk berdiskusi mengenai kemungkinan kemungkinan perombakan Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer kembali. Atau sekurang-kurangnya mengadakan *reshuffle* kabinet. Dalam diskusi tersebut ternyata terdapat perbedaan cara dalam usaha mencapai Indonesia yang merdeka dan demokratis. Pihak FDR menginginkan Kabinet Hatta membubarkan diri dan menunjuk Mr. Amir Sjarifuddin kembali menjadi Perdana Menteri,

---

13. George Me. Tuman Kahin, *op. cit.*, hal 32

14. A. C. Brackman, *Indonesian Communism a History*, Frederick and Pruger, New York, 1963, hal. 74

atau minimal menjadi Menteri Pertahanan. Pada tanggal 31 Mei 1948 diadakan kembali pertemuan antara P.M. Hatta dengan Masyumi, PNI, Partai Sosialis, PSI, PKI, PBI, GPII, BKRI, Parkindo dan Partai Katolik untuk membicarakan tentang susunan kabinet dan situasi politik di dalam dan di luar negeri. Semua pihak sepakat untuk menyusun suatu program nasional. Untuk itu dibentuk sebuah panitia dengan anggota wakil-wakil partai di bawah Mr. Tambunan dari Parkindo. Disepakati pula semua partai bertanggung jawab atas penyusunan program nasional dan hasilnya akan menentukan bagaimana susunan kabinet yang dibentuk. Program ini kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk diolah.

Pada tanggal 16 Juni panitia Tambunan mengumumkan hasil kerjanya.<sup>15</sup> isinya antara lain: Pemerintah seharusnya menerima pengakuan dari negara-negara lain terhadap RI tanpa memandang ideologi. Dalam soal pertahanan rakyat, tentara dan rakyat bersama-sama menyelenggarakan pertahanan rakyat. Untuk penyempurnaan pertahanan rakyat perlu diadakan latihan latihan dan memberikan pengetahuan pertahanan pada rakyat. Sehubungan dengan itu ide FDR untuk mempersenjatai rakyat tidak disetujui oleh panitia.<sup>16</sup> Di bidang ekonomi diusulkan agar mewujudkan ekonomi nasional dan bebas dari pengaruh kekuasaan modal asing. Para petani akan diberi tanah yang diambil dari tanah-tanah yang berstatus *erfpacht*,<sup>17</sup> konsesi-konsesi tanah yang tidak dipakai lagi dan dari tanah-tanah partikelir. Segala bentuk "pemerasan" yang memberatkan petani seperti ijon, "mindring" dihapuskan atau dilarang.

Sementara itu pada tanggal 6 Juni 1948 suatu front baru, yaitu "Gerakan Revolusi Rakyat" (GRR) dibentuk yang dipimpin oleh dr. Muwardi dan Maruto Nitimihardjo.

---

15. Lebih jelas lihat AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Angkasa Bandung th. 1977 Jilid VIII, hal. 13-21.

16. Bandingkan dengan usul PKI untuk pembentukan Angkatan ke V pada tahun 1965

17. *Erfpacht* adalah tanah yang disewa dan dapat diwariskan.

Menurut GRR kerjasama dengan Moskow dapat dilangsungkan namun atas dasar saling menghormati dan persamaan. Berbeda dengan FDR yang mengumandangkan perjuangan internasional, maka GRR mengumandangkan perjuangan dengan orientasi nasional.<sup>18</sup>

Pada tanggal 4 Juli 1948 kembali partai-partai mengadakan pertemuan dengan jumlah yang besar. Akan tetapi program yang disusun baru selesai pada tanggal 14 Juli 1948. Pada hari itu dua puluh partai politik mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mereka menyetujui program nasional.<sup>19</sup>

Pada tanggal 26 Juli pemerintah membicarakan Program Nasional ini dan kabinet menyetujuinya. Tanggal 27 Juli Perdana Menteri Hatta berbicara di hadapan wakil-wakil dua puluh partai tersebut mengenai keputusan pemerintah untuk menerima dan menyetujui program itu. Ia menjelaskan bahwa mengingat situasi, tidak semua isi program itu dapat dilaksanakan sekaligus.<sup>20</sup> Meskipun di luar kelihatan bahwa partai-partai itu sepakat akan program nasional namun dalam pelaksanaannya masing-masing mempunyai pendirian dan tafsiran sendiri sehingga harapan sebagaimana yang diidamkan tidak pernah terwujud Partai-partai besar tetap saling “bercakaran”.

Pelaksanaan program pemerintahan ini dilaksanakan ditengah-tengah persaingan partai politik dan tekanan fisik Belanda sehingga suasana tegang makin meningkat. Oleh karena itu FDR merasa kabinet hebat berhasil memotong pengaruh Komunis di bidang Pemerintah. Dalam keadaan demikian, Kolonel Soetarto pada tanggal 2 Juli 1948 ditembak mati sewaktu akan masuk ke rumahnya di senja hari. Menurut penyelidikan Polisi Tentara pembunuhan itu didalangi oleh pihak FDR sendiri karena pendiriannya dinilai ragu-ragu.<sup>21</sup>

---

18. Arnold Brackman, *op. cit.*, hal. 78.

19. Lebih jelas lihat AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid VIII, hal. 17

20. *Ibid.*, hal. 34 - 35

21. Wawancara dengan Mayjen Soenitjoso, Jakarta 13 April 1976.

Selain pasukan Divisi IV, di Solo terdapat: Pasukan-pasukan pro FDR, Pasukan pro Tan Malaka, Tentara Pelajar yang pro Kabinet Hatta, serta Pasukan Siliwangi (hijrah) yang datang sejak Februari 1948.

## **2. Komunisme Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru**

FDR/PKI yang merasakan terpotong-potong pengaruhnya dibidang pemerintahan oleh program Kabinet Hatta, mulai meningkatkan oposisinya. pada pertengahan bulan Juli, FDR/PKI membuat program baru yang disebut Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru. Dalam program ini dijelaskan tentang dua cara perjuangan. Pertama, cara parlementer (melalui parlemen); kedua, non parlementer, tegasnya dengan kekuatan militer. Pada fase parlementer diusahakan untuk menyukseskan Program Nasional dalam Sidang KNIP menjadi Program Pemerintah yang sasarannya mengganti sistem Pemerintah Presidensial menjadi Pemerintahan Parlementer. Di samping itu FDR ikut membina pembentukan Front Nasional (FN) terutama di daerah-daerah dan selanjutnya FN itu membuat kampanye membubarkan pemerintahan Hatta. Jika usaha itu gagal akan diadakan demonstrasi-demonstrasi besar kaum buruh, petani tentara dan kelompok-kelompok lain yang akan dipengaruhi. Selanjutnya akan diadakan pemogokan umum dan kalau perlu dengan kekerasan. Untuk suksesnya rencana ini perlu disiplin dan para pimpinan TNI didampingi oleh kader-kader politik. Aksi-aksi itu hanya dijalankan bila di daerah itu FDR mempunyai kekuatan militer yang cukup. Bila langkah-langkah itu belum juga berhasil barulah digunakan kekuatan militer. FDR memperkirakan 35% dari TNI berada di bawah pengaruhnya, dan yang lain diusahakan untuk dinetralisir.

Di bidang militer, FDR mempunyai rencana sebagai berikut:

- a. Menarik sebagian dari "pasukan kita" dari daerah front (daerah status-quo):

---

22. Nama lain Brigade Djoko Oentoeng

- 1) Brigade Martono<sup>22</sup> dan Jadau akan diperintahkan untuk memperkuat operasi intern kami.
  - 2) Jika kita dipaksa untuk mengirimkan tentara ke front, maka pasukan-pasukan yang belum kita percayai sepenuhnya yang akan dikirim.
- b. Memindahkan pasukan-pasukan kita ke daerah yang kita pandang strategis dan menarik dari daerah-daerah yang tidak bisa dipertahankan :
- 1) Daerah Madiun akan dijadikan basis gerilya untuk perjuangan jangka panjang.
  - 2) Kita harus menempatkan paling sedikit 5 batalyon di Madiun yang harus sudah dilaksanakan bulan itu atau bulan Agustus.
  - 3) Kita akan membuat Solo sebagai wild-west untuk menarik perhatian ke sana, tetapi kita harus mempunyai pasukan yang terkuat di sana sehingga kekuasaan de facto selalu di tangan kita.
  - 4) Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya dan Kediri (daerah-daerah RI) akan dijadikan daerah netral, dalam pengertian kalau mungkin kita akan memperkuatnya/ meninggalkannya. Pasukan di daerah daerah ini tidak akan melebihi 2 batalyon.
  - 5) Kita akan meninggalkan seluruhnya daerah Malang, Banyumas dan Pekalongan. Di samping pasukan rakyat dalam pengertian yang seluas-luasnya.
- c. Umumnya kita akan membangun pasukan ini secara ilegal:
- 1) Dalam setiap kecamatan yang kita anggap strategis letaknya namun pengaruh kita telah berakhir, maka 60 orang prajurit di bawah pimpinan seorang komandan akan ditetapkan;
  - 2) Keenam puluh orang ini akan dipecah menjadi 6 atau 10 orang dan dikirim ke desa-desa;

- 3) Pimpinan umum di kecamatan ini berada di bawah komandan yang mewakili buruh, tani dan komandan keenam puluh prajurit ini.
- d. Program tingkat kedua ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan keadaan. Kita harus menyadari sebelumnya akan Program Nasional kita, terutama yang berhubungan dengan agrarian reform, pertahanan rakyat dan perjuangan buruh<sup>23</sup>

### 3. PKI Menyiapkan Kekuatan Militer

PKI telah menghimpun kekuatan dalam rangka pemberontakan sejak proklamasi bukanlah suatu hal yang direka-reka. Perebutan kekuasaan pemerintahan di daerah-daerah seperti Peristiwa Serang (1945), Peristiwa Tangerang (1945), Peristiwa Tiga Daerah (1945), Peristiwa Cirebon (1946), merupakan rangkaian usaha orang-orang komunis membentuk kekuatan. Mereka merebut basis kekuasaan daerah, untuk membentuk Soviet, tanpa menghiraukan bahwa seluruh bangsa sedang berjuang menegakkan kemerdekaan. Sekalipun usaha untuk merebut kekuasaan gagal namun rupanya orang-orang komunis tidak pernah berhenti berusaha untuk menyusun dan membentuk kekuatannya baik politis, ideologis maupun kekuatan bersenjata.

Di dalam membentuk kekuatan bersenjata, orang-orang komunis menyusun organisasi kelaskaran terdiri dari Pesindo, Laskar Merah, Laskar Buruh, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI), sampai ke TNI-Masyarakat. Mereka berambisi untuk menguasai Angkatan Perang. Dengan berbagai upaya mereka memasukkan kader-kader ataupun pengaruhnya ke dalam Angkatan Perang.

Ketika Kementerian Pertahanan dikuasai oleh kelompok PKI yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin, maka laskar-laskar yang berafiliasi dengan komunis memperoleh prioritas

---

23. Kahin, *op.cit.*, hal. 270- 271

dan fasilitas dalam pembagian senjata dan perlengkapan lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika persenjataan dan peralatan mereka jauh lebih lengkap dan lebih baik daripada TNI yang berasal dari TRI. Di dalam perkembangannya, sejak dari kelaskaran sampai bergabung menjadi TNI, pasukan-pasukan yang berafiliasi dengan komunis secara eksklusif membentuk brigade atau resimen sendiri. Hal ini nampak setelah reorganisasi TNI pada tahun 1947, di mana 10 divisi di Jawa, dicituk menjadi 7 divisi saja.<sup>24</sup> Di samping ketujuh divisi TNI itu, masih ada brigade dan resimen “Berdiri Sendiri” (BS) yang berafiliasi dengan PKI. Brigade dan resimen tersebut sampai akhir tahun 1947, antara lain:

- a. Brigade Djoko Oentoeng di bawah pimpinan Kolonel Martono Brotokusumo terdiri atas 3 resimen, yang dua resimen berasal dari Pesindo. Resimen-resimen tersebut antara lain: Resimen 41/Tidar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Moh. Anas, berkedudukan di Magelang. Resimen ini terdiri atas 3 batalyon, yaitu, Batalyon 171 dengan komandan Sunarto, Batalyon 169 dengan komandan Moh. Unus dan Batalyon 173 dengan komandan Basuki. Selanjutnya Resimen 44/E: x: pedisi dibawah pimpinan Letnan Kolonel Pramudji (bekas pimpinan PRI Bagian Penyelidik) berkekuatan 2 batalyon, yang seluruhnya berasal dari Pesindo, yaitu Batalyon Machmud dan Batalyon Mashuri.
- b. Brigade 29 merupakan gabungan laskar-laskar dari Surabaya, Kediri dan Madiun. Brigade tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Dahlan (bekas anggota PKI Surabaya dan Pesindo), bermarkas di desa Waturejo, Ngantang (Malang). Desa ini dipilih karena letaknya yang strategis terletak di bukit Selokurung yang memenuhi syarat sebagai daerah pertahanan. Di samping itu secara historis

---

24. Yaitu : Divisi I/Siliwangi (Jawa Barat); Divisi II/Sunan Gunung Jati Cirebon); Divisi III/Diponegoro (Yogyakarta); Divisi IV/Panembahan Senopati (Surakarta); Divisi V/ Ronggolawe (Bojonegoro); Divisi VII/Narotama (Mojokerto); dan Divisi VII/Surapati (Malang).

desa ini dahulu merupakan pusat pertahanan Trunojoyo dan pasukannya pada abadi ke-17. Sedangkan batalyon batalyon dari brigade ini terpencar di tiga karesidenan. Batalyon tersebut adalah :

- 1) Batalyon Mursid, berkedudukan di Ponorogo. Mursid yang menjabat sebagai komandan batalyon itu adalah bekas komandan kompi PRI Surabaya Utara.
  - 2) Batalyon Maladi Yusuf, berkedudukan di Ngadiyoso (Tulungagung). Maladi Yusuf juga bekas komandan pasukan PRI Surabaya Utara.
  - 3) Batalyon Panjang dengan komandan Djoko Prijono, berkedudukan di Sarodan, Panjang. Djoko Prijono adalah bekas sersan artileri KNIL, yang kemudian menjadi komandan pasukan Surabaya Utara.
  - 4) Batalyon Mussofa, berkedudukan di Madiun. Mussofa juga sebelumnya bekas komandan Pasukan PRI Surabaya Utara.
  - 5) Batalyon Dulrachman berkedudukan di Madiun. Dulrachman adalah bekas komandan pasukan PRI bagian pembelaan di bawah pimpinan Roeslan Widjajasastra.
  - 6) Batalyon Darmintoadji berkedudukan di Ngawi, dengan komandan Darmintoadji. Sebelumnya batalyon ini termasuk dalam Resimen 23 Divisi Ronggolawe.
- e. Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) berkekuatan 2 divisi, dipimpin oleh Atmadji dan Katamhadi. Divisi TLRI Jawa Timur bermarkas di Panggungrejo Tulungagung dan pasukan pasukannya tersebar di beberapa tempat, seperti di Nganjuk di bawah pimpinan Munaji. Divisi Jawa Tengah berkedudukan di Solo di bawah pimpinan A.Jadau dan Sujoto.
- d. Beberapa batalyon berdiri sendiri yang berasal dari Pesindo seperti Batalyon Sidik Arselan di Blitar dan Batalyon Darmintoadji di Ngawi.

Di samping resimen dan brigade yang berasal dari laskar laskar yang jelas berafiliasi dengan PKI, orang-orang komunis pun mencoba menarik batalyon-batalyon TNI yang berasal dari TRI. Mereka mengirimkan anggota Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) ke batalyon-batalyon TNI, terutama yang berada di daerah Solo dan Purwodadi. Dalam hal ini ada komandan batalyon yang mau menerima tetapi tidak jarang pula yang menolak dengan tegas kehadiran “opsir-opsir politik” di batalyonnya. Hasil kerja para “opsir politik” ini nampak nyata dan berhasil menarik beberapa batalyon dari resimen-resimen Divisi Panembahan Senopati, antara lain dari :

- a. Resimen 24 Brigade VI, pimpinan Letkol S. Sudiarto, terdiri dari: Batalyon Purnawi (Demak), Batalyon Wahyu Rochadi (Ungaran), Batalyon Yusam (Purwodadi), dan Batalyon Martono (Purwodadi).
- b. Resimen 26 (Letkol Suadi Suramihardjo), Batalyon Sudigdo (Panasan)
- c. Resimen 4 Brigade XXXIX, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Budihardjo, dengan Kepala Stafnya Mayor Wiyono, berkekuatan tiga batalyon, yaitu Batalyon Sujitno, Batalyon Suwitoyo, Batalyon Sutadi. Seluruh Resimen ini bekas Pesindo dan Laskar Merah serta Laskar Buruh Indonesia.
- d. Dari Resimen III (Brigade XVII Divisi Ronggolawe) terdapat satu batalyon bekas Pesindo, di bawah pimpinan Mayor Asaan yang berkedudukan di Cepu dan satu batalyon Laskar Minyak Cepu di bawah pimpinan Mayor Mulyono.

Sampai tahun 1947, kekuatan bersenjata PKI ditaksir berjumlah 25 batalyon. Oleh karena itu dalam berbagai kampanye dan rapat umum, FDR berani menyatakan bahwa 35% TNI telah berada di bawah pengaruhnya.

Reorganisasi dan rasionalisasi (Rera) sebagai kebijaksanaan pemerintah ditentang keras oleh FDR/PKI. Pihak FDR/PKI menentang kebijaksanaan Rera ini karena merugikan kedudukannya,

sebab sebagian besar yang terkena rasionalisasi adalah laskar laskar yang berafiliasi dengan PKI. Di beberapa daerah terdapat perbedaan tanggapan terhadap pelaksanaan Rera, di Jawa Timur yang semula ada tiga Divisi (Divisi V/Ronggolawe, Divisi VI/ Narotama, Divisi VII/ Suropati) akan dicitutkan menjadi satu divisi saja. Walaupun tanpa panglima para bekas staf divisi membentuk Staf Pertahanan Jawa Timur (SPDT), yang dipimpin oleh Letkol Marhadi, bekas Kepala Staf Divisi VI/Narotama. Letkol Marhadi memindahkan markasnya dari Kediri ke Madiun yang sesungguhnya daerah kekuasaan Divisi II (Jawa Tengah Bagian Timur). Hal ini barangkali untuk mendapatkan kesan bahwa SPDT bukanlah Divisi VI gaya baru. Perwira Staf SPDT diambil dari unsur ketiga divisi tersebut.



*Demonstrasi FDR/PKI melawan Pemerintah RI*

Sementara itu pada saat kekosongan pimpinan TNI di Jawa Timur, orang-orang komunis melakukan dislokasi dan pemindahan pasukan-pasukannya untuk mendekati Madiun. Batalyon Sidik Arselan (Pesindo bekas ketua Barisan PRI-Utara) yang semula

berada di Blitar dipindahkan ke Nganjuk, untuk memperkuat TLRI di, bawah pimpinan Munadji yang berada di Nganjuk.

Sejak kapan Madiun direncanakan dan dipilih sebagai daerah basis tidak diketahui. Yang diketahui kemudian adalah pemindahan Markas Pesindo dari Surabaya ke Mojosari (Mojokerto) setelah Surabaya diduduki Sekutu. Dua bulan kemudian Pesindo memindahkan markasnya ke Madiun pada bulan Januari 1946. Pesindo menempati satu bangunan yang bagus terletak di pusat kota, Jalan Raya No. 91 Madiun. Bangunan itu mereka sebut dengan Asrama Pahlawan.

Pimpinan Pesindo adalah Krissuban, Wikana, Sudisman, Mussofa Tjoegito, dan Soebroto sebagai Pimpinan Harian. Pesindo mendidik kader-kadernya dengan latihan kemiliteran dan pembinaan ideologi Marxisme-Leninisme. Kemudian Pesindo mendirikan lembaga pendidikan ideologi dan kader yang bernama Marx House. Peresmian lembaga ini ditandai dengan ceramah perdana dari Maruto Darusman dan Setiadjud pada bulan Mei 1946. Setiap kali ceramah di depan anggota Pesindo selalu dilanjutkan dengan diskusi intensif. Oleh pimpinan PKI diskusi-diskusi semacam itu dinilai berhasil.

Pendidikan ideologi angkatan pertama diadakan sejak bulan Juni 1946, yang diikuti oleh 136 pemuda selama 2 bulan. Basil dari angkatan pertama ini disebar ke seluruh pelosok dengan mengemban misi menyebarkan komunisme. Angkatan pertama disusul dengan angkatan kedua pada bulan November 1946 yang menghasilkan 85 orang lulusan, di antaranya beberapa orang wanita. Tokoh-tokoh PKI antara lain Maruto Darusman, Gondo Soedijono, Djaetun, Amir Sjarifuddin, Alimin, Sardjono dan Mayor Abdul Rachman.

Usaha Pesindo lainnya adalah memindahkan Kantor Dewan Pekerja/Pembangunan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) ke Madiun dengan maksud agar kompartemen BKPRI tersebut berada satu kota dengan Markas Pesindo. Dewan Pekerja/Pembangunan BKPRI yang tugasnya mengurus mobilisasi kekuatan dipimpin oleh tokoh-tokoh Pesindo Sumarsono dan Kusnandar.

Kantor yang dipilih untuk Markas BKPRI adalah Jalan Kediri No. 17, di Kompleks Pabrik Gula Rejoagung. Pada bulan Maret 1946 Dewan ini mendirikan Radio Gelora Pemuda untuk kepentingan propaganda. Rupanya secara ideologi dan politis, Madiun telah dipersiapkan sebagai basis. Letak Madiun berada di jalur transportasi kereta api Jombang-Yogyakarta<sup>25</sup> di mana pengangkutan pasukan dan mobilitasnya terjamin. Madiun juga memiliki bengkel induk kereta api, yang letaknya berdekatan dengan Pabrik Gula Rejoagung (milik Oei Tiong Ham Concern) yang para buruhnya telah dipengaruhi oleh PKI. Juga di daerah Madiun terdapat beberapa pabrik gula yang lain, seperti Pabrik Gula Pagotan, Pabrik Gula Gorang-Gareng, Pabrik Gula Sedono. Pabrik-pabrik gula tersebut dinilai memiliki syarat-syarat ekonomis dan strategis. Oleh karena itu pabrik-pabrik ini dijaga oleh tentara mereka. Dari basis pabrik gula dan bengkel induk kereta api dikembangkan perlawanan. Di samping buruh, PKI mempengaruhi pula tokoh masyarakat dan para petani, dengan janji janji yang muluk antara lain, mereka akan diberi kedudukan dan tanah-tanah pertanian.

Hal lain yang menguntungkan PKI adalah momentum rasionalisasi. Sebagai akibat rasionalisasi, kekuatan TNI di Madiun yang semula berkekuatan satu brigade, setelah rasionalisasi dijadikan satu Sub Teritorial Comando (STC), yaitu instansi teritorial yang tidak membawahi pasukan tempur. "Status" Madiun yang tidak menentu, semula termasuk wilayah Divisi Ronggolawe, setelah reorganisasi menjadi wilayah Divisi II (Jawa Tengah Bagian Timur), tidak termasuk wilayah kekuasaan divisi Jawa Timur. Namun aktivitas PKI ini tidak banyak diketahui oleh tokoh-tokoh politik di Madiun sendiri. Berkumpunya pemimpin-pemimpin Pesindo di Madiun ini baru diketahui oleh dr. Kresno, seorang dari Rumah Sakit Umum Madiun, yang telah lama mengenal mereka ketika di Mojokerto sebagai anggota Dewan Pertahanan Daerah Surabaya. Pada bulan Agustus 1948, ketika ada kematian seorang tetangga dr. Kresno,

---

25. Kota yang masih termasuk daerah RI sesudah Agresi Militer I Belanda (1947).

ternyata para pelayatnya sebagian besar “kenalan” lamanya sewaktu di Mojokerto, antara lain Sumarsono, Abdul Muntolib, Alamsah, Supardi dan Kusnandar.<sup>26</sup>

Perkembangan selanjutnya di Madiun seringkali adanya rapat umum. Rapat umum yang terbesar terjadi pada tanggal 10 September 1948, dihadiri oleh Musso dan Amir Sjarifuddin. Sebelum rapat itu, di Madiun mulai berdatangan pasukan yang berseragam hitam hitam, yang tidak diketahui darimana asalnya. Mereka menempati gedung-gedung sekolah, yang kebetulan sedang libur. Semakin hari, semakin bertambah. Setelah rapat umum mereka mulai “unjuk gigi”. Di Pasar Besar (pasar kota), mereka berjaga-jaga di setiap sudut. Di alun-alun, jalan ke luar masuk dijaga. Stasiun kereta api serta perempatan jalan-jalan besar juga dijaga oleh pasukan komunis tersebut. Jembatan Kali Madiun dijaga ketat, setiap pejalan kaki digeledah. Penduduk kota dilanda ketakutan. Para anggota partai politik lawan PKI dan para pamong praja dikejar-kejar atau diculik. Antara tanggal 10 dan 18 September beberapa tokoh lawan politik PKI diculik dan dibunuh, antara lain: Ketua PNI Suradji dan bendaharanya Atim Sudarso, tokoh Taman Siswa, Iskandi, tokoh Partai Murba, Hardjowiryono, Suhud dari Apolo, serta tokoh Masyumi, Kusen dan Abdul Hamid.

Sedangkan tokoh pemerintahan yang diculik antara lain: Walikota Supardi (dari Banyumas), Patih Madiun Sarjono, Wedana Dungus Charis Bagyo, Camat Manisrenggo Martolo beserta staf kecamatan, Camat Jiwan Abdul Rachman, Guru Sekolah Pertanian Suharto, Pegawai Dinas Kesehatan Muhammad, Camat Kebonsari Ngadino, Mantri Polisi Kustejo, Wedana Uteran Sukanto dan Camat Takeran Priyontomo.

Di Magetan Bupati Sudibyo, Patih Sukardono, Penilik Sekolah Prawoto Yudokusumo dan guru Sukardi juga dibunuh secara mengerikan.

---

26. Wawancara simultan tentang Pemberontakan PKI di Madiun 1948, khususnya keterangan Dr. Kresno, Madiun, November 1984

Selain itu, Kepala Kepolisian Karesidenan Madiun Komisaris Besar Sunaryo, diculik dari kantornya kemudian dinaikkan ke atas truk terbuka dan diarak keliling kota, diiringi barisan demonstran berseragam hitam. Ia dihina dengan kata-kata kotor, yang diselingi dengan teriakan (yel) : “Sayap Kiri, Yes! Sayap Kanan, No ! “Akhirnya Komisaris Besar Sunaryo dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak pernah kembali. Juga Kepala Polisi Distrik Uteran Achmad dan Inspektur Polisi Suparlan dari Mobile Brigade menjadi korban penculikan. Di samping para tokoh politik dan pemerintahan, juga tokoh-tokoh agama dibunuh. Antara lain Kyai Selo (Abdul Khamid), bersama anaknya, Kyai Zubir dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup.

Hampir setiap hari di dalam kota berlangsung demonstrasi dari pasukan hitam-hitam, sambil berteriak-teriak: “Sayap Kiri, Yes!, Sayap Kanan, No!” Gerakan demonstrasi ini juga meluas ke daerah-daerah Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Gorang Gareng rupanya menjadi basis utama gerakan. Tokoh PKI di sini yang terkenal kekejamannya adalah Tjipto Sipong. Di tempat ini berlangsung proses eksekusi anggota-anggota partai lawan politik PKI Mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang bernama sumur Soca, di desa Bendo. Sedang tawanan-tawanan yang berasal dari tempat lain, dikumpulkan dalam sebuah gudang di komplek 5 pabrik gula. Kemudian mereka dibunuh di tempat tersebut. Di Ngawi terkenal nama Sumirah seorang algojo wanita, ia mengikat para tawanan pada setiap tiang yang ada di kantor kabupaten. Kemudian satu persatu dipancungnya.

Tindakan penganiayaan dan pembunuhan oleh PKI terhadap para pejabat RI berlangsung pula di Pati. Kolonel Sunandar Komandan Resimen Pati, ditangkap dan dibunuh di dekat Loji Ijo Randublatung. Pejabat lain yang menjadi korban pembunuhan ialah Mr. Iskandar (Residen Pati), dr. Roekmono Adi (Kepala Rumah Sakit Elora), Sumodarsono (Kepala Sekolah), Gunandar (Kepala Bank BRI) dan Abu Umar anggota KNIP wakil Sarekat

Tani Islam Indonesia (STII)<sup>27</sup> Para korban dimasukkan ke dalam sumur secara bersama di desa Poh Rendang, kecamatan Tunjungan Kawedanan Ngawen Elora. Di sini pembunuhan dilakukan dengan cara menjepit leher tawanan dengan bambu. Dua batang bambu yang ujungnya diikat kemudian dijepitkan ke leher, setelah itu mereka baru dimasukkan ke dalam sumur.

Sementara itu PKI telah menyiapkan orang-orangnya untuk mengganti para pejabat daerah, antara lain: Abdul Muntolib, bekas sekretaris pucuk pimpinan PRI Surabaya, anggota Dewan Pertahanan Jawa Timur dari Pesindo; dipersiapkan sebagai Residen Madiun; Supardi, bekas anggota Sekretariat PRI Surabaya, diangkat sebagai Wakil Walikota Madiun, untuk mendampingi Walikota Madiun; Sugeng, pegawai pengadilan negeri, bekas anggota Dewan Pertahanan Daerah Madiun, dipersiapkan sebagai Bupati Madiun; Alamsah, bekas anggota Dewan Pertahanan Daerah Surabaya dari Pesindo, dipersiapkan sebagai Sekretaris Residen; Tjipto Sipong, seorang aktivis PKI dari Gorang-Gareng, dipersiapkan sebagai Bupati Magetan. Suharyo, seorang PKI, dipersiapkan sebagai Bupati Ponorogo; Sunardi, seorang bekas anggota *Jibakutai* dan anggota Pesindo, dipersiapkan sebagai Bupati Ngawi; dan Prawiro Utomo, dipersiapkan sebagai Bupati Pacitan. Demikian pula pada tingkat desa, telah dipersiapkan dewan-dewan desa, sekaligus calon kepala desanya. Di samping itu dilakukan beberapa tindakan oleh FDR/ PKI yang mendukung persiapan mereka.

Dengan demikian perebutan kekuasaan dan pemberontakan PKI di Madiun ini telah dipersiapkan. Sejak awal infiltrasi terhadap APRI dilakukan, pihak komunis memperpanas situasi melalui teror teror terhadap masyarakat dan berupaya mengalihkan perhatian pemerintah RI dengan suatu gerakan penyesatan di Surakarta pada sejak tanggal 13 September 1948 yang dikenal sebagai Insiden Bersenjata di Surakarta.<sup>28</sup>

---

27. Wawancara dengan Mayjen (Purn) Munadi, Semarang 20 Februari 1989

28. Wawancara dengan Mayjen (Pur) Munadi, Semarang 20 Februari 1989

## **BAB VII PENUTUP**

Sebagaimana diketahui dalam pembahasan sebelumnya, Marxisme Komunisme lahir di Eropa sebagai tantangan terhadap paham Kapitalisme yang tengah berkembang sehingga mendorong munculnya gerakan-gerakan perlawanan dari kaum buruh. Untuk memperkuat gerakan-gerakan tersebut maka terbentuklah persekutuan buruh internasional yang terkenal dengan nama Internationale pertama tahun 1848.

Komunisme pertama kali dipraktekkan di Rusia oleh Lenin, setelah ia berhasil memimpin kaum Bolshvik (Partai Buruh Sosialis Demokrasi Rusia) mengadakan kudeta di Rusia 7 November 1917. Sejak kudeta tersebut maka Rusia yang kemudian dikenal sebagai negara Uni Sovyet menjadi negara Komunis pertama dan dari negara inilah komunisme disebarkan ke seluruh dunia dalam upaya mengkomunikasikan dunia.

Sementara itu komunisme masuk ke Indonesia diperkenalkan oleh H.J.F.M Sneevliet seorang anggota Social Democratische Arbuters Party/ SDAP atau partai buruh Belanda yang beraliran sosial demokrat di Indonesia. Sneevliet berusaha untuk menyebarkan ideologi komunis khususnya melalui organisasi buruh, karena buruh adalah salah satu kelas yang tertindas dengan mendirikan organisasi Indische Sosial Democratische Veriniging/ISDV pada Mei 1914 di Semarang.

Ketika Sneevliet mendengar berita kemenangan kaum Bolshvik dalam Revolusi di Rusia, maka ia menyerukan agar revolusi di Rusia diikuti juga di Indonesia. Akibatnya pimpinan ISDV termasuk Sneelvet diusir dari Indonesia oleh pemerintah Belanda. Diusirnya orang-orang Belanda yang terlibat dalam ISDV tersebut mengakibatkan munculnya aktivis-aktivis bangsa Indonesia di dalam kepemimpinan ISDV seperti Semaun dan Darsono.

Sejak tanggal 2 Mei 1920 ISDV diganti namanya menjadi Perserikatan Komunis Indie agar dapat menjadi anggota Comintern (organisasi komunis dunia) yang didirikan di Rusia pada tahun 1919), karena syaratnya harus sebuah organisasi Komunis.

Organisasi Komunis Indie yang juga dikenal sebagai PKI ini pada 13 November 1926 dini hari melancarkan revolusi di Jakarta, yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Aksi PKI yang kemudian dikenal dengan pemberontakan PKI 1926 dapat ditumpas oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sebagai akibat aksi itu para pemimpinnya dan massa yang terlibat dijatuhi hukuman atau dibuang ke Digul/Irian Barat.

Sejak gagalnya Party Komunis Indie/PKI melawan Pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1926-1927, kegiatan PKI tidak muncul secara ilegal. Demikian pula setelah pecahnya Perang Dunia Kedua dalam tahun 1939 di Eropa dan dalam tahun 1941 di Asia Timur, serta didudukinya Indonesia oleh pasukan Jepang. Menurut pandangan gerakan komunisme internasional, dalam perang dunia ini yang berhadapan adalah musuh-musuh komunisme, yaitu kubu kapitalisme Eropa Barat-Amerika Serikat berhadapan dengan kubu naziisme-fasisme Jerman, Italia dan Jepang. Dalam taraf awal, Uni Soviet sebagai "tanah air sosialisme" mengambil sikap netral dan mengadakan perjanjian tidak saling menyerang dengan Jerman Nazi. Namun dalam tahun 1940 Jerman Nazi justru menyerang Uni Soviet, yang secara militer tidak siap menghadapi serangan ini. Uni Soviet menerima bantuan militer dalam jumlah besar dari Amerika Serikat.

Untuk membenarkan kebijaksanaan kerja sama Uni Soviet dengan kubu kapitalisme ini, gerakan komunisme internasional menyusun Doktrin Dimitrov yang isinya membenarkan kerja sama kubu komunisme internasional dengan kubu kapitalisme dalam menghadapi musuh bersama, yaitu kubu naziisme dan fasisme. Doktrin Dimitrov ini dianut sejak Kongres ke VII Komunis

Internasional Juli-Agustus 1935 sampai tahun 1947. Garis baru itu menghendaki kerja sama dengan negara-negara barat dan gerakan pembebasan nasional di Asia Afrika.

Setelah didudukinya Indonesia oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942, Mr. Amir Sjarifuddin, seorang penganut paham komunisme terselubung yang pada saat itu secara resmi menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) berkooperasi dengan Pemerintah Hindia Belanda, dan bersedia menerima dana rahasia untuk melakukan gerakan intelijen bagi kepentingan Hindia Belanda selama pendudukan Jepang. Amir Sjarifuddin tertangkap oleh Kempeitai Jepang dan dijatuhi hukuman mati, Akan tetapi, atas permintaan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, ia dapat diselamatkan. Sejak itu tidak ada tokoh komunis Indonesia yang menunjukkan aktivitasnya secara legal. Tidak ada tokoh komunis yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) maupun aktivitas-aktivitas lain dalam memperjuangkan kemerdekaan sampai tercetusnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan demikian, dalam persiapan Proklamasi Kemerdekaan 17-Agustus 1945, maupun dalam penyusunan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 PKI tidak pernah ikut serta. Namun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mulailah muncul kembali tokoh-tokoh komunis bahkan Mr. Amir Syarifuddin berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, ia berusaha supaya ideologi komunis tersebut berada dalam Angkatan Perang dengan jalan membentuk pendidikan politik Tentara/Pepolit pada tanggal 30 Mei 1946. Sejalan dengan garis Demitrov itulah Amir Syarifuddin meneruskan perundingan perundingan dengan Belanda yang akhirnya menghasilkan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Perundingan Renville tersebut kemudian mendapat reaksi kuat di kalangan partai-partai politik yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir

Syarifuddin untuk selanjutnya digantikan oleh Kabinet Hatta. Berlangsungnya perundingan Renville tersebut bersamaan dengan terjadinya perubahan dalam strategi gerakan Komunis Internasional yang dipimpin oleh Stalin. Garis Dimitrov yang menganjurkan bekerja sama antara semua kekuatan anti fasis ditinggalkan dan diganti dengan Garis Zhdanov yang menyatakan adanya dua kubu, yakni “kubu imperialis dan demokratis” yang dipimpin oleh Amerika Serikat serta kubu anti imperialis dan anti demokratis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Pergantian strategi itu dijalankan dengan pembentukan Kominform di Warsawa pada tanggal 22 Desember 1947. Dalam suatu pernyataan, Kominform berseru pada partai-partai komunis di seluruh dunia supaya mereka melaksanakan tugas khusus, yakni memegang panji-panji pertahanan kemerdekaan nasional dan kedaulatan dari pada negaranya masing-masing. Kemudian Andrei Zhdanov dalam pidato di hadapan Kominform menyerukan kepada semua partai komunis untuk merapatkan barisan mereka dan mempersatukan gerak langkah mereka atas dasar anti imperialisme dan “demokrasi”. Secarakhusus ia memerintahkan mereka untuk berpisah dengan kaum Sosialis Kanan. Sebagai akibat penetapan garis Zhdanov itu, partai-partai komunis di seluruh dunia berputar haluan.

Sejalan dengan garis Zhdanov tersebut, maka era kompromi dan perundingan dengan kaum kolonialis maupun nasionalis berakhir dan kaum Komunis Indonesia kemudian menerapkan garis keras tersebut. Semua langkah yang telah dirintis atau ditempuhnya dikoreksi dipersalahkan termasuk langkah-langkahnya sendiri yang telah ditempuh oleh Amir Syarifuddin. Karena itulah kaum Komunis termasuk Amir Syarifuddin sendiri mengancam perundingan Renville yang telah ditandatanganinya. Mereka dengan terang terangan menentang program Kabinet Hatta terutama program Re-Ra (Rekonstruksi- Rasionalisasi Angkatan Perang), sebab diperhitungkan merugikan dirinya (komunis). Golongan sayap kiri tersebut yang terdiri dari PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh,

Pesindo, pada tanggal 26 Februari 1948 bergabung dalam FDR- (Front Demokrasi Rakyat) dan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. FDR dengan terang-terangan terutama menentang program Re-Ra yang merupakan salah satu program Kabinet Hatta. Untuk menjatuhkan Hatta di bidang ekonomi FDR melakukan aksi memperburuk perekonomian Indonesia. Mereka menghasut buruh tani supaya melakukan pemogokan. Pemogokan yang terbesar terjadi di perkebunan kapas Delanggu tanggal 23 Juni sampai 16 Juli 1948.

Ofensif Kaum Kamunis tersebut kemudian ditingkatkan dengan pulangnya tokoh kawakan Musso, yang telah 20 tahun lebih berada di Uni Sovyet dan negara-negara Sosialis. Musso yang datang kembali dengan menggunakan nama samaran Suparto (sebagai sekretaris Suripno, tokoh komunis muda yang ditugaskan Pemerintah untuk menjajagi kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Timur) segera mengadakan pembaharuan dalam struktur organisasi PKI.

Musso datang di Indonesia dengan membawa pesan untuk menerapkan garis baru Komintern. Dalam hal ini ia memperkenalkan konsepsinya yang diberi nama "Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Musso menghendaki kaum komunis harus merebut kekuasaan dan hanya boleh ada satu partai berlandaskan Marxisme oleh karena itu partai-partai yang bernaung dalam FDR harus menyatukan diri dalam kelas pekerja; dan kaum komunis harus mengadakan front persatuan nasional yang dikendalikan PKI dalam rangka membentuk pemerintahan koalisi, yakni suatu pemerintahan Front Nasional dengan partai Komunis Indonesia.

Dengan kembalinya Musso tersebut, maka pimpinan FDR kemudian ada di bawahnya; dan pada bulan Agustus 1948 partai-partai dalam FDR meleburkan diri ke dalam PKI. pada tanggal 1 September Musso dipilih menjadi Ketua Politbiro PKI yang diperluas. Untuk selanjutnya kampanye Musso yang mengisaratkan perlunya perebutan kekuasaan/coup ditingkatkan melalui rapat-rapat raksasa.

Dalam kampanye Musso selalu menyerang pemerintah Hatta. Sementara itu PKI telah menyusupkan orang-orangnya untuk mengganti pejabat daerah. Demikian pula pada tingkat desa telah dipersiapkan dewan-dewan desa, sekaligus calon kepala desanya.

Sementara itu untuk mengalihkan perhatian pemerintah Indonesia maka PKI yang berupaya menciptakan suatu wild west di Surakarta (menurut istilah FDR) untuk mengalihkan perhatian pemerintah ke kota tersebut, dan mengikat pasukan-pasukan TNI di kota Solo. Akibatnya pada pertengahan bulan September 1948 pecahlah peristiwa Solo/Surakarta yakni terjadinya konfrontasi bersenjata antara pasukan pemerintah dan pasukan FDR/PKI. Namun upaya PKI untuk menjadikan kota Solo sebagai suatu wild west berhasil digagalkan pemerintah. Pemerintah kemudian menempatkan Kolonel Gatot Subroto (Komandan Corps Polisi Militer sebagai Gubernur Militer Solo). Kekalahan militer di Solo didukung sikap keras Moh. Hatta serta penolakan Masyumi dan PNI untuk bersama-sama membentuk Front Nasional mendorong Soemarsono, Supardi dan kawan-kawan mendahului dengan merebut inisiatif melakukan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September 1948.

## DAFTAR SUMBER

### BUKU

Aidit, D.N. Pilihan Tulisan I, dalam artikel “*Menggugat Peristiwa Madiun*”: Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1959.

\_\_\_\_\_, *Lahirnya PKI dan Perkembangannya*, Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1955.

Blumberger, Petrus J.T.H., *De Communistische Beweging in Nederlands Indie*, Haarlem, 1935.

Brackman, Arnold. c., *Indonesian Communism a History*, Frederick & Prueger, New York, 1963.

Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*, Dinas Sejarah Militer Kodam VIII Diponegoro dan CV. Borobudur Megah, Semarang, 1977.

Djamhari, As'ad Saleh, *Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang)*, Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1979.

Harja Oedaja, Sjamsoc, *Kaoem Boeroeh dan Indonesia Merdeka*.

Himawan Soetanto, Yogyakarta 14 Desember 1948, *Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1)*, PT. Gramedia, Jakarta, tahun 2006.

Kahin, George Me. Tuman, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, New York, 1962.

Kahin, Audrey R. (editor), *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990.

Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia*, Provinsi Djawa Timur, Surabaya, 1953.

Kroef, Justus M. van der, *The Communist Party of Indonesia*, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1965.

Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis*, PT Yudha Danna Corporation, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_, *The development of the Indonesian Communist Party*, Cornell University Press, New York.

Lucas, Anton E., *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989

Malaka, Tan, *Menuju Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Marsudi Djamal, *Menjungkap Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun*, Merdeka Press, Djakarta, 1966

Me Vey. Ruth T, *The Soviet View, The Indonesia Revolution: a study in the Russian attitude toward Asian Nationalism*, New York, Cornell University, 1957.

\_\_\_\_\_, *The Rise of Indonesian Communism*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1965

Mohammad, Gunawan, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*, Jakarta, 1983.

Nasution. A.H., *Jenderal Tentara Nasional Indonesia*, jilid II, Seruling Masa, Jakarta, 1968.

\_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid II Disjarah AD dan Penerbit Angkasa, Bandung, 1977.

\_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid VII Disjarah AD dan Penerbit Angkasa, Bandung, 1978.

Nasution, Dr A.H. *Memenuhi Panggilan Tugas*, jilid II, Gunung Agung, Jakarta, MCM XXXIII.

Kepemimpinan Pak Dirman dalam Tingkah Laku Politik *Panglima Besar Soedirman*, (Editor: Sides Sudyarto), PT. Karya Unipress, Jakarta, 1983.

Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia* (G.30 S/PKI), Jakarta, 1994.

Notodidjojo, Soebagjijo Ilham, *Riwayat Hidup Wilopo*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta, 1979.

Notosusanto, Nugroho (Editor), *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan implementasi Dwi Fungsi ABRI*, Sinar Harapan, Jakarta 1984.

\_\_\_\_\_, *Pertempuran Surabaya*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985

Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI, September 1948 di Madiun*, 1966

Poeze, Harry A, Tan Malaka, *Levensloop von 1987 tot 1945*, S. Gravenhage, Martinus Bijhoff, 1976.

Pringgodigdo, AK. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, 1986.

Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, *40 Hari Kegagalan G. 30.S*, Jakarta, 1965.

Pusjarah ABRI, *Peranan Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan*, Jakarta, 1985.

Ranumihardja, Dahlan, *Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1979.

Rutgers, S.J., Ir., *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, CV. Hajam Wuruk, Surabaya, 1951

Sastrosatomo, Soebadio, *Perjuangan Revolusi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*, Bandung, 1969.

Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro: *Sedjarah TNI-AD Kodam VIII Diponegoro*, Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu,

Jajasan Diponegoro, Semarang, 1968.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, Jakarta, 1994.

Sjahrir, Sutan, *Pejuangan Kita*, Yayasan 28 Oktober, Bandung, 1979.

Yahya, A Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gajah Mada University Press, 1982.

## MAJALAH

- *Kedaulatan Rakyat*, 1946.
- *Antara*, 1 April 1946.
- *Merah Putih*, 8 Nopember 1945.
- *Nasional*, 1 Pebruari, 30 Maret 1948.
- *Siasat*, 20 Juni 1948.

## ARTIKEL

- "Kemenangan Republik atas Komunisme, Bisul-bisul harus dilenyapkan", *Indonesia Timur*, 2 Oktober 1942.
- Sekitar Pendudukan Madiun, Musso Cs Lari ke Dungus, *Indonesia Timur*, Sabtu, 2 Oktober 1942.
- Anhar Gonggong, "Pemanfaatan Islam oleh Komunis", *Persepsi*, No. 1 Th. 1979.
- Ruslan Abdulgani, "100 hari di Surabaya yang menggemparkan dunia" *Surabaya Post*, 30 Oktober 1973.

## MANUSKRIP

Handayani, Purwaningsih Sri, "Pergolakan Sosial Politik di Serang Pada Tahun 1945. Kasus Gerakan Aksi Daulat Ce Mamat", *Skripsi* FSUI, Jurusan Sejarah, Tahun 1984.

Herwin, Marda, "Tangerang 1945-1946 Pemerintah dan Rakyat", *Skripsi Sarjana*, Jakarta, 1985.

Sinaga, Effendi Permana, "Partai Sosialis Suatu Kemelut dalam Mencari Identitas", *Skripsi*, FSUI Jurusan Sejarah, 1990.

Soe Hok Gie, "Simpang Kiri dari sebuah Jalan", *Skripsi*, FSUI, Jakarta, 1969.

Soeranto, Soetanto, "Pemberontakan PKI Moh Joesoeph tahun 1946 di Cirebon", *Skripsi*, FSUI, 1981.

Wisesa, E. Dwi Arya, Partai Buruh Indonesia *Skripsi*, Sarjana FSUI Jurusan Sejarah, 1988.

## WAWANCARA

Wawancara dengan Mayjen Soenitijoso, Jakarta, 13 April 1976.

Wawancara simultan tentang Pemberontakan PKI di Madiun 1948 khususnya keterangan Dr. Kresno, Madiun, November 1984.

Wawancara dengan Mayjen (Pur) Moenadi, Semarang, 20 Februari 1989.

# INDEKS

## A

Abdulgani, Ruslan, 82,85,160

Abdullah, Sjah, 51,52, 53,55

Adiwerna, 60

Adrian, 86

Ahmad (Mayor), 59

Aidit, D.N, 39,97,98,102,126,157

Alamsah, 148,150

Ali, Mohammad, 47,98,

Aliarcham, 24, 25, 26, 27, 32, 42 Alimin,25,27,32,33,34,36,97,98,99

ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, 107,108,110

Amangku Ali, 48

Ambon,63

Amerika Serikat, 124,130,152,154

Amir, 2, 3, 39,40, 41, 50, 51, 62, 63, 64, 65, dst

AMI, Angkatan Muda Indonesia, 82,85

AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia, 57, 58, 59, dst.

anschluse, 69.

Anyer, 45

API, Angkatan Pemuda Indonesia, 57, 58, 60, 82, dst.

Armunanto, 39, 40,70

Arselan, Sidik, 104, 143, 145  
Asia Tengah, 36  
Asia Tenggara, 12, 33, 130  
Asrama Indonesia Merdeka, Jakarta, 73  
Asrama Menteng 31, Jakarta, 45  
Atmadji, 39, 50, 74, dst  
Atmadji, Djoko, 35, 88  
Atmodjo, Sumo, 35, 36, 37, dst.  
Australia, 42, 51  
Azis, Abdul, 39, 41

## **B**

Badan Direktorium Dewan Pusat, 51  
Baharuddin Zainul, 93.  
Balapulang, 60  
Bandung, 24, 34, 37, 41, 46, dst  
Banten, 34, 43, 44, 45, 46, dst.  
Banumahdi (Mayor), 78, 105  
Banyumas, 34, 40, 48  
Bapera = Badan Pembantu Aparat Pemerintah, 55  
BARA = Barisan Rakyat, 82  
Barisan Pelopor, 49, 57, 65  
Barisan Sangiang, 49  
Basri, KH, 61  
Batavia, 24, 33

Batuah, Datuk Haji, 25

BBI = Barisan Buruh Indonesia, 85, 86, 87, 88, 89,90

Baars, A, 20, 21

Belanda, 1, 19, 20, 21,22 dst.

Bengawan Solo, 33

Bersgma, P, 20, 21

Besuki, 97

Bismo (Mayor), 122

BKR, Badan Keamanan Rakyat, 45, 46, 50, 51, 54, dst.

Blitar, 40, 62, 108, 143, 145

Block Within (aksi di dalam), 7

Boedisoesetyo, Mr, 68, 69, 70

Bogor, 48

Bojonegoro, VI, 2, 40, 50, dst.

Boven Digul, 38,44

Branstedder, J.A, 15

Brebes,55,58,63,65

Brotokusumo, Martono, 105

BTI, Barisan Tani Indonesia, 74, 88, 90, dst

Budisutjitro, 24,31,32

B.O., Boedi Oetomo, 19,164

## C

Calcuta, 96

Chairun, Achmad, KH, 26

Chan, Syamsudin, 50  
Ciamis, 34  
Cina, 14, 20, 35, 53 dst  
Ciomas, 47,48  
Cirebon, 74, 92, 105, dst.  
Comal, 68  
Combat intelligence, 86  
Coup, 99,126, 159  
CSI, Central Sarekat Islam, 21, 23

## **D**

Dahlan (Letkol), 83, 142, 159  
Daljono, Moehammad, Mr., 89 Danoehoesodo,89,91  
Darmasetiawan, Menteri Kemakmuran, 78  
Darsono, 21, 23, 24, 25, dst  
Darusman, Maruto, 41, 79, 81, 91, dst  
Dasuki (Mayor), 78  
de facto, 41 Deos,35,  
Dewan Rakyat, 45, 46, 47, dst.  
Digul, 31, 37, 38, dst  
Dimitrov, 37, 96, 130, 152, 154  
Djajadiningrat, Hilman Raden, Bupati Serang, 44, 46  
Djayengpratomo, 41

Djie, Tan, Ling, 38, 92, 93, 101, dst  
Djojobojo, 45,73  
Djojodiningrat, Abdulmadjid, 41, 81, 90, dst  
Djojopratikrjo, Sukono, 132  
Djokosudjono, 41  
Djokosuyono,40, 78,81,84,105,109  
Djoni,M, 98  
Djumahara, Bupati Pandeglang, 30.

## **E**

EKKI = Eksekutif Komite Komunis Internasional, 28, 35  
Eropa,1, 5, 9, 10 ,dst

## **F**

Fangiday, Francisca, 130  
Fasisme, 37  
FDR, Front Demokrasi Rakyat, 3, 4, 101, 102, 114, dst.  
Front Nasional, 102, 119, 139, 155, 156  
Front Persatuan, 64, 66, 92, 126

## **G**

gendarmarie bersama, 81  
Gaos, 78  
GBP3D, Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah, 64, 65,66  
Geraf, Gerakan Anti Fasis, 39, 40, 70, 91, 93, 105, 108  
GERINDO, Gerakan Rakyat Indonesia, 38,153

Gondoprato, 41,91

GRR, Gerakan Revolusi Rakyat,137

Gunadi, 106

## H

Hamdani, Mr., 72

Harjono, 38, 81, 90, 91

Harsono, Tjock, 135

Hasan, M. alias Atjong, 36

Hatta, Mohammad, VII, 3, 34, 35, 40, dst.

Hendraningrat, Rukminto (Mayor), 118

Hindromartono, Mr., 40, 69, 70, 71, 72, dst

Hitler, 37

Hotel Phoenic, 76

Husin Amir, 135

## I

Idris, Iskandar (Kolonel), 54, 57, 61, 67

Idris, Kemal, 38, 39

Indonesia, 1, 2, 3, 4, dst.

Inggris, 5, 9, 54 ,67, 106

Isbandhie, 90

ISDV = Indische Social Democratische Vereniging, 19, 20,dst

Iskandardinata, Oto, 53, 55

Ismail, dr., 40, 105, 108, 168

Iwabe (Mayor Jenderal), 106

## J

Jadau, A., 134, 139, 143

Jahya, Daan, 54, 160

Jawara, 48, 59, 168

Jayusman, Sulaiman, 77

Jepang, 2, 39, 40, 41, dst.

Joesoeph, Mohammad, Mr., 39, 41, 50, 73, dst.

## K

Kabinet “Pisau Cukur”, 89, 95

Kaking, Tb., 47

Karawaci, 51

Karesidenan Pekalongan, 55, 56, 58, dst

Kartasasmita, Didi, 55

Kartawigoena, Pandoe, 85

Kartidjo (Kapten), 115, 122

Kasim, MA., 98

Katamhadi, Jenderal Mayor, 95, 96, 108, dst

Kecamatan Pangkah, 169

Kempetai, 41, 45

Kertapati, Sidik, 39

Ketapang, 53

Khatib, Achmad, KH., 29, 30, 31

KNI, Komite Nasional Indonesia, 45, 47, 49, dst.

Koebarsih, 89  
Koesnani, 75,  
Koesoemo, RM., 49,50  
Kolonialisme, 31  
Komintern, 10, 11, 12, 13, dst.  
Komite van Aksi, 81 Komunis, II, VI, 4, 5, 7, dst  
Komunisme, II, IV, V, VI, VII, 1, 3, dst.  
Kresek, 53  
Kresno, dr., 147, 161  
Krsissubanu, 135  
Kumbino, Sabar, 120  
Kusnan, 129  
Kusnandar, 146, 147  
Kusumasumantri, Iwa, Mr., 89,96  
Kutil, 59, 61

## L

Laskar Gulkut, 47, 48  
Laskar Hitam, 52, 53  
Laskar Pasukan Berani Mati, 52  
Laskar Rakyat, 48, 101, 109, 110, 141  
Laskar Ubel-ubel, 33, 35, 37, 39  
Lawang (Malang), 48, 52, 54, 55  
Lebak, 45, 46, 47, 48

Leimena, J., dr., 54  
Lenggaong (Jawara), 139  
Lenin, 5, 7, 16,17, dst  
Leninisme, 7, 8, 12, 13, 14, dst  
Linggajati, 77, 98, 99, dst.  
Lukman, 97,103, 126

## **M**

Madiun, IV, 4, 6, 40, dst.  
Malaka, Tan, 3, 31, 32, dst.  
Mamat, Ce, 43, 45, 46, 47, dst.  
Marhadi (Letkol), 144  
Martoatmojo, Boentaran, dr., 89  
Marx, Karl, 5, 6, 8, 16, 17,24  
Marx House, 145  
Marxisme, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, dst.  
Maryono, 58, 59  
Masyumi, 102,116,117,118, dst  
MBKD, Markas Besar Komando Djawa, 132  
MBKS, Markas Besar Komando Sumatera, 132  
Melik, Sayuti, 61, 95  
Mertokusumo, Besar, Mr., 57,62  
Mijaya, K, 40, 62, 64, 65, dst.  
Misbach, Haji , 23, 24, 50  
MKR, Marine Keamanan Rakyat, 50, 106, 107

Moesirin, 90  
Moestopo, Drg., 106  
Mogot, Nicolas, 53  
Mojokerto, 106, 145, 147, 171  
Mook, van, 39  
Mukrnin, Moeffreni, Letkol., 78  
Muntolib, Abdul, 147, 149  
Musso, 4, 24, 31, 32, 33, dst.  
Mustofa, 107, 115  
Muwardi, dr., 137

## **N**

N arya, Kyai, 48  
Nazir, M., 107, 110  
Nederland, 81, 97  
NICA, 51, 53, 63  
Nitirnihardjo, Maruto, 81, 137  
Njono, 81, 85, 86, dst  
Njoto, 103  
Nungtijk, 39, 50

## **O**

Oedaja, Sjarnsoe Harja, 86, 87, 88, 89, 157  
Oentoeng, Djoko (Brigade), 38, 50, 104, dst  
Onderbouw, 70, 71  
Oei Gee Hwat, 39, 81, 90, 91, 92, 93

## **P**

Pagongan, 43

Pamudji, 38, 39, 40, 70

Paras, Partai Rakyat Sosialis, 92

Pardi, M., 107

Pama, Ibnu, 66

Farsi, Partai Sosialis Indonesia, 65, 70, 91, 92

PBI, Partai Buruh Indonesia, 87, 88, 89, 90, dst

Pekalongan, 34, 55, 56, 57, dst

Pemalang, 40, 55, 62, 63, 64, dst

Pepolit, Pendidikan Politik Tentara, 109, 110, 132, 143, 153

Perserikatan Komunis di Indie, 21

Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, 83, 84, 85, 101, dst

PI, Perhimpunan Indonesia, 34, 35, 78, 93

PID, 37, 45, 51

PKI, 2, 3, 4, 6, 9, dst

PP, Persatuan Perjuangan, 88, 89, 94, 110

Prambanan, 32, 123

PRI, Pemuda Republik Indonesia, 41, 58, 64, dst

## **R**

Rachman, Abdul (Mayor), 46, 48

Rachmat, S., dr., 71

Reebrinck (hotel), 75, 77, 78

Rejoagung (pabrik gula), 46  
Renville, 101, 113, 115, 118, 125, dst  
Ribut (Mayor), 53, 77, 78, 95  
Rusia, 6, 7, 10, 11, 14, 20, dst

## S

Sachyani, 61  
Sadjarwo, 90  
Sajidiman, Sukanto, 148  
Sakirman, Ir., 39, 59, 60, 61, dst  
Saleh, Chaerul, 45, 81, 82, 83, 84, 95  
Salim, Agus, Haji, 24, 25, 44, 46, 49, dst  
Samadikun (Residen Madiun), 118  
Sardjono, 24, 31, 33, 41, dst.  
Semaun, 21, 22, 23, 27, dst  
Setiadjid, 41, 81, 90, 93, 145  
silent coup, 2, 47  
Sipong, Tjipto, 149  
Sitorus, LM, 84, 92, 93  
Sjarifuddin, Amir, 2, 3, 38, 39, dst.  
SKBI = Serikat Kaum Buruh Indonesia, 37  
Sneevliet, 19, 20, 21, 24, dst  
SOBSI = Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, 90,  
101, 102, 119, 120, 121, dst  
Soediarso (Letkol), 134

Soedirman, Jenderal, 3, 69, 103, 108, dst  
Soegiono, 84  
Sukarno, 3, 40, 44, 48, dst.  
Soeprapti, 90  
Soeryokoesoemo, Wijono, 72, 73, 87, dst  
Solo, 4, 24, 32, 33, dst.  
Soviet, 11, 13, 14, dst.  
SPDT = Staf Pertahanan Djawa Timur, 144  
Stalin, 5, 15, 16, 24, dst.  
STC =Sub Teritorial Comando, 147  
Subardjo,Achmad,Mr., 165, 169, 174  
Sudarsono (Jenderal Mayor, Panglima Divisi Yogyakarta), 76,  
93,96  
Sudisman, 39, 99, 145  
Sukabumi, 23, 40, 74  
Sukarni, 81, 95  
Sumadi, Achmad, 38,41  
Sumarsono, 41, 146, 147  
Sumirah,149  
Supeno, 85, 92, 129  
Surabaya, 9, 19, 20, 21, 23, dst.  
Surakarta, 4, 34, 86, 94, dst  
Suripno, 41, 81, 124, 126, 130, 155

Surjopranoto, 22

Sutarto (Kolonel, Panglima Divisi IV Panembahan Senopati), 133

## **T**

Tambunan, Mr., 137

Tan Djiem Kwan, 63

Tan Ling Djie, 38, 92, 93, 101, 116

Tanah Abang, 41, 45, 106

Tangerang, 2, 34, 48, 49, 50, dst.

Tasripin, 68, 76

Teror, VI, 43, 47

Tjokroaminoto, Oemar Said, 20, 23

Tjugito, 39

TKR, Tentara Keamanan Rakyat, 46, 47, 48, dst.

TLRI, Tentara Laut Republik Indonesia, 106, 107, dst

TNI- Masyarakat, 49, 101, 110, 111, dst

Trimurti, SK., 84, 90, 91

TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, 114

Trotsky, 33

## **U**

Uni Soviet, 11, 76, 130, dst

Usman, 53, 55, 92

## **V**

Volksfront, Front Persatuan Perjuangan, 92, 94

VSTP, Vereeniging Nan Spoor en Tremsweg Personell, 19, 20, 21, 22

## **W**

Wasd, Kyai Haji, 44

Widagdo, S., 84

Widarta, 39, 40, 62, 63, dst.

Widjajasastra, Ruslan, 82, 105, 143

Wijono, 72, 73, 87, 88, dst

Wikana, 39, 50, 81, dst

## **Y**

Yogyakarta, 9, 22, 25, 31, 58, dst.

## **Z**

Zdhanov, 130

# LAMPIRAN I

## [Sekitar pendudukan Madun]

### Musa ca lari ke Dungs

Tentara Belanda kembali ke ta Madun oleh pasukan "Korps Militaria" radio "Suara Indonesia Merdeka" telah kembali menyiarkan bahwa semua dipulihkan tugas untuk memelihara keamanan penguasaan yang diserahkan oleh Musa ca banjak terjual perlawanan yang sangat menjerit-jerit dan berlawanan dengan pemerintahan.

Pada waktu pasukannya Republik masuk Gunung Garung kira-kira 10 kilometer sebelah Barat Madun pada tanggal 10 September, grup besar pejuang-pejuang telah melakukan operasi yang sangat hebat. Dalam pada itu, tentara mereka melarikan diri, terdapat oleh pasukan orang-orang sendiri dari pihak pemerintah, para pemimpin rakyat dan pejuang-pejuang di bawah bendera pemerintah.

P.T.V. Madun sudah saat ini dapat bekerja kembali sebagai biasa, sedang Republik telah bisa mempromosikan Radio Republik Indonesia di Madun pada pukul 20.000 waktu Indonesia.

Tentara pembelaan telah dipukul oleh pemerintah akan dipukul. Hal-hal, pemerintah itu dan telah dipulihkan. Radio Madun telah mulai bekerja, akan di bawah pimpinan tentara Republik Indonesia. Demikian kata radio "Suara Indonesia Merdeka". — Aneta.

Musa ca, melarikan diri ke Dungs.

Lebih jauh radio "Suara Indonesia Merdeka" memberitahukan, bahwa menurut keterangan-keterangan pemerintah Republik Indonesia, Gunung Garung telah dipulihkan kembali oleh pasukan Republik. Menurut berita yang diterima, Musa ca telah melarikan diri ke Dungs. Setelah tempus Madun, tentara pemerintah dipulihkan, akan pemerintah telah melarikan diri ke Dungs yang dipulihkan oleh kaum pembelaan dan pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Republik.

Menyebutkan bahwa yang dengan pasukannya dengan pasukan diri kembali kepada pasukan Republik, pemerintah telah akan pemerintah pasukannya ini untuk memulihkan dan pemerintahan mereka kepada radio "Suara Indonesia Merdeka" yang telah melarikan diri ke Dungs, pemerintah telah melarikan diri ke Dungs.

Selanjutnya radio "Suara Indonesia Merdeka" telah melarikan diri ke Dungs, pemerintah telah melarikan diri ke Dungs.

menjadi komandan militer di daerah Madun, telah melarikan diri ke Dungs. Menurut keterangan-keterangan pemerintah Republik Indonesia, tentara pemerintah telah melarikan diri ke Dungs, pemerintah telah melarikan diri ke Dungs.

Sumber : Warta Harian  
Indonesia Timur, Sabtu 2  
Oktober 1948



Ideologi Komunis lahir sebagai tantangan terhadap ideologi kapitalis dalam rangka membebaskan kelompok *proletor*/buruh dari kelompok *borjuis* dan feodal karena menurut kaum *Marxis* kelompok buruh telah dieksploitasi oleh kelompok Kapitalis. Tahun 1917 Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia mengadakan revolusi Oktober dan berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah sehingga menjadi negara komunis yang pertama. Oleh karena itu gerakan komunis di seluruh dunia memilih Rusia sebagai pusat kegiatan yang ditandai dengan berdirinya *komintern*/organisasi komunis dunia tahun 1919 yang berpusat di Moskow.

Ideologi komunis masuk ke Indonesia tahun 1913 diperkenalkan oleh Sneevliet anggota partai buruh Belanda melalui pusat organisasi buruh kereta api yang berdiri tahun 1908 di Semarang yang dikenal dengan *Vereeniging van Spoor en Trem Wkg Personel/VSTP*. Pada bulan Juli 1914 Sneevliet bersama Sekretaris VSTP H.W. Dekker mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal *Indische Social Democratische Vereeniging/ISDV* atau Serikat Sosial Demokrat India. Melalui surat kabar terbitan ISDV inilah Sneevliet menyebarkan ideologi pertentangan kelas.

Seiring berdirinya komintern maka ISDV menjadi anggota Komintern dan mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indie/PKI yang dalam perkembangannya menjadi Partai Komunis Indonesia/PKI. Dengan dukungan Komintern tahun 1926 mereka mengadakan pemberontakan namun dapat digagalkan oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga sejak saat itu eksistensi PKI bersifat ilegal.

Namun sejak Indonesia merdeka tahun 1945 PKI memanfaatkan situasi awal kemerdekaan untuk menampakkan dirinya dalam berbagai usaha perebutan kekuasaan lokal (Peristiwa Serang 9 Desember 1945, Peristiwa Tangerang 18 Oktober 1945, Peristiwa Tiga Daerah Desember 1945, Peristiwa Bojonegoro 24 September 1945). Namun langkah awal PKI dalam upaya menguasai jajaran pemerintah lokal dalam rangka mengepung wilayah RI tersebut dapat digagalkan oleh TNI bersama rakyat.

Meski bergerak awal PKI tersebut gagal namun mereka tidak pernah berhenti menyusun dan membentuk kekuatannya baik politik, ideologi maupun kekuatan bersenjata dalam rangka mempersiapkan pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 Desember 1948.

ISBN 978-602-95565-2-0



9 786029 556520

Disusun Oleh : Pusjarah TNI

Diterbitkan Oleh : Pusjarah TNI, bekerjasama dengan :  
Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)

Desain Visual & Tata Letak : Sidisi, Jakarta  
(Materi Slap Cetak)